



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PANGAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 86);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 59 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PANGAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
14. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
18. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga
19. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 merupakan:

- a. kebijakan penyelenggaraan Pangan Daerah Provinsi kearah Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan;
- b. acuan penyusunan Rencana Pangan Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

BAB III ARAHAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Arahan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pangan di Daerah Provinsi diarahkan pada:

- a. ketersediaan pangan;
- b. distribusi pangan; dan
- c. pemanfaatan pangan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 4

- (1) Arahan Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan produksi Pangan, baik produksi lokal ataupun pemenuhan dari luar Daerah Provinsi yang mencakup:
 - a. produksi pangan;
 - b. ekspor – impor; dan
 - c. cadangan pangan.
- (2) Strategi pada kebijakan produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan pemetaan wilayah pertanian per komoditi;
 - b. meningkatkan akses petani terhadap modal untuk biaya produksi;
 - c. menerapkan pertanian 4.0;
 - d. regenerasi petani;
 - e. membangun gudang penyimpanan; dan
 - f. mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan (mitigasi pangan) melalui teknologi dan regulasi.
- (3) Strategi pada kebijakan ekspor-impor pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membatasi kebutuhan impor untuk bahan pangan yang benar-benar tidak dapat diproduksi dan/ disediakan sendiri oleh Jawa Barat;

- b. membatasi jumlah komoditi pangan yang diizinkan untuk ekspor keluar Jawa Barat.
- (4) Strategi pada kebijakan cadangan pangan terutama pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c m menetapkan cadangan pangan daerah baik di Provinsi ataupun di Kabupaten/ Kota untuk kepentingan :
- a. memenuhi kebutuhan umum pasokan pangan untuk masyarakat jawa barat;
 - b. memenuhi kebutuhan stok pangan pasca bencana di jawa barat.

Pasal 5

- (1) Arahana distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui kebijakan stabilitas akses pasokan dan harga Pangan dari tangan produsen sampai ke tangan konsumen.
- (2) Strategi pada kebijakan akses pasokan dan harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. membangun sistem informasi pangan berbasis IT dan digital;
 - b. menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses Pangan; dan
 - c. menjamin penyediaan akses pasar bagi produsen.

Pasal 6

- (1) Arahana pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan Pangan dari sisi konsumsi,
- (2) Strategi pada kebijakan mengoptimalkan pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat;
 - b. mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif;
 - c. memperbaiki status gizi masyarakat; dan
 - d. menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan.

BAB IV

SISTEMATIKA DAN ISI DAN URAIAN RENCANA PANGAN PROVINSI

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 7

Sistematika rencana Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II : ANALISIS PERENCANAAN PANGAN
Memuat analisis situasi pangan, target kebutuhan pangan, arahan simpul pangan dan lokus implementasi perencanaan pangan serta arahan rencana aksi multi pihak.
- c. BAB III : SITUASI PANGAN DAN GIZI JAWA BARAT
Memuat situasi Kemandirian Pangan, akses pangan, konsumsi pangan dan masalah gizi
- d. BAB IV : PERENCANAAN PANGAN
Memuat terget kebutuhan pangan Jawa Barat.
- e. BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Memuat arah kebijakan pembangunan Jawa Barat dalam mewujudkan kedaulatan Pangan.

Bagian Kedua

Isi dan Uraian

Pasal 8

Isi dan uraian rencana Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana Pangan di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pangan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan rencana Pangan Provinsi Tahun 2020-2024 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020

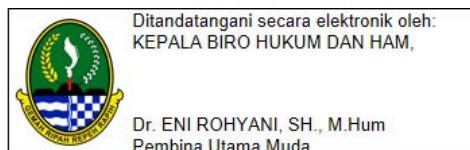
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 112 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG : RENCANA PANGAN PROVINSI
JAWA BARAT TAHUN 2020-2024

RENCANA PANGAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2020-2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui penyelenggaraan pangan, negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2017 tercatat sebanyak 48.037.827 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,39% per tahun. Tingginya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan pangan di Jawa Barat cukup tinggi. Jawa Barat juga diandalkan menjadi penyangga pangan Nasional, terutama untuk komoditas beras, pangan hewani dan hortikultura. Daerah produsen beras berada di kawasan Jawa Barat bagian utara sedangkan kawasan bagian tengah dan selatan merupakan basis produk hortikultura dan peternakan. Di sisi lain, terdapat tantangan penyediaan pangan yaitu alih fungsi lahan pertanian. Berdasarkan BPS Jawa Barat 2014-2018 dalam Dokumen Jawa Barat Dalam Angka, terjadi penurunan lahan pertanian sawah tahun 2013-2017 sebesar 0,74%. Pada kurun waktu tersebut, juga terjadi penurunan luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 11,98%. Produksi pangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyediaan pangan. Pangan yang tersedia dalam jumlah cukup serta berkelanjutan merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan dan gizi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pangan sebagai urusan wajib. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Adapun misi yang terkait dengan pangan adalah misi keempat, yaitu **Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan**. Visi misi pembangunan pangan dan gizi tersebut kemudian dituangkan melalui penetapan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Skor PPH menunjukkan kualitas (keberagaman jenis) konsumsi pangan penduduk yang selanjutnya berdampak pada status gizi. Gizi dalam kaitannya dengan pembangunan berkaitan dengan sumber daya manusia. Individu yang hidup didukung dengan gizi yang cukup sesuai kebutuhan akan tumbuh dan berkembang secara optimal dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Skor PPH Provinsi Jawa Barat tahun 2017 adalah 81,6 dan target yang harus dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2023 adalah 85,6 poin. Skor tersebut menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk Jawa Barat belum beragam dan seimbang, sehingga diperlukan penekanan pada program diversifikasi pangan. Konsumsi pangan kelompok padi-padian dan minyak lemak sudah berlebih sementara konsumsi kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula dan sayur buah masih kurang dari standar kecukupan gizi yang dianjurkan. Konsumsi pangan karbohidrat didominasi oleh beras (100,8 kg/kap/tahun) dan terigu (17,1 kg/kap/tahun). Konsumsi pangan hewani tertinggi adalah ikan (17,7 kg/kap/tahun). Konsumsi kacang-kacangan didominasi oleh kedelai (8,7

kg/kap/tahun). Konsumsi sumber vitamin mineral didominasi oleh sayur (46,8 kg/kap/tahun).

Stunting merupakan masalah gizi utama di Jawa Barat yang memerlukan perhatian lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat. *Stunting* pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) sehingga menjadi terlalu pendek untuk usianya. Prevalensi *stunting* di Jawa Barat tahun 2016 adalah 25,1%, kemudian meningkat menjadi 29,2% pada tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi 31,1% pada tahun 2018. Angka prevalensi tersebut lebih tinggi dari prevalensi Nasional yaitu 30,8% dan termasuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat tingkat tinggi (prevalensi >30%) menurut WHO 2010. Terdapat 140 desa prioritas penanganan *stunting* yang tersebar di 14 kabupaten, yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Subang, Karawang, Bandung Barat dan Majalengka.

Salah satu *major project* Pemerintah Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah penurunan kematian ibu dan *stunting* dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk untuk peningkatan kualitas SDM. Strategi kebijakan percepatan penurunan *stunting* yang dirumuskan pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi. Strategi ini tentunya melibatkan banyak sektor, sehingga diperlukan adanya kerjasama untuk saling mendukung dalam pencapaian target oleh Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.



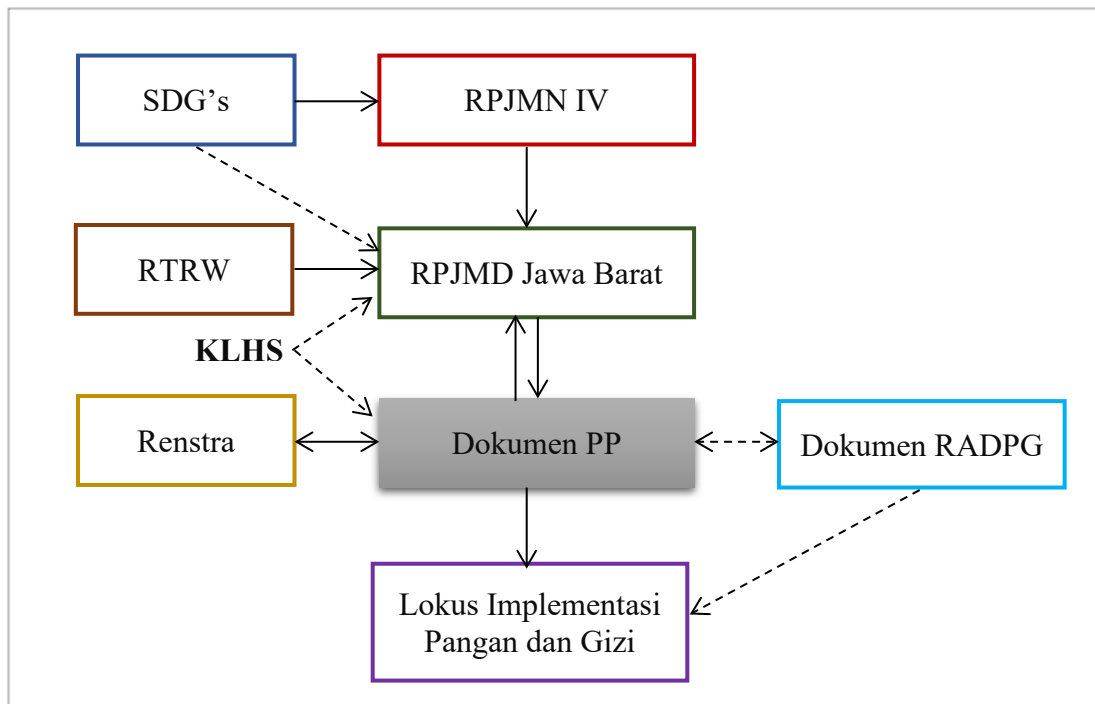
Gambar 1. Lima Pilar Penanganan *Stunting*

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 menunjukkan bahwa Ketahanan Pangan dan Gizi (*Nutritional Food Security*) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk mewujudkan status gizi. Gambar 1 menunjukkan bahwa pilar keempat memiliki tujuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Pilar ini meliputi penguatan kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan masyarakat, mencakup pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, pemberian bantuan pangan dan makanan tambahan, investasi inovasi dan pengembangan produk, serta keamanan pangan. Pilar 4 berfokus pada :

1. Mendorong kebijakan yang memastikan akses pangan bergizi, khususnya di daerah dengan kasus *stunting* tinggi
2. Melaksanakan rencana fortifikasi bio-energi, makanan dan pupuk yang komprehensif
3. Pengurangan kontaminasi pangan

4. Melaksanakan program pemberian makanan tambahan
5. Mengupayakan investasi melalui kemitraan dengan dunia usaha, dana desa, dan lain-lain dalam infrastruktur pasar pangan baik di tingkat urban maupun rural

Adapun hubungan antar dokumen dalam penyusunan perencanaan pangan Jawa Barat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Hubungan Dokumen PP dalam Kerangka SPPN

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Perencanaan Pangan Provinsi Jawa Barat 2019-2023 adalah sebagai berikut:

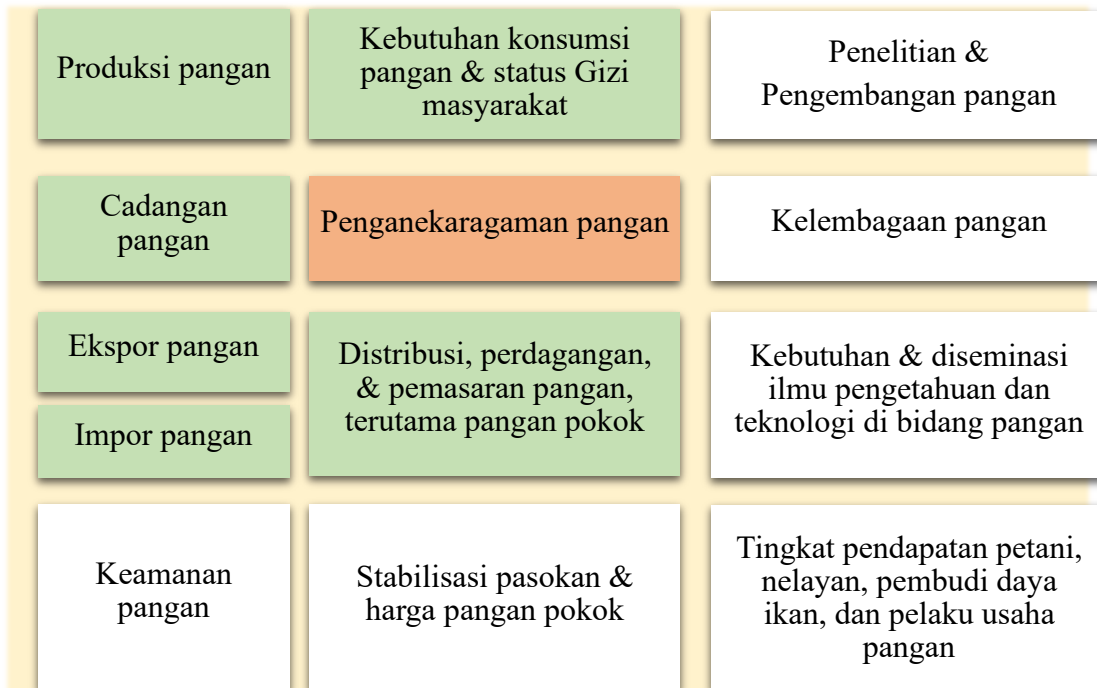
1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral dan lintas wilayah
2. Menentukan arahan kawasan dan simpul pangan Jawa Barat sebagai akses distribusi pangan regional
3. Menentukan arahan lokus implementasi perencanaan pangan Jawa Barat
4. Menentukan arahan pengembangan komoditas pertanian di Jawa Barat
5. Meningkatkan peran dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk berdasarkan sumber daya lokal
6. Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sebagai panduan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan pangan di Jawa Barat dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan regulasi dan kebijakan tentang pangan di Jawa Barat.
7. Tersedianya naskah akademik yang menjadi acuan dalam mewujudkan dimensi ketahanan pangan Jawa Barat yakni dari ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas.

1.3 Ruang Lingkup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menjabarkan bahwa Perencanaan Pangan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah pertumbuhan dan sebaran penduduk; kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; daya dukung alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan; kebutuhan sarana dan prasarana

penyelenggaraan pangan; potensi pangan dan budaya lokal; rencana tata ruang wilayah; dan rencana pembangunan Nasional dan daerah. Perencanaan pangan Provinsi Jawa Barat juga dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan rencana pangan tingkat Provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana pangan Nasional.

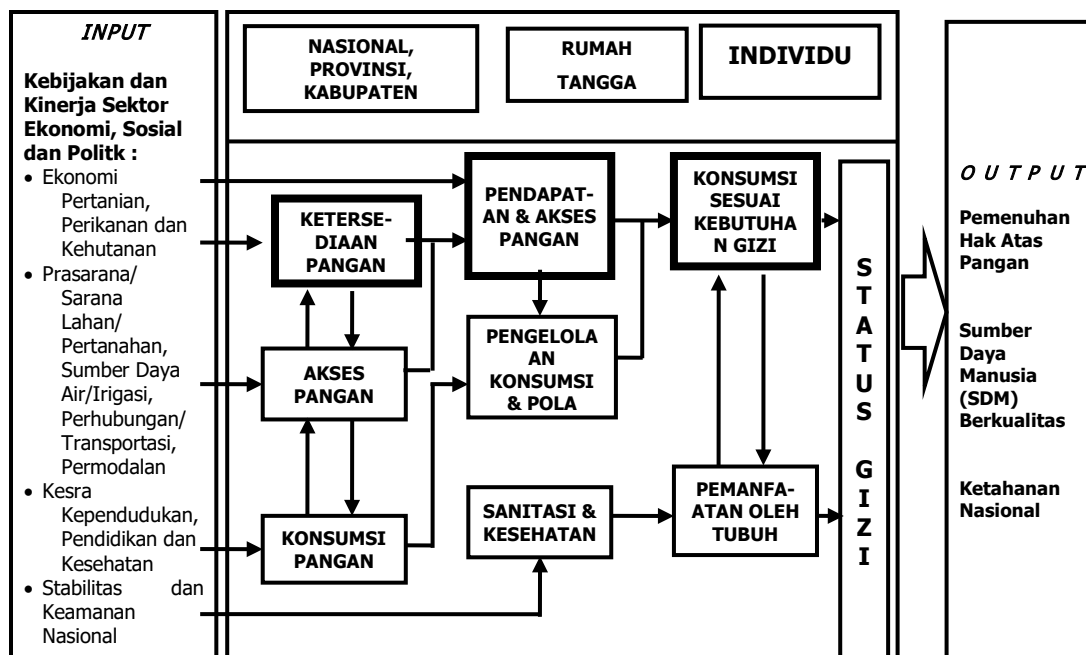
Tujuan perencanaan pangan adalah untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan sehingga menghasilkan status gizi yang baik hingga tingkat perseorangan untuk hidup sehat, aktif, dan berkelanjutan. Ruang lingkup dan variabel perencanaan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Ruang Lingkup dan Variabel Perencanaan Pangan Jawa Barat

Ruang lingkup dan variabel dalam perencanaan pangan Provinsi Jawa Barat meliputi produksi pangan, cadangan pangan, ekspor pangan, impor pangan, kebutuhan konsumsi pangan dan status gizi masyarakat, distribusi perdagangan dan pemasaran pangan, serta penganekaragaman pangan. Variabel keamanan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pokok, penelitian dan pengembangan pangan, kelembagaan pangan, kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dan tingkat pendapatan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan tidak menjadi ruang lingkup perencanaan pangan Jawa Barat. Penganekaragaman pangan merupakan indikator aspek kesejahteraan masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 dan diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang (Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012).

Sistem pangan yang mencakup baik perencanaan pangan dan penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Ketahanan pangan dan gizi merupakan sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, akses pangan, dan konsumsi pangan. Ketiga subsistem tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi subsistem lainnya. Keterjaminan ketiga subsistem tersebut akan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi seperti yang dapat dilihat di Gambar 4.



Gambar 4. Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi

Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan, dan impor pangan jika kebutuhan pangan tidak dapat dipenuhi dari dua sumber utama tersebut. Subsistem ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Pemenuhan kebutuhan dan konsumsi pangan ini harus memperhatikan jumlah, kualitas, keragaman, dan keamanan pangan. Dengan demikian, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah tidak hanya untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah, tetapi juga untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal.

Subsistem akses pangan bertujuan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau. Subsistem ini mencakup akses pangan secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Akses pangan secara fisik meliputi akses masyarakat terhadap pangan atau pasar, sedangkan akses pangan secara ekonomi menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang ditunjukkan oleh harga dan daya beli. Akses pangan secara sosial dicerminkan oleh tingkat pendidikan, bantuan sosial, kebiasaan makan, dan konflik sosial maupun keamanan. Akses pangan juga didukung oleh pemeliharaan lingkungan khususnya sumber daya pangan. Konservasi sumber daya alam menjadi penting untuk dilaksanakan dan dilestarikan untuk menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jika sumber pangan berasal dari eksploitasi sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, tidak akan ada jaminan ketahanan pangan untuk ke depannya.

Subsistem konsumsi pangan bertujuan untuk memenuhi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Konsumsi pangan dipenuhi melalui pencapaian angka konsumsi per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi pangan penduduk, tetapi juga memastikan bahwa konsumsi pangan penduduk berkualitas melalui keragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Berdasarkan kerangka determinan status gizi UNICEF (1998), konsumsi merupakan determinan penyebab langsung status gizi. Sedangkan ketersediaan dan akses pangan menjadi faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi konsumsi.

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk, berupa jumlah dan komposisi pangan menurut kelompok secara agregat digunakan parameter Pola Pangan Harapan (PPH). Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pangan juga menggunakan pendekatan skor PPH. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima. Skor PPH merupakan acuan jumlah dan jenis kelompok bahan pangan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Semakin baik penyediaan dan konsumsi pangan di wilayah tertentu, skor ideal akan semakin mendekati skor ideal, yaitu 100. Melalui pendekatan PPH, perencanaan kebutuhan pangan penduduk pada tahun mendatang diharapkan dapat mencapai ideal, yaitu tidak hanya memenuhi kecukupan gizi (*nutritional adequacy*), akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

Selain itu, penyusunan perencanaan pangan juga menggunakan pendekatan integratif, berpikir secara holistik-tematik dari hulu ke hilir serta berbasis spasial. Pendekatan integratif adalah pendekatan pembangunan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, penyusunan perencanaan pangan dilaksanakan dengan turut memperhatikan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan Provinsi. Sementara itu, pendekatan holistik-tematik adalah pendekatan yang mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan holistik-tematik pada perencanaan pangan diimplementasikan dengan turut mempertimbangkan masalah pangan dari sisi *supply* (hulu) hingga sisi *demand* (hilir). Adapun pendekatan spasial/ruang merupakan pendekatan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan termasuk kebijakan penataan ruang yang terkait pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang, dan pola ruang. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pangan Jawa Barat turut mengadopsi kebijakan penataan ruang terkait pengembangan wilayah yang dibagi menjadi 6 WP (Wilayah Pengembangan).

Penyusunan Dokumen perencanaan pangan juga dilaksanakan dengan pendekatan inklusif dan kolaboratif sehingga bersifat konvergen lintas sektoral. Perencanaan pangan di Jawa Barat dilakukan secara inklusif yakni memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dan mendapatkan manfaat positif dalam proses pembangunan pangan. Sementara itu, pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak untuk bersama-sama mencapai ketahanan pangan dan gizi di Jawa Barat. Hal ini juga disampaikan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat bahwa kekuatan pembangunan suatu negara atau wilayah perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunan tak bisa dilakukan satu pihak. Oleh karena itu, Jawa Barat menggunakan konsep pembangunan *pentahelix*, di mana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan pangan Jawa Barat yaitu:

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Perkebunan
- Dinas Kehutanan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Pendidikan
- Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
- Dinas Sumber Daya Air
- Dinas Sosial
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Perhubungan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Badan Pusat Statistik
- Badan Pengawasan Obat dan Makanan
- Unsur Akademisi
- Unsur Masyarakat
- Unsur Dunia Usaha

II. ANALISIS PERENCANAAN PANGAN

2.1. Analisis Situasi Pangan Dan Gizi

A. Analisis Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Kemandirian pangan disebut juga sebagai kemampuan suatu wilayah untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dengan produksi dari daerahnya sendiri. Semakin mandiri suatu daerah, semakin terjamin ketersediaan pangan bagi penduduknya. Adapun kategori yang digunakan untuk kemandirian pangan adalah sebagai berikut:

- Defisit = Ketersediaan Energi < 90%
- Mandiri Pangan = 90% < Ketersediaan Energi < 110%
- Surplus Pangan = Ketersediaan energi > 110%

Keterangan: Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.400 kkal/kap/hari

Pengolahan data kemandirian pangan menggunakan *software* Neraca Bahan Makanan Tahun 2018. Neraca Bahan Makanan (NBM) didefinisikan sebagai suatu tabel yang terdiri atas kolom-kolom yang memuat berbagai informasi tentang situasi dan kondisi penyediaan pangan bagi penduduk suatu negara atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Neraca ini terdiri atas 19 kolom yang terbagi menjadi tiga kelompok penyajian yaitu :

- (1) Pengadaan atau penyediaan (*supply*);
- (2) Penggunaan atau pemakaian (*utilization*); dan
- (3) Ketersediaan per kapita.

Jumlah pengadaan harus sama dengan jumlah penggunaan. Komponen pengadaan meliputi produksi (masukan dan keluaran), perubahan stok, impor dan ekspor. Sedangkan komponen penggunaan meliputi penggunaan untuk bibit, pakan, industri (makanan dan bukan makanan), dan tercecer. Pada analisis kemandirian pangan ini, komponen pengadaan yang digunakan hanya produksi pangan tahun 2017. Adapun komponen cadangan pangan, impor dan ekspor pangan diabaikan.

Analisis situasi kemandirian pangan dilakukan terhadap (1) jumlah ketersediaan energi, (2) jumlah ketersediaan protein, (3) kualitas kemandirian pangan. Analisis jumlah kemandirian pangan dilakukan berdasarkan tingkat kecukupan energi (TKE) dan tingkat kecukupan protein (TKP). Analisis TKE dan TKP tersebut dilakukan dengan cara membandingkan jumlah ketersediaan energi dan protein aktual yang dianjurkan oleh WNPG X tahun 2012 yaitu sebesar 2.400 kkal/kap/hari untuk energi dan 63 g/kap/hari untuk protein.

Sementara itu, mutu kemandirian pangan dicerminkan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH dihitung dengan mengalikan kontribusi energi kelompok pangan dengan bobot kelompok pangan tersebut. Secara umum, semakin tinggi skor PPH, kemandirian pangan wilayah tersebut semakin baik. Skor PPH maksimum adalah 100 poin. Jika skor kemandirian pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan mandiri pangan karena telah mencapai angka ideal. Berdasarkan pendekatan PPH maka data kemandirian pangan dikelompokkan ke dalam sembilan kelompok pangan. Jumlah komposisi ketersediaan dan skor PPH acuan disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 1. Susunan PPH Nasional dan Jumlah Kemandirian Pangan

No.	Kelompok Pangan	% AKE	Bobot	Skor PPH	Energi (kkal/kap/hari)
					Kemandirian
1	Padi-padian	50	0,5	25,0	1.200
2	Umbi-umbian	6	0,5	2,5	144
3	Pangan hewani	12	2,0	24,0	288
4	Minyak dan lemak	10	0,5	5,0	240
5	Buah/biji berminyak	3	0,5	1,0	72
6	Kacang-kacangan	5	2,0	10,0	120
7	Gula	5	0,5	2,5	120
8	Sayur dan buah	6	5,0	30,0	144
9	Lainnya	3	0,0	0	72
	Jumlah	100		100	2.400

Sumber : WNPG X tahun 2012

Analisis kemandirian pangan jenis beras dilakukan dengan menggunakan dua skema, yaitu (1) Membandingkan produksi beras Jawa Barat data tahun 2017 terhadap konsumsi pangan aktual Jawa Barat data tahun 2017, dan (2) Membandingkan produksi pangan Jawa Barat berdasarkan Kerangka Sampling Area tahun 2018 terhadap konsumsi pangan aktual penduduk Jawa Barat data tahun 2017. Sementara itu, analisis kemandirian pangan lainnya (non beras) dilakukan dengan menggunakan satu skema, yaitu membandingkan produksi pangan Jawa Barat data tahun 2017 terhadap konsumsi pangan aktual penduduk Jawa Barat data tahun 2017.

Kemandirian pangan suatu wilayah dipengaruhi oleh daya dukung pangan dan daya dukung air sebagai faktor produksi. Daya dukung pangan merupakan kemampuan wilayah dalam memproduksi beraneka ragam pangan, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup sampai di tingkat perseorangan. Analisis daya dukung pangan dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap komoditas beras, jagung, ubi

jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, dan minyak sawit. Daerah yang terkategori surplus menunjukkan produksi bersih lebih tinggi dari pada konsumsi aktual penduduknya sehingga memiliki daya dukung pangan yang baik. Daerah defisit menunjukkan produksi bersih lebih rendah dari pada konsumsi aktual penduduknya sehingga memiliki daya dukung pangan yang kurang memadai. Perhitungan daya dukung pangan suatu wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan terhadap kemandirian pangan di wilayah tersebut. Adapun rumus perhitungan daya dukung pangan adalah sebagai berikut :

$$\text{Daya Dukung Pangan} = \text{Produksi Bersih (ton)} - \text{Konsumsi Aktual (ton)}$$

Produksi bersih adalah jumlah produksi pangan yang telah dikurangi dengan penggunaan yaitu bibit, pakan, penggunaan untuk industri makanan, penggunaan untuk industri non-makanan dan tercecer. Angka konversi penggunaan pangan mengacu pada Neraca Bahan Makanan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2017. Adapun konsumsi pangan aktual yang digunakan berasal dari data Susenas Jawa Barat, BPS Jawa Barat 2018, diolah. Pengolahan data Susenas menggunakan *software* Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2017.

Peningkatan ketersediaan pangan seharusnya tidak hanya fokus oleh peningkatan produksi akan tetapi dapat dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menurunkan kehilangan pada tahap produksi dan distribusi (*food losses*) dan kehilangan pangan pada tahap konsumsi (*food waste*), sehingga dilakukan analisis jumlah *food losses and waste* di Jawa Barat. Perhitungan *food losses and waste* (FLW) di Jawa Barat dilakukan dengan mengacu pada asumsi FAO dalam Dokumen *Global Food Losses and Waste* tahun 2011. *Food Losses and Waste* terjadi saat proses produksi, proses pasca panen, proses distribusi, dan proses konsumsi. Asumsi persentase *food losses and waste* kelompok pangan padi-padian untuk wilayah Asia Tenggara adalah 6% saat proses produksi, 7% saat pasca panen, 2% saat proses distribusi, dan 3% saat makanan akan dikonsumsi. Masing-masing persentase dikalikan dengan jumlah produksi beras pada tahun 2016 dan 2017. Perhitungan *food losses and waste* dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 untuk melihat perkembangan FLW yang terjadi.

B. Analisis Akses Pangan

Akses pangan adalah salah satu subsistem penting untuk tercapainya ketahanan pangan. Subsistem ini mencakup aspek akses secara fisik, ekonomi maupun sosial. Akses pangan secara fisik ditunjukkan oleh kemampuan memperoleh pangan melalui infrastruktur dasar maupun kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. Akses fisik lebih bersifat kewilayahan serta dipengaruhi oleh ciri dan pengelolaan ekosistem. Akses pangan secara ekonomi menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang ditunjukkan oleh harga, sumber mata pencaharian dan pendapatan. Akses pangan secara sosial dicerminkan oleh tingkat pendidikan, bantuan sosial, kebiasaan makan, dan konflik sosial maupun keamanan.

Tidak semua variabel akses pangan dianalisis. Akses pangan yang dianalisis dalam dokumen ini adalah akses pangan secara ekonomi dan akses pangan secara sosial. Akses pangan secara ekonomi yakni stabilitas harga pasar, dan pendapatan yang dicerminkan melalui tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Semakin rendah tingkat kemiskinan, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat. Data tingkat kemiskinan

bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam Dokumen Kemiskinan Kabupaten/Kota Jawa Barat 2013-2018. Data tingkat kemiskinan kemudian dihubungkan dengan perilaku konsumsi masyarakat.

Perilaku konsumsi masyarakat juga ditinjau dari pola alokasi pengeluaran. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk makanan dan non-makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan dan produktivitas rumah tangga sementara pola konsumsi rumah tangga non makanan menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kehidupan sosial rumah tangga di mata masyarakat. Pengeluaran untuk makanan dan non-makanan saling terkait satu sama lain. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan pasti akan menjadi pengeluaran utama di rumah tangga sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli makanan. Meningkatnya pendapatan secara umum akan menjadikan pergeseran pola pengeluaran, dimana pengeluaran untuk makanan akan menurun dan terjadi peningkatan pada porsi pengeluaran non-makanan. Data pengeluaran makanan dan non-makanan bersumber dari Badan Pusat Statistik dalam Dokumen Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2018. Sementara itu, variabel akses pangan secara sosial yang dianalisis adalah tingkat pendidikan. Data tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat diperoleh dari Data BPS Indonesia 2019.

C. Analisis Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang di makan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu. Konsumsi pangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu secara biologik, psikologik, maupun sosial. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Sumber data konsumsi pangan berasal dari data Susenas, BPS Jawa Barat. Data yang digunakan adalah rata-rata konsumsi perkapita seminggu menurut jenis makanan dan golongan pengeluaran yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 untuk 27 Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Barat. Pengolahan data Susenas menggunakan *software* Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Analisis situasi konsumsi pangan dilakukan terhadap (1) jumlah konsumsi energi (kkal/kap/hari) (2) jumlah konsumsi protein (g/kap/hari) serta (3) mutu konsumsi pangan. Analisis jumlah konsumsi pangan dilakukan berdasarkan tingkat kecukupan energi (TKE) dan tingkat kecukupan protein (TKP). Analisis TKE dan TKP tersebut dilakukan dengan cara membandingkan jumlah konsumsi energi dan protein aktual yang dianjurkan yaitu WNPG VIII tahun 2004 untuk data tahun 2013-2016 serta WNPG VIII tahun 2004 dan WNPG X tahun 2012 untuk data tahun 2017.

Skor mutu konsumsi pangan yang dicerminkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dihitung dengan cara mengalikan kontribusi energi kelompok pangan dengan bobot kelompok pangan tersebut. Secara umum semakin tinggi skor PPH, keragaman pangan yang dikonsumsi semakin baik. Namun perlu diingat, skor mutu setiap kelompok pangan tidak boleh melebihi skor maksimum. Jika hal ini terjadi, maka skor yang digunakan adalah skor maksimum. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan karena telah mencapai angka ideal. Berdasarkan pendekatan PPH maka data konsumsi pangan dari Susenas dikelompokkan ke dalam sembilan kelompok pangan. Jumlah, komposisi (% AKE) dan skor PPH acuan terdapat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 2. Jumlah, Komposisi dan Skor PPH Berdasarkan WNPG Tahun 2004

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan					% AKE (FAO- RAPA)
		Berat (g/kap/hr)	Energi (kkal/kap/hr)	% AKE	Bobot	Skor PPH	
1.	Padi – padian	275	1000	50,0	0,5	25,0	40,0 - 60,0
2.	Umbi-umbian	100	120	6,0	0,5	2,5	0,0 - 8,0
3.	Pangan Hewani	150	240	12,0	2,0	24,0	5,0 - 20,0
4.	Minyak & Lemak	20	200	10,0	0,5	5,0	5,0 - 15,0
5.	Buah/Biji Berminyak	10	60	3,0	0,5	1,0	0,0 - 3,0
6.	Kacang-kacangan	35	100	5,0	2,0	10,0	2,0 - 10,0
7.	Gula	30	100	5,0	0,5	2,5	2,0 - 15,0
8.	Sayur & Buah	250	120	6,0	5,0	30,0	3,0 - 8,0
9.	Lain – lain		60	3,0	0,0	0,0	0,0 - 5,0
Jumlah			2.000	100	-	100	

Sumber : WNPG VIII tahun 2004

Tabel 3. Jumlah, Komposisi dan Skor PPH Berdasarkan WNPG Tahun 2012

No	Kelompok Pangan	Skor Pola Pangan Harapan					% AKE (FAO- RAPA)
		Berat (g/kap/hr)	Energi (kkal/kap/hr)	% AKE	Bobot	Skor PPH	
1.	Padi – padian	300	1.075	50,0	0,5	25,0	40,0 - 60,0
2.	Umbi-umbian	108	129	6,0	0,5	2,5	0,0 - 8,0
3.	Pangan Hewani	161	258	12,0	2,0	24,0	5,0 - 20,0
4.	Minyak & Lemak	22	215	10,0	0,5	5,0	5,0 - 15,0
5.	Buah/Biji Berminyak	11	65	3,0	0,5	1,0	0,0 - 3,0
6.	Kacang2an	38	108	5,0	2,0	10,0	2,0 - 10,0
7.	Gula	32	108	5,0	0,5	2,5	2,0 - 15,0
8.	Sayur & Buah	269	129	6,0	5,0	30,0	3,0 - 8,0
9.	Lain – lain		65	3,0	0,0	0,0	0,0 - 5,0
Jumlah			2.150	100	-	100	

Sumber : WNPG X tahun 2012

Langkah menghitung skor PPH adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung nilai jumlah energi yang diperoleh dari setiap bahan pangan.
- 2) Menghitung nilai total energi yang diperoleh dari semua bahan pangan.
- 3) Menghitung Tingkat Kecukupan Energi (TKE) berupa persentase energi masing-masing kelompok pangan terhadap AKE yang dianjurkan WNPG VIII tahun 2004 untuk data tahun 2013-2016 serta WNPG VIII tahun 2004 dan WNPG X tahun 2012 untuk data tahun 2017.
- 4) Mengalikan hasil persentase energi dengan bobot, sehingga diperoleh skor untuk setiap kelompok pangan. Apabila skor melebihi nilai maksimal maka digunakan skor maksimal. Apabila skor kurang dari nilai maksimal maka digunakan skor hasil perkalian.
- 5) Menjumlahkan skor semua kelompok pangan sehingga diketahui skor PPH yang menggambarkan mutu konsumsi pangan.

D. Analisis Sinkronisasi Program Antar Organisasi Perangkat Daerah

Analisis sinkronisasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketahanan pangan dan gizi dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis isi). Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis ini juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif.

Analisis sinkronisasi dilakukan dengan mengelompokkan program/kegiatan lintas sektoral yang tercantum pada RPJMD Jawa Barat 2019-2023 menjadi 3 (tiga) subsistem ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan konsumsi pangan. Selanjutnya, dianalisis apakah program/kegiatan lintas sektoral yang dijalankan di Jawa Barat sudah cukup memadai untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pencapaian target skor PPH konsumsi pangan.

2.2 Target Kebutuhan Pangan

Target kebutuhan pangan dihitung dari kebutuhan konsumsi pangan, penggunaan pangan dan cadangan pangan. Penggunaan pangan terdiri dari pakan, bibit, tercecer, penggunaan industri makanan dan industri non-makanan. Untuk ekspor dan impor pangan tidak masuk dalam analisis karena data tidak tersedia di lingkup Provinsi Jawa Barat.

Data dasar konsumsi dan penggunaan pangan menggunakan Susenas tahun 2017 yang kemudian dilakukan proyeksi linear selama 5 tahun kedepan (2019 - 2023). Tahun 2017 dijadikan tahun dasar karena realisasi skor PPH tahun 2017 dengan AKE 2.000 kkal/kap/tahun maupun AKE 2.150 kkal/kap/tahun sudah memenuhi target skor PPH Jawa Barat pada tahun tersebut. Adapun proyeksi cadangan beras tahun 2019 - 2023 dihitung menggunakan dua variabel yaitu proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi konsumsi beras. Data proyeksi jumlah penduduk diperoleh dari Dokumen Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS 2019, sedangkan data proyeksi konsumsi beras dihitung berdasarkan pendekatan PPH. Rumus perhitungan kebutuhan pangan disajikan sebagai berikut:

$$\text{Kebutuhan Pangan} = \text{Kebutuhan Konsumsi Pangan} + \text{Cadangan Pangan} + \text{Penggunaan Pangan}$$

Sasaran kebutuhan pangan di Jawa Barat direncanakan untuk tahun 2019 - 2023. Sasaran kebutuhan konsumsi disesuaikan dengan target skor PPH Jawa Barat dalam RPJMD Jawa Barat tahun 2018 - 2023. Target akhir skor PPH adalah sebesar 85,6 poin pada tahun 2023 dengan peningkatan 0,8 poin per tahun. Target skor PPH tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi kebutuhan konsumsi pangan dalam satuan kg/kap/tahun dan ton/tahun. Selanjutnya target skor PPH tersebut diproyeksikan dengan peningkatan PDRB atas harga konstan Jawa Barat. Rumus yang digunakan untuk menghitung proyeksi peningkatan PDRB atas harga konstan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\text{PDRB atas harga konstan tahun 2023} = \text{Proyeksi pengeluaran penduduk dalam sebulan} \times 12 \times \text{Proyeksi jumlah penduduk tahun 2023}$$

Proyeksi pengeluaran penduduk yang digunakan adalah penduduk dengan pengeluaran konsumsi yang mencapai target skor PPH tahun 2023. Angka pengeluaran ini kemudian dikalikan dengan 12 untuk memperoleh pengeluaran konsumsi penduduk dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, angka yang diperoleh dikalikan dengan proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2023 dari Dokumen Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS 2019 untuk melihat jumlah pengeluaran konsumsi yang digunakan penduduk Jawa Barat dalam waktu satu tahun.

Kebutuhan pangan penduduk Jawa Barat selanjutnya *dioverlaykan* dengan data produksi pangan aktual Provinsi Jawa Barat tahun 2017 untuk melihat potensi tercapainya kebutuhan. Khusus kebutuhan beras, *overlay* dilakukan pada dua data produksi yaitu data produksi tahun 2017 (metode survey ubinan) dan data produksi tahun 2018 (metode Kerangka Sampel Area (KSA). Sementara itu, untuk pangan lainnya hanya *dioverlaykan* dengan data produksi aktual tahun 2017.

Selain itu, data kebutuhan pangan penduduk Jawa Barat juga *dioverlaykan* dengan target produksi pangan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkup Pertanian Provinsi Jawa Barat, yakni Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk pangan beras, jagung, kedelai, sayur, buah, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk jenis pangan daging, telur, susu, serta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk ikan. Hal ini dilakukan untuk melihat sinkronisasi target yang disusun Pemerintah terhadap potensi produksi yang ada dilapang. Gap positif antara target renstra dan kebutuhan pangan menunjukkan bahwa target produksi renstra sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Sebaliknya, gap negatif menunjukkan bahwa target produksi renstra belum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk Jawa Barat. Adapun uraian metode perhitungan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Barat 2019 - 2023 disajikan sebagai berikut.

A. Kebutuhan Konsumsi Pangan

Kebutuhan konsumsi penduduk merupakan kebutuhan pangan yang murni digunakan untuk dikonsumsi tanpa memperhitungkan pakan, bibit, tercecer, maupun penggunaan industri. Kebutuhan konsumsi pangan dihitung berdasarkan data tahun dasar 2017. Perhitungan kebutuhan konsumsi pangan menggunakan angka proyeksi konsumsi selama 5 tahun ke depan. Angka proyeksi konsumsi diambil dari data dasar konsumsi tahun 2017 menggunakan *software* Aplikasi Harmonisasi Analisis Pola Pangan Harapan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun 2017 *sheet* proyeksi konsumsi. Proyeksi konsumsi pangan kemudian dihitung menjadi kebutuhan konsumsi pangan. Kebutuhan konsumsi pangan diperoleh dari angka proyeksi konsumsi dikalikan dengan 110%. Data kebutuhan konsumsi diambil dari *sheet* estimasi kebutuhan.

B. Cadangan Pangan

Perhitungan jumlah cadangan beras pemerintah yang digunakan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Perhitungan jumlah cadangan beras Pemerintah Pusat ataupun Daerah mempertimbangkan variabel jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun, dan proporsi terhadap cadangan beras Nasional. Perhitungan cadangan pangan dilakukan untuk 5 tahun kedepan yakni tahun 2019-2023. Variabel jumlah penduduk tahun 2017-2018 menggunakan data jumlah penduduk aktual. Sementara itu, variabel jumlah penduduk tahun 2019-2023 menggunakan data proyeksi jumlah penduduk yang diperoleh dari Dokumen Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS 2019. Adapun variabel konsumsi beras per kapita per tahun menggunakan data konsumsi dan data proyeksi konsumsi dengan tahun dasar 2017. Data konsumsi beras dalam satuan g/kap/hari perlu dikonversi menjadi satuan kg/kap/tahun dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Konsumsi Beras Provinsi} = (b / 1000) \times 365$$

Keterangan :

b = Konsumsi beras Provinsi (gram/kap/hari)

365 = Jumlah hari dalam setahun

1000 = Faktor konversi ke ton

Sementara itu, penentuan proporsi cadangan pangan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018. Proporsi cadangan beras Nasional adalah sebesar 20% dari total kebutuhan beras Nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat, 8% berada di pemerintah pusat, dan 0,5% berada di pemerintah daerah. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan Nasional sebesar 0,5%. Angka tersebut menjadi proporsi utama dalam perhitungan cadangan beras pemerintah Provinsi.

Cadangan yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan pangan adalah cadangan beras total Provinsi. Cadangan beras total Provinsi Jawa Barat adalah cadangan beras Provinsi Jawa Barat (CBPP) ditambah dengan cadangan beras pemerintah kabupaten (CBPK) 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Cadangan beras pemerintah Provinsi Jawa Barat diasumsikan memiliki proporsi 20% dari total cadangan beras total Provinsi Jawa Barat dan 80% lainnya merupakan gabungan dari CBPK 27 Kabupaten/Kota. Adapun cadangan beras total Provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$CBT = \frac{(0,5\% \times n_p \times k)}{1000}$$

Keterangan :

CBT = Cadangan beras total Provinsi Jawa Barat (ton/tahun)

n_p = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat (jiwa/tahun)

k = Konsumsi beras di Provinsi Jawa Barat (kg/kap/tahun)

C. Penggunaan Pangan

Komponen penggunaan pangan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri (makanan dan bukan makanan), serta komponen tercecer. Pakan adalah sejumlah bahan makanan yang langsung diberikan kepada ternak peliharaan baik ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun ikan. Sementara itu, bibit adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan reproduksi. Beberapa jenis pangan juga digunakan untuk keperluan industri, baik untuk industri makanan maupun industri non-makanan. Adapun tercecer adalah sejumlah bahan makanan yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat dimakan oleh manusia, yang terjadi secara tidak sengaja mulai dari panen, pengolahan pasca panen, penyimpanan, pendistribusian hingga tersedia di pasar.

Penggunaan pangan dihitung untuk mengetahui jumlah penggunaan pangan yang dibutuhkan pada 5 tahun kedepan yakni tahun 2019-2023. Penggunaan pangan diperoleh dari data dasar produksi tahun 2017 yang diinput menggunakan *software* Neraca Bahan Makanan Tahun 2017. Data penggunaan pangan dapat dilihat pada *sheet* NBM kolom penggunaan yakni kolom 9 hingga kolom 13.

2. 3. Arahkan Kawasan dan Simpul Pangan

Kawasan dan simpul pangan yang dibuat adalah kawasan dan simpul untuk pangan beras. Simpul pangan ini dibuat untuk menentukan rute terbaik distribusi beras dari daerah surplus menuju daerah defisit dalam regional Jawa Barat. Data yang cukup banyak dan kompleks menjadi salah satu persoalan dalam mengembangkan analisis jalur distribusi pangan, namun yang paling penting adalah bagaimana cara memanipulasi hal tersebut sehingga proses pencarian rute tidak terlalu memakan waktu yang lama sehingga analisa jalur distribusi pangan menjadi:

1. Efisien
2. Biaya murah
3. Terbentuknya rantai distribusi pangan
4. Terbentuknya titik dan jaringan infrastruktur logistik pangan

2. 4. Arahan Lokus Implementasi Perencanaan Pangan dan Gizi

Penentuan lokus disusun untuk memetakan lokasi (Kabupaten/Kota) di Jawa Barat yang perlu diprioritaskan sebagai daerah sasaran perencanaan pangan. Terdapat dua pendekatan untuk menentukan lokus, yakni sisi *supply* dan *demand* pangan sebagai fokus penanganan untuk OPD terkait. Lokus *supply* pangan atau disebut lokus sentra produksi pangan merupakan lokus yang diarahkan menjadi prioritas program/kegiatan bagi Dinas Lingkup Pertanian. Lokus sentra produksi pangan diperoleh dari hasil *overlay* kemandirian pangan, skor PPH konsumsi, dan prevalensi *stunting*. Terdapat dua jenis prioritas dalam lokus ini, yakni prioritas 1 dan prioritas 2. Adapun kategori masing-masing prioritas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Pembagian Prioritas Lokus Sentra Produksi

Prioritas	Kemandirian pangan	Skor PPH konsumsi	Prevalensi <i>stunting</i>
1	Surplus	< 80 poin	> 20%
2	Surplus	> 80 poin	> 20%

Sumber : Kemandirian Pangan : Susenas Jawa Barat 2018, diolah; Skor PPH : DKPP Jabar 2018; Prevalensi *stunting*: PSG, Kemenkes RI 2018

Lokus sentra produksi prioritas 1 adalah wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi surplus produksi, skor PPH konsumsi kurang dari 80 poin, dan prevalensi *stunting* lebih dari 20%. Adapun lokus sentra produksi prioritas 2 adalah wilayah yang memiliki potensi surplus produksi, skor PPH konsumsi sudah lebih dari 80 poin namun prevalensi *stunting* masih berada di atas 20%. Terdapat 12 komoditas pangan dengan dua prioritas lokus sentra produksi, diantaranya lokus sentra produksi beras, jagung, ubi, kacang tanah, kelapa, gula merah, daging ruminansia, daging unggas, ikan, susu, sayur, dan buah.

Selanjutnya, lokus *demand* pangan atau disebut lokus penanganan pangan dan gizi adalah lokasi khusus hasil *overlay* kualitas konsumsi pangan, skor PPH konsumsi, dan prevalensi *stunting*. Lokus ini merupakan lokus yang diarahkan menjadi prioritas Dinas Lingkup Pemberdayaan untuk mengatasi masalah pangan dan gizi di masing-masing wilayah. Terdapat dua jenis prioritas dalam lokus ini, yakni prioritas 1 dan prioritas 2. Adapun kategori masing-masing prioritas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Pembagian Prioritas Lokus Penanganan Pangan dan Gizi

Prioritas	Skor PPH konsumsi	Prevalensi <i>stunting</i>	Konsumsi beras	Konsumsi ubi	Konsumsi pangan hewani	Konsumsi kacang-kacangan	Konsumsi sayur dan buah
1	< 90 poin	> 30%	↑	↓	↓	↓	↓
2	< 90 poin	> 30%	↑	↓	↑	↓	↓

Sumber : Skor PPH: DKPP Jawa Barat 2018; Prevalensi *stunting*: PSG, Kemenkes RI 2018; Kualitas konsumsi: Susenas Jawa Barat 2018, diolah

Lokus penanganan pangan dan gizi prioritas 1 adalah wilayah di Jawa Barat dengan skor PPH konsumsi <90 poin, prevalensi *stunting* >30%, memiliki kualitas konsumsi beras yang berlebih, namun konsumsi ubi, pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah masih rendah. Lokus penanganan pangan dan gizi prioritas 2 adalah wilayah dengan skor PPH konsumsi <90 poin, prevalensi *stunting* >30%, kualitas konsumsi beras berlebih, konsumsi ubi,

kacang-kacangan, sayur dan buah rendah, namun konsumsi pangan hewani sudah baik.

2. 5. Arahan Rencana Aksi Multipihak - Implementasi Pekerjaan (RAM-IP)

RAM-IP (Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan) merupakan sebuah arahan memberi ruang lintas OPD untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan. RAM-IP pernah diterbitkan oleh Kepala Daerah Jawa Barat yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor 500/Kep./66-Org/2014 tentang percepatan capaian target pembangunan. Penentuan RAM-IP dilakukan dengan metode *content analysis* (analisis isi). RAM-IP yang disusun dalam hal ini adalah RAM-IP ketahanan pangan dan gizi.

Penentuan RAM-IP dilakukan untuk memetakan letak kontribusi OPD Jawa Barat dalam masing-masing subsistem ketahanan pangan dan gizi. Selain itu, RAM-IP ketahanan pangan dan gizi juga memuat usulan program yang dapat dijadikan arahan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Jawa Barat. Program yang diusulkan merupakan program yang dihasilkan dari analisis isi terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Dalam rangka memperkuat RAM-IP untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, maka dioverlaykan skor PPH dengan prevalensi *stunting* masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Data skor PPH yang digunakan adalah skor PPH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2017 dengan AKE 2.000 kkal/kap/hari. Sementara itu, data prevalensi *stunting* diperoleh dari Dokumen Penilaian Status Gizi, Kementerian Kesehatan RI tahun 2015-2017. Terdapat empat kondisi hasil perbandingan skor PPH dan prevalensi *stunting* yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6. Kondisi Perbandingan Skor PPH dan Prevalensi *Stunting* di Jawa Barat

Kondisi	Skor PPH	Prevalensi <i>stunting</i>
1	Naik	Turun
2	Naik	Naik
3	Turun	Naik
4	Turun	Turun

Gambaran perbandingan skor PPH dan prevalensi *stunting* disajikan dalam bentuk peta. Gambaran ini selanjutnya dapat dijadikan pedoman maupun latar belakang dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan program dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Jawa Barat.

BAB III. SITUASI PANGAN DAN GIZI JAWA BARAT

Secara geografis Provinsi Jawa Barat terletak pada posisi 104° 48' - 108° 48' Bujur Timur dan 5° 50' - 7° 50' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta
- b. Sebelah Barat : Provinsi Banten dan DKI Jakarta
- c. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Secara administratif, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi kedalam 27 Kabupaten/Kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis,

Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar. Adapun peta administrasi Provinsi Jawa Barat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 8. Peta Administratif Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan daratan yang dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 mdpl, wilayah lereng bukit yang landai di tengah dengan ketinggian 100-1.500 mdpl, wilayah dataran luas di utara dengan ketinggian 0-10 mdpl, dan wilayah aliran sungai. Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah 35.377,76 Km². Wilayah Provinsi Jawa Barat terdiri atas 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa, dengan rincian dalam Tabel 10.

Tabel 7. Banyaknya Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km ²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Bogor	2.710,62	40	19	416
2	Sukabumi	4.145,70	47	5	381
3	Cianjur	3.840,16	32	6	354
4	Bandung	1.767,96	31	10	270
5	Garut	3.074,07	42	21	421
6	Tasikmalaya	2.551,19	39	-	351
7	Ciamis	1.414,71	27	7	258
8	Kuningan	1.110,56	32	15	361
9	Cirebon	984,52	40	12	412
10	Majalengka	1.204,24	26	13	330
11	Sumedang	1.518,33	26	7	270
12	Indramayu	2.040,11	31	8	309
13	Subang	1.893,95	30	8	245
14	Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Karawang	1.652,20	30	12	297
16	Bekasi	122,88	23	7	180
17	Bandung Barat	1.305,77	16	-	165
18	Pangandaran	1.010,00	10	-	93
19	Kota Bogor	118,50	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Km ²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	20,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	16
	Jawa Barat	35.377,76	627	645	5.312

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat dengan luas 4.145,70 Km² (11,72% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Cirebon yaitu seluas 37,36 Km² (0.11% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Barat). Rata-rata curah hujan Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2017 adalah sebesar 191,44 mm³ dengan jumlah hari hujan 236 hari.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 7 menyebutkan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan delapan hal, yang salah satunya adalah pertumbuhan dan sebaran penduduk. Jumlah penduduk Jawa Barat meningkat dari tahun 2014-2017, yaitu secara berturut-turut sebesar 46.029.668 jiwa, 46.709.569 jiwa, 47.379.389 jiwa, 48.037.827 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 2017-2018 sebesar 1,39%. Adapun jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		Jumlah	% Terhadap Penduduk Total	
1	Bogor	5.715.009	11,90	2.108
2	Sukabumi	2.453.498	5,11	592
3	Cianjur	2.256.589	4,70	588
4	Bandung	3.657.601	7,61	2.069
5	Garut	2.588.839	5,39	842
6	Tasikmalaya	1.747.318	3,64	685
7	Ciamis	1.181.981	2,46	835
8	Kuningan	1.068.201	2,22	962
9	Cirebon	2.159.577	4,50	2.194
10	Majalengka	1.193.725	2,48	991
11	Sumedang	1.146.435	2,39	755
12	Indramayu	1.709.994	3,56	838
13	Subang	1.562.509	3,25	825
14	Purwakarta	943.337	1,96	1.142
15	Karawang	2.316.489	4,82	1.402
16	Bekasi	3.500.023	7,29	2.857
17	Bandung Barat	1.666.510	3,47	1.276
18	Pangandaran	395.098	0,82	391
19	Kota Bogor	1.081.009	2,25	9.122
20	Kota Sukabumi	323.788	0,67	6.711
21	Kota Bandung	2.497.938	5,20	14.898

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
		Jumlah	% Terhadap Penduduk Total	
22	Kota Cirebon	313.325	0,65	8.387
23	Kota Bekasi	2.859.630	5,95	13.841
24	Kota Depok	2.254.513	4,69	11.256
25	Kota Cimahi	601.099	1,25	15.307
26	Kota Tasikmalaya	661.404	1,38	3.854
27	Kota Banjar	182.388	0,38	1.607
	Jawa Barat	48.037.827	100	1.358

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor yang dihuni sebanyak 5.715.009 penduduk, sedangkan populasi terkecil adalah Kota Banjar yang memiliki 182.388 penduduk. Tiga wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bekasi. Sementara itu, tiga wilayah yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar. Jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan konsekuensi permintaan akan pangan atau produk pertanian secara luas meningkat pula.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 tahun 2010 tentang klasifikasi perkotaan dan perdesan di Indonesia, perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Sementara itu, perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan. Jumlah desa perkotaan di Jawa Barat adalah sebesar 2.659 (45,2%) dan jumlah desa perdesaannya mencapai 3.221 (54,8%).

Jawa Barat adalah daerah yang rawan bencana. Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Jawa Barat mengalami gempa bumi sebanyak 5 kali, tanah longsor 139 kali, banjir 79 kali, kekeringan 29 kali, kebakaran lahan hutan 12 kali, angin puting beliung sebanyak 119 kali, dan abrasi sebanyak 3 kali. Jumlah korban yang terdampak dan mengungsi dari bencana-bencana tersebut adalah sebesar 2.321.892 jiwa.

Kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu pertumbuhan ekonomi, penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah yang ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. PDRB terdiri dari PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini harga tahun 2010. PDRB atas harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan mengetahui perkembangan laju tiap lapangan usaha dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Adapun PDRB atas harga berlaku penilaiannya didasarkan pada harga tahun berjalan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh sebuah daerah. Jika suatu daerah memiliki angka PDRB besar, berarti sumber daya ekonominya juga banyak (melimpah). PDRB disusun dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lapangan usaha dan

pengeluaran. PDRB menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Barat tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Sektor Lapangan Usaha	Tahun 2017 (miliar rupiah)	
	PDRB atas harga berlaku	PDRB atas harga konstan
Pertanian, kehutanan, dan perikanan	152.939,43	99.669,37
Pertambangan dan penggalian	25.481,69	26.589,93
Industri pengolahan	755.387,26	578.858,48
Pengadaan listrik dan gas	-	5.438,11
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah daur ulang	1.588,06	1.080,96
Konstruksi	147.554,69	111.001,03
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	269.730,85	207.909,71
Transportasi dan pergudangan	103.491,48	64.258,64
Penyedia akomodasi dan makan minum	48.395,13	35.285,42
Informasi dan komunikasi	51.845,07	53.527,16
Jasa keuangan dan asuransi	50.121,39	34.179,94
Real estat	18.659,37	16.109,92
Jasa perusahaan	7.339,11	5.784,33
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	43.309	26.933,35
Jasa pendidikan	51.393,98	37.909,72
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	13.472,97	10.537,79
Jasa lainnya	36.816,02	28.790,56
Total PDRB	1.788.380,61	1.343.864,43

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018

Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar baik pada PDRB atas harga berlaku maupun pada PDRB atas harga konstan. Pada PDRB atas harga berlaku, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 755.387,26 miliar rupiah (42,24%). Sedangkan pada PDRB atas harga konstan, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 578.858,48 miliar rupiah (43,07%). Sektor dengan kontribusi terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Sektor ini menyumbang 15,08% PDRB atas harga berlaku dan 15,47% PDRB atas harga konstan.

Sektor yang memberi kontribusi terbesar ketiga pada PDRB atas harga berlaku adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini berkontribusi sebesar 152.939,43 miliar rupiah atau setara 8,55%. Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi sebesar 99.669,37 miliar rupiah atau 7,42% pada PDRB atas harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor tantangan bagi urusan penyediaan pangan untuk mencapai ketahanan/kemandirian pangan, sekaligus menjadi peluang bagi Bergeraknya roda perekonomian. Penyelenggaraan pangan meliputi hulu hingga hilir, maka potensi sektor industri pengolahan yang besar diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pangan. Selanjutnya untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan mengetahui perkembangan laju tiap lapangan usaha dari tahun ke tahun disajikan data PDRB atas harga konstan menurut pengeluaran.

Tabel 10. PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Jenis Pengeluaran	Tahun (miliar rupiah)		
	2015	2016	2017
1. Konsumsi rumah tangga	759.652,86	800.012,10	836.915,02
Makanan, minuman, dan rokok	269.066,09	287.673,92	305.318,20
Pakaian dan alas kaki	36.497,94	37.948,02	39.179,69
Perumahan, perkakas, peralatan dan penyelenggaraan rumah tangga	93.813,23	97.167,48	99.079,36
Kesehatan dan pendidikan	48.947,61	50.548,67	52.553,05
Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya	213.946,19	226.551,94	236.409,68
Hotel dan restoran	52.051,85	54.628,49	57.448,67
Lainnya	45.329,96	45.493,58	46.926,37
2. Pengeluaran konsumsi LNPRT	7.098,8	7.487,44	7.844,28
3. Pengeluaran konsumsi pemerintah	65.955,83	66.093,15	70.025,43
Konsumsi kolektif	36.475,96	36.480,74	45.030,99
Konsumsi individu	29.479,88	29.612,41	24.994,45
4. Pembentukan modal tetap bruto	299.342,64	313.083,70	332.750,61
Bangunan	226.085,80	237.445,27	254.636,42
Non-bangunan	73.256,84	75.638,43	78.114,19
5. Perubahan inventori	42.887,06	44.598,38	42.304,73
6. Ekspor luar negeri	272.010,78	261.381,27	279.390,01
Barang	268.344,71	257.631,37	275.376,99
Jasa	3.666,06	3.749,89	4.013,02
7. Impor luar negeri	145.837,89	153.437,74	142.827,18
Barang	130.500,82	138.652,90	127.381,17
Jasa	15.337,07	14.784,84	15.446,01
8. Net ekspor antar daerah	-93.877,1	-63.599,04	-82.538,47
Ekspor	151.141,44	174.160,56	214.526,57
Impor	245.019,15	237.759,60	297.065,04

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2016-2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa jenis pengeluaran yang berkontribusi paling besar terhadap PDRB harga konstan adalah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga yakni sebesar 759.652,86 miliar rupiah (50,68%) atau pada tahun 2015. Angka ini terus meningkat menjadi 800.012,10 miliar rupiah (50,55%) pada tahun 2016 dan 836.915,02 miliar rupiah (51,36%) pada 2017. Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 50% terhadap PDRB harga konstan tiap tahunnya dengan kontribusi terbesar adalah konsumsi untuk makanan, minuman, dan rokok. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya konsumsi makanan dan minuman secara tidak langsung akan meningkatkan PDRB wilayah.

PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga perlu didukung dengan ketersediaan lahan pertanian, baik lahan pertanian sawah maupun lahan pertanian non sawah sebagai faktor ketersediaan pangan untuk dikonsumsi. Perubahan luas lahan pertanian sawah dan non sawah Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 14 dan 15 sebagai berikut:

Tabel 11. Perkembangan Luas Lahan Pertanian Sawah Tahun 2013 - 2017

No	Nama Daerah	Luas Lahan Pertanian Sawah (Ha)						Luas KP2B (Ha)
		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata Laju (%)	
1	Kab Bogor	47.687	46.589	46.009	40.712	37.299	-5,86	37.651
2	Kab Sukabumi	64.028	64.066	66.772	66.579	66.516	0,97	64.077
3	Kab Cianjur	66.283	66.431	65.782	65.256	66.934	0,25	53.894
4	Kab Bandung	35.682	35.682	35.543	34.437	33.824	-1,32	39.423
5	Kab Garut	48.541	48.300	48.152	47.947	48.057	-0,25	44.028
6	Kab Tasikmalaya	51.329	51.188	51.072	50.972	49.530	-0,88	57.742
7	Kab Ciamis	51.813	35.474	35.518	35.498	35.576	-7,81	34.506
8	Kab Kuningan	28.716	28.646	28.605	27.942	25.890	-2,51	30.243
9	Kab Cirebon	55.112	53.368	53.295	48.571	47.067	-3,82	43.768
10	Kab Majalengka	50.962	50.334	50.035	50.459	50.359	-0,29	34.292
11	Kab Sumedang	33.178	33.143	30.617	31.308	31.416	-1,28	30.069
12	Kab Indramayu	116.805	117.792	115.897	115.833	116.099	-0,15	92.185
13	Kab Subang	84.928	84.570	84.570	84.364	84.570	-0,11	67.909
14	Kab Purwakarta	17.653	17.580	17.792	18.082	18.093	0,62	12.891
15	Kab Karawang	98.164	97.577	96.482	95.876	95.506	-0,68	87.255
16	Kab Bekasi	52.582	51.961	51.800	49.405	48.382	-2,05	33.008
17	Kab Bandung Barat	21.733	21.693	21.735	21.542	21.569	-0,19	10.038
18	Kab Pangandaran	-	18.187	16.426	16.481	16.564	0,42	20.160
19	Kota Bogor	750	750	321	321	320,7	-14,32	60,10
20	Kota Sukabumi	1.551	1540	1.486	1.464	1.395	-2,60	491,87
21	Kota Bandung	1.129	988	736	712	613	-13,79	100,00
22	Kota Cirebon	261	260	267	267	201	-5,57	9,43

No	Nama Daerah	Luas Lahan Pertanian Sawah (Ha)					Rerata Laju (%)	Luas KP2B (Ha)
		2013	2014	2015	2016	2017		
23	Kota Bekasi	491	475	500	464	454	-1,84	0,17
24	Kota Depok	362	348	237	123	109	-23,81	0,00
25	Kota Cimahi	296	276	137	143	136	-14,41	15,35
26	Kota Tasikmalaya	5.999	5.993	5.990	5.904	12.024	25,52	855,38
27	Kota Banjar	3.318	3318	3.318	3.313	3.311	-0,05	1.646,09
Jawa Barat		939,353	936.529	929.094	913.976	911.817	-0,74	796.316

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2014-2018

Luas lahan pertanian sawah dan non sawah berkurang dari tahun 2013 – 2017. Laju rata-rata luas pertanian sawah menunjukkan luas lahan pertanian sawah berkurang sebesar 0,74% dari tahun ke tahun. Kota Depok merupakan daerah dengan rata-rata laju penurunan luas lahan pertanian sawah terbesar, yaitu sebesar 23,81%. Kota Tasikmalaya merupakan daerah dengan rata-rata laju pertumbuhan luas lahan pertanian sawah terbesar yaitu sebesar 25,52%.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) hasil *overlay* peta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan revisi peta pola ruang Jawa Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Nasional. Tabel 14 menunjukkan bahwa masing-masing wilayah memiliki luasan KP2B masing-masing. KP2B terluas berada pada Kabupaten Indramayu, yakni seluas 92.185 Ha. Wilayah kota cenderung memiliki KP2B lebih rendah dibanding wilayah kabupaten, hal ini karena pengembangan wilayah perkotaan tidak terfokus pada sektor pertanian, melainkan lebih ke sektor industri pengolahan. Luasan KP2B yang suda ada, diharapkan dapat dipertahankan oleh Kabupaten/Kota untuk tidak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Luasan ini akan menjadi potensi daya dukung pangan di masa depan. Selanjutnya perkembangan luas lahan pertanian non sawah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut.

Tabel 12. Perkembangan Luas Lahan Pertanian Non Sawah Tahun 2013-2017

No	Nama Daerah	Luas Lahan Pertanian Non Sawah (Ha)					Rerata Laju (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kab Bogor	122.780	127.369	139.327	65.030	64.361	-10,31
2	Kab Sukabumi	282.461	258.629	262.159	127.076	124.849	-15,09
3	Kab Cianjur	171.470	181.298	200.027	93.236	92.023	-9,66
4	Kab Bandung	73.690	114.424	113.513	36.765	36.464	-3,49
5	Kab Garut	153.845	200.007	205.601	103.051	107.033	-3,30
6	Kab Tasikmalaya	202.424	194.083	190.450	69.981	69.514	-17,48
7	Kab Ciamis	121.826	143.198	72.604	44.197	44.060	-17,80
8	Kab Kuningan	43.616	65.136	61.945	26.546	27.107	-2,65
9	Kab Cirebon	15.882	16.771	16.272	7.444	7.444	-12,91
10	Kab Majalengka	35.205	48.573	33.016	24.124	24.760	-4,59
11	Kab Sumedang	72.477	84.338	75.966	39.914	38.030	-11,43
12	Kab Indramayu	56.249	55.611	57.991	19.162	22.072	-12,16
13	Kab Subang	74.308	86.188	80.176	24.177	24.747	-14,62
14	Kab Purwakarta	39.430	56.361	55.835	15.555	14.174	-9,75
15	Kab Karawang	38.877	33.853	39.402	11.584	11.229	-17,55
16	Kab Bekasi	34.661	33.127	41.790	16.363	8.434	-21,89
17	Kab Bandung Barat	94.234	73.559	71.073	32.730	32.629	-19,89
18	Kab Pangandaran	0	0	58.564	26.595	25.058	-30,18
19	Kota Bogor	2.372	2.476	1.795	986	1.523	-3,43
20	Kota Sukabumi	392	734	451	194	200	-1,30
21	Kota Bandung	963	955	861	398	396	-16,24
22	Kota Cirebon	757	788	777	330	323	-14,24

No	Nama Daerah	Luas Lahan Pertanian Non Sawah (Ha)					Rerata Laju (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
23	Kota Bekasi	4.354	4.248	4.399	4.285	4,257	-0,53
24	Kota Depok	3.214	2.683	2.402	2.013	1,897	-12,24
25	Kota Cimahi	326	326	288	300	279	-3,62
26	Kota Tasikmalaya	6.001	6.435	6.144	3.606	3.566	-9,93
27	Kota Banjar	5.238	5.212	5.212	3.071	3.071	-10,39
Jawa Barat		1,652,111	1.796.400	1.798.040	798.713	789.500	-11,98

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2014-2018

Laju rata-rata luas pertanian non sawah menunjukkan lahan pertanian non sawah berkurang sebesar 11,98%. Kota Bogor merupakan daerah dengan rata-rata laju penurunan luas lahan pertanian non sawah terbesar sebesar 12,76%. Kota sukabumi merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan luas lahan pertanian non sawah sebesar 2,25% (Bappeda Jawa Barat 2015). Lahan pertanian merupakan faktor produksi utama untuk mencapai kemandirian pangan. Kemandirian pangan diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan PDRB sektor pangan dalam negeri sehingga kesejahteraan penduduk diharapkan kian membaik pula. Selain PDRB, disediakan pula data *overlay* PDRB per kapita atas harga berlaku, inflasi, IHK (Indeks Harga Konsumen), dan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat pada tabel berikut.

3. 1. Situasi Kemandirian Pangan

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Pada analisis kemandirian pangan Provinsi Jawa Barat, komponen pengadaan yang digunakan hanya produksi pangan tahun 2017, adapun komponen cadangan pangan, impor dan ekspor pangan diabaikan. Situasi kemandirian pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 13. Situasi Kemandirian Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No	Nama Daerah	Situasi Kemandirian		
		%AKE	%AKP	Skor PPH
1	Kab Bogor	42,1	61,2	46,2
2	Kab Sukabumi	131,0	116,8	71,5
3	Kab Cianjur	130,1	140,5	78,3
4	Kab Bandung	67,6	68,6	52,7
5	Kab Garut	232,0	209,7	74,5
6	Kab Tasikmalaya	165,5	185,2	60,2
7	Kab Ciamis	105,8	132,5	54,5
8	Kab Kuningan	120,2	115,6	45,5
9	Kab Cirebon	59,2	70,3	40,1
10	Kab Majalengka	225,2	217,1	70,8
11	Kab Sumedang	165,5	149,1	62,7
12	Kab Indramayu	208,2	241,8	55,5
13	Kab Subang	222,9	216,2	74,5
14	Kab Purwakarta	174,2	183,4	84,6
15	Kab Karawang	141,9	243,2	74
16	Kab Bekasi	40,8	43,4	24,6
17	Kab Bandung Barat	129,1	123,5	47,4
18	Kab Pangandaran	114,1	108,2	32,9
19	Kota Bogor	5,0	7,3	7,0
20	Kota Sukabumi	21,6	30,2	18,2
21	Kota Bandung	2,7	5,7	3,4
22	Kota Cirebon	2,8	3,7	5,1
23	Kota Bekasi	5,3	9,0	5,7
24	Kota Depok	2,8	7,8	5,1
25	Kota Cimahi	1,5	6,5	2,6
26	Kota Tasikmalaya	36,4	62,5	29,1

No	Nama Daerah	Situasi Kemandirian		
		%AKE	%AKP	Skor PPH
27	Kota Banjar	69,4	112,9	69,7
	Jawa Barat	91,4	109,0	73,7

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018, diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemandirian pangan di Provinsi Jawa Barat setara dengan 91,4% AKE dan 109,0% AKP. Dengan demikian, tingkat kemandirian pangan Provinsi Jawa Barat tergolong mandiri pangan ($90\% < AKE < 110\%$). Namun, produksi pangan Provinsi Jawa Barat tergolong belum beragam, hal ini terlihat dari skor PPH di Provinsi Jawa Barat sebesar 73,7 poin. Skor PPH tersebut masih kurang dari skor PPH ideal yaitu 100. Sementara itu, wilayah di Jawa Barat yang tergolong surplus pangan ($AKE > 100\%$) diantaranya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Pangandaran. Seluruh wilayah kota di Jawa Barat masih tergolong defisit ($AKE < 90\%$). Meskipun begitu, produksi pangan di Provinsi Jawa Barat tergolong belum beragam, karena Skor PPH nya belum mencapai skor 100 poin. Adapun wilayah dengan skor PPH tertinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Purwakarta dan wilayah dengan skor PPH terendah adalah Kota Cimahi. Kemandirian pangan suatu wilayah dipengaruhi oleh daya dukung pangan dan daya dukung air sebagai faktor produksi.

Daya dukung pangan merupakan kemampuan wilayah dalam memproduksi beraneka ragam pangan, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup sampai di tingkat perseorangan. Analisis daya dukung pangan dilakukan pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terhadap komoditas beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, dan minyak sawit. Daerah yang terkategori surplus menunjukkan produksi bersih lebih tinggi daripada konsumsi aktual penduduknya sehingga memiliki daya dukung pangan yang baik. Daerah defisit menunjukkan produksi bersih lebih rendah daripada konsumsi aktual penduduknya sehingga memiliki daya dukung pangan yang kurang memadai. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah defisit diperlukan impor pangan dari daerah surplus. Tabel 18 di bawah ini menampilkan jenis pangan yang tergolong surplus dan defisit di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Adapun perhitungan detail disajikan pada Lampiran.

Tabel 14. Daya Dukung Pangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

No	Wilayah	Jenis Pangan Surplus	Jenis Pangan Defisit
Kabupaten			
1	Bogor	ubi kayu, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, susu, ikan	beras, jagung, ubi jalar, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, telur, minyak sawit
2	Sukabumi	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, buah-buahan, sayuran, daging unggas, telur, susu, minyak sawit	gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, daging ruminansia, ikan
3	Cianjur	beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, susu, ikan	ubi jalar, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, telur, minyak sawit
4	Bandung	beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah, sayuran, susu	ubi jalar, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, daging ruminansia, daging unggas, telur, ikan, minyak sawit
5	Garut	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula merah, kacang tanah, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, susu, ikan	gula pasir, kacang kedelai, kelapa, daging unggas, telur, minyak sawit
6	Tasikmalaya	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula merah, kacang tanah, daging ruminansia, daging unggas, susu, ikan	gula pasir, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, telur, minyak sawit
7	Ciamis	beras, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kelapa, daging unggas, ikan	ubi jalar, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, telur, susu, minyak sawit
8	Kuningan	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, daging ruminansia, daging unggas, susu, ikan	gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, telur, minyak sawit

No	Wilayah	Jenis Pangan Surplus	Jenis Pangan Defisit
9	Cirebon	beras, jagung, daging ruminansia, daging unggas, ikan	ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, telur, susu, minyak sawit
10	Majalengka	beras, jagung, ubi jalar, kacang tanah, buah-buahan, sayuran, daging unggas, ikan	ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, daging ruminansia, telur, susu, minyak sawit
11	Sumedang	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, buah-buahan, daging unggas, susu	gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, sayuran, daging ruminansia, telur, ikan, minyak sawit
12	Indramayu	beras, jagung, ikan	ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, minyak sawit
13	Subang	beras, jagung, kacang tanah, buah-buahan, daging unggas, ikan	ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, sayuran, daging ruminansia, telur, susu, minyak sawit
14	Purwakarta	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas	gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, telur, susu, ikan, minyak sawit
15	Karawang	beras, jagung, sayuran, daging unggas, ikan	ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, daging ruminansia, telur, minyak sawit
16	Bekasi	-	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit

No	Wilayah	Jenis Pangan Surplus	Jenis Pangan Defisit
17	Bandung Barat	beras, jagung, kacang tanah, sayuran, daging ruminansia, susu	ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, daging unggas, telur, ikan, minyak sawit
18	Pangandaran	beras, jagung, kacang tanah, kelapa	ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
kota			
19	Bogor	jagung, ubi jalar, daging ruminansia	beras, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
20	Sukabumi	daging ruminansia	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
21	Bandung	-	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
22	Cirebon	-	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
23	Bekasi	jagung	beras, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-

No	Wilayah	Jenis Pangan Surplus	Jenis Pangan Defisit
			buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
24	Depok	-	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
25	Cimahi	-	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, telur, susu, ikan, minyak sawit
26	Tasikmalaya	daging unggas, ikan	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang tanah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, telur, susu, minyak sawit
27	Banjar	beras, jagung, ubi jalar, kacang tanah, kelapa, buah-buahan, sayuran, daging ruminansia, daging unggas, ikan	ubi kayu, gula pasir, gula merah, kacang kedelai, telur, susu, minyak sawit
	Jawa Barat	beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, sayuran, daging unggas, susu, ikan	gula pasir, gula merah, kacang kedelai, kelapa, buah-buahan, daging ruminansia, telur, minyak sawit

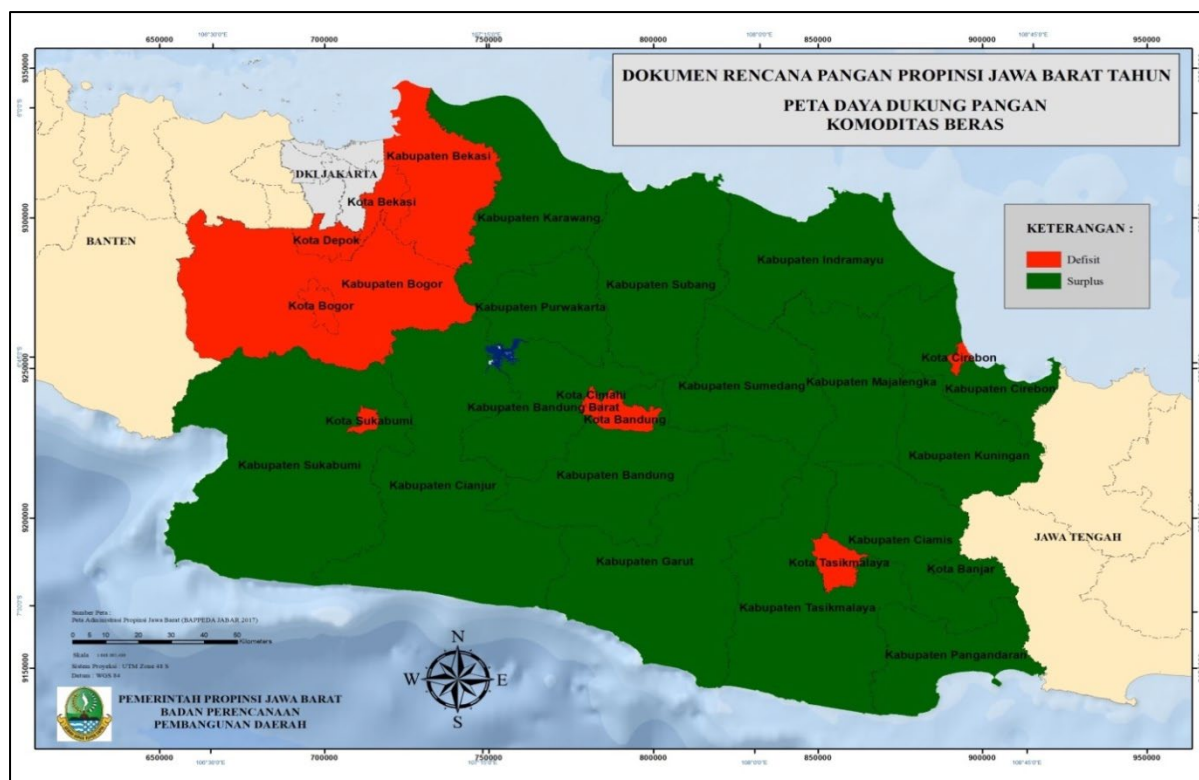
Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan daerah surplus beras. Berdasarkan data produksi survei ubinan 2017, surplus beras di Jawa Barat mencapai angka 2.161.454,75 ton. Sementara itu, berdasarkan data kerangka sampel area tahun 2018, surplus beras di Jawa Barat hanya mencapai 917.501,90 ton. Pada tahun 2017, daerah dengan surplus beras tertinggi berada di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Majalengka. Daerah defisit beras tertinggi berada di Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kota Bekasi.

Tingginya defisit beras pada 3 wilayah tersebut disebabkan tingginya pula jumlah penduduk sehingga menyebabkan permintaan beras juga tinggi. Berdasarkan Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arahan Komoditas Pertanian yang diterbitkan oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian 2017, diketahui lahan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat sesuai untuk ditanami padi.

Beras merupakan jenis pangan yang dapat dikembangkan di sektor pertanian, sektor agribisnis, dan sektor agroindustri. Beras juga ditetapkan menjadi barang kebutuhan pokok, sedangkan benih padi ditetapkan menjadi barang penting berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi sedangkan barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan Nasional. Selain dikonsumsi secara langsung, rumah tangga mengonsumsi makanan yang dibuat dari bahan baku beras secara tidak langsung, yaitu melalui industri pangan. Industri pengolahan menghasilkan *output* dalam bentuk setengah jadi dan bentuk olahan. Industri pengolahan yang menggunakan *input* beras antara lain industri penggilingan dan pembersihan padi-padian dan biji-bijian, industri penggilingan padi dan penyisihan beras, industri penggilingan padi, dan industri penggilingan tepung beras.

Terdapat 17 wilayah di Provinsi Jawa Barat yang tergolong surplus beras, termasuk total di Provinsi Jawa Barat. Ke tujuh belas wilayah itu terdiri dari 1 Kota yaitu Banjar dan 16 Kabupaten yaitu Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bandung Barat dan Pangandaran. Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang termasuk dalam WP Purwasuka yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, sehingga surplus beras yang dimiliki wilayah ini dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu termasuk dalam WP Ciayumajakuning yang tidak memiliki sektor pertanian di potensi pengembangannya, sehingga surplus beras di wilayah ini dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri.

Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar termasuk ke dalam WP Priangan Timur. Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur termasuk ke dalam WP Sukabumi. Sementara itu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Ketiga WP ini merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, sehingga surplus beras yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Peta daya dukung beras di Provinsi Jawa Barat disajikan pada Gambar 10 sebagai berikut.



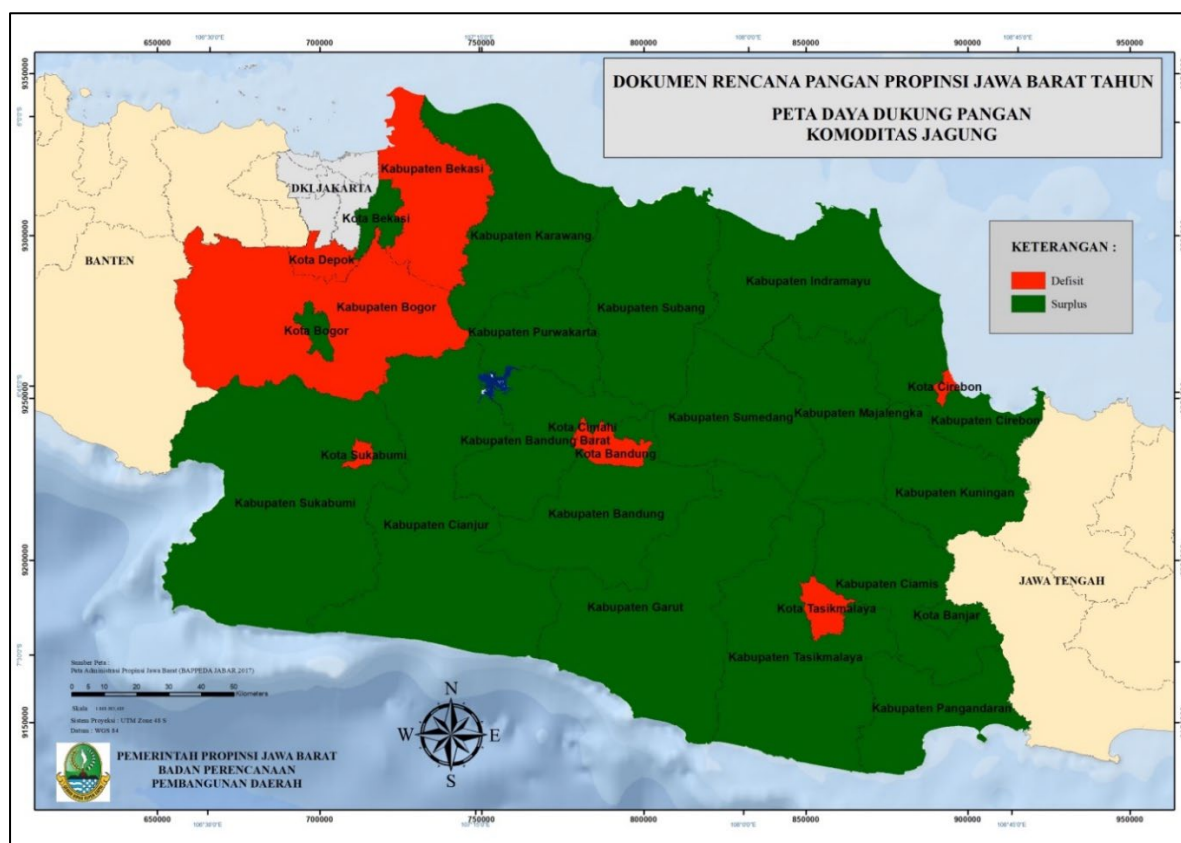
Gambar 5. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Beras

Jenis komoditas selanjutnya adalah jagung. Selain untuk keperluan pangan, jagung juga digunakan untuk bahan baku industri pakan ternak, maupun ekspor. Teknologi produksi jagung sudah banyak dihasilkan oleh lembaga penelitian dan pengkajian lingkup Badan Litbang Pertanian maupun Perguruan Tinggi, namun belum banyak diterapkan di lapangan. Tanaman jagung dapat dibudidayakan di dataran rendah maupun dataran tinggi, pada lahan sawah atau tegalan. Jagung menghendaki tanah yang subur untuk dapat berproduksi dengan baik. Hal ini dikarenakan tanaman jagung membutuhkan unsur hara terutama nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) dalam jumlah yang banyak. Tanaman jagung membutuhkan air sekitar 100-140 mm/bulan. Oleh karena itu waktu penanaman harus memperhatikan curah hujan dan penyebarannya.

Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah dengan surplus jagung, yaitu sebesar 1.253.722,88 ton pada tahun 2017. Berdasarkan Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arah Komoditas Pertanian yang diterbitkan oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian 2017, diketahui lahan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat sesuai untuk ditanami jagung. Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat terdapat data produksi jagung dengan jumlah yang bervariasi tergantung sumber daya di masing-masing wilayah kecuali di Kabupaten Tasikmalaya. Daerah surplus jagung tertinggi yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Bandung. Daerah defisit jagung tertinggi berada di Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kabupaten Bekasi.

Jagung merupakan jenis pangan yang dapat dikembangkan di sektor pertanian, sektor agribisnis, dan sektor agroindustri. Terdapat 19 wilayah di Jawa Barat yang tergolong surplus jagung, diantaranya Kota Bogor dan Kota Bekasi yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Subang,

Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar yang termasuk WP Priangan Timur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur yang termasuk WP Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat yang termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.



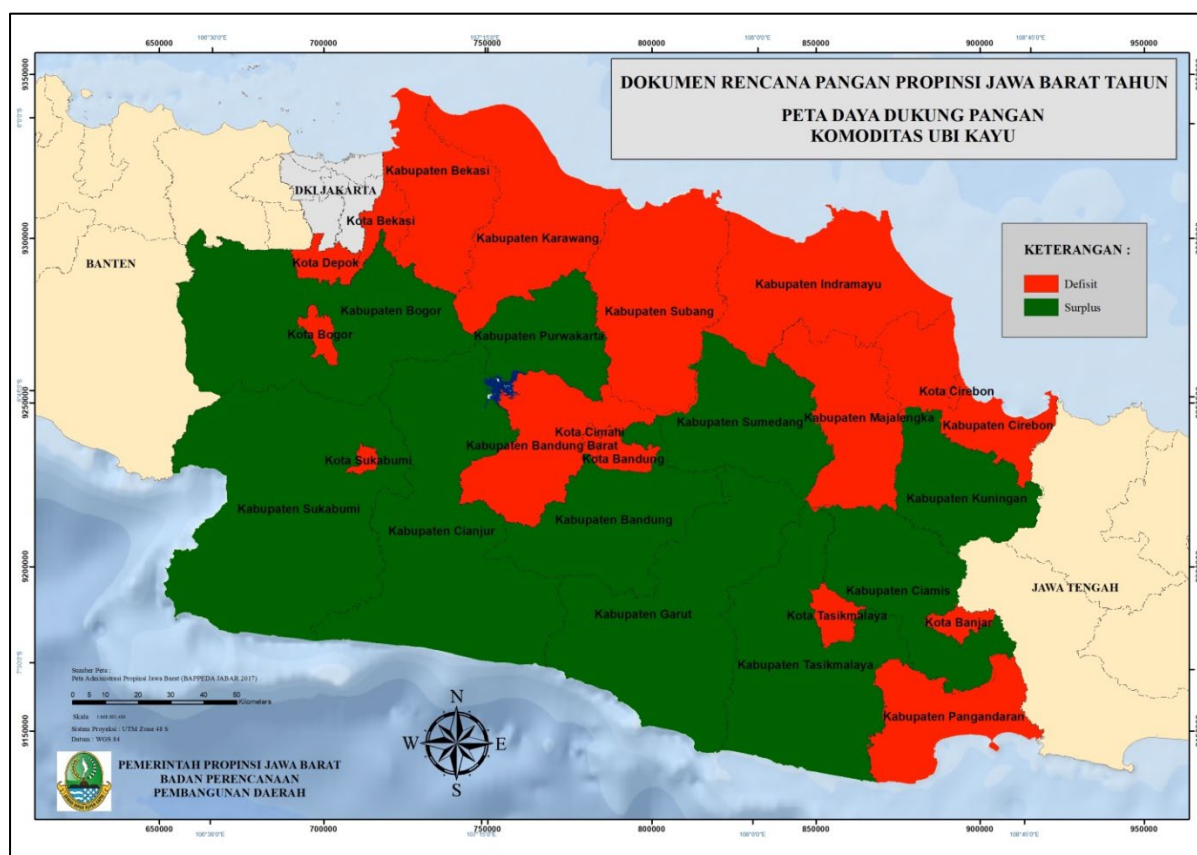
Gambar 6. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Jagung

WP Purwasuka, WP Priangan Timur, WP Sukabumi, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, sehingga surplus jagung yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Bodebekpunjur dan WP Ciayumajakuning merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor pertanian di potensi pengembangannya, sehingga surplus jagung di wilayah ini dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri.

Selanjutnya, ubi kayu merupakan umbi-umbian dengan produksi tinggi di Jawa Barat. Ubi kayu mudah ditemui baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan dengan harga terjangkau yaitu antara Rp. 3.500,00 – Rp. 5.500,00/kg di tingkat pengecer. Surplus ubi kayu mencapai 1.275.803,17 ton pada tahun 2017. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi produk *intermediate* maupun akhir yang dapat mensubstitusi tepung terigu.

Salah satu produk *intermediate* ubi kayu dikenal sebagai tepung mocaf (*Modified Cassava Flour*). Teknologi pengolahan tepung mocaf relatif sederhana dan mudah diadopsi oleh masyarakat. Tepung mocaf pun dapat dijadikan bahan baku berbagai olahan seperti beras analog, mie, cake, cookies, kerupuk, maupun aneka kue tradisional dan modern lainnya. Daerah surplus ubi kayu yang dapat menjadi sentra pengolahan tepung mocaf yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Sumedang.

Ubi kayu merupakan jenis pangan yang dapat dikembangkan di sektor pertanian, sektor agribisnis, sektor industri pengolahan dan sektor agroindustri. Terdapat 10 wilayah di Jawa Barat yang tergolong surplus ubi kayu, diantaranya Kabupaten Bogor yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Purwakarta yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Kuningan yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis yang termasuk dalam WP Priangan Timur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam WP Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.



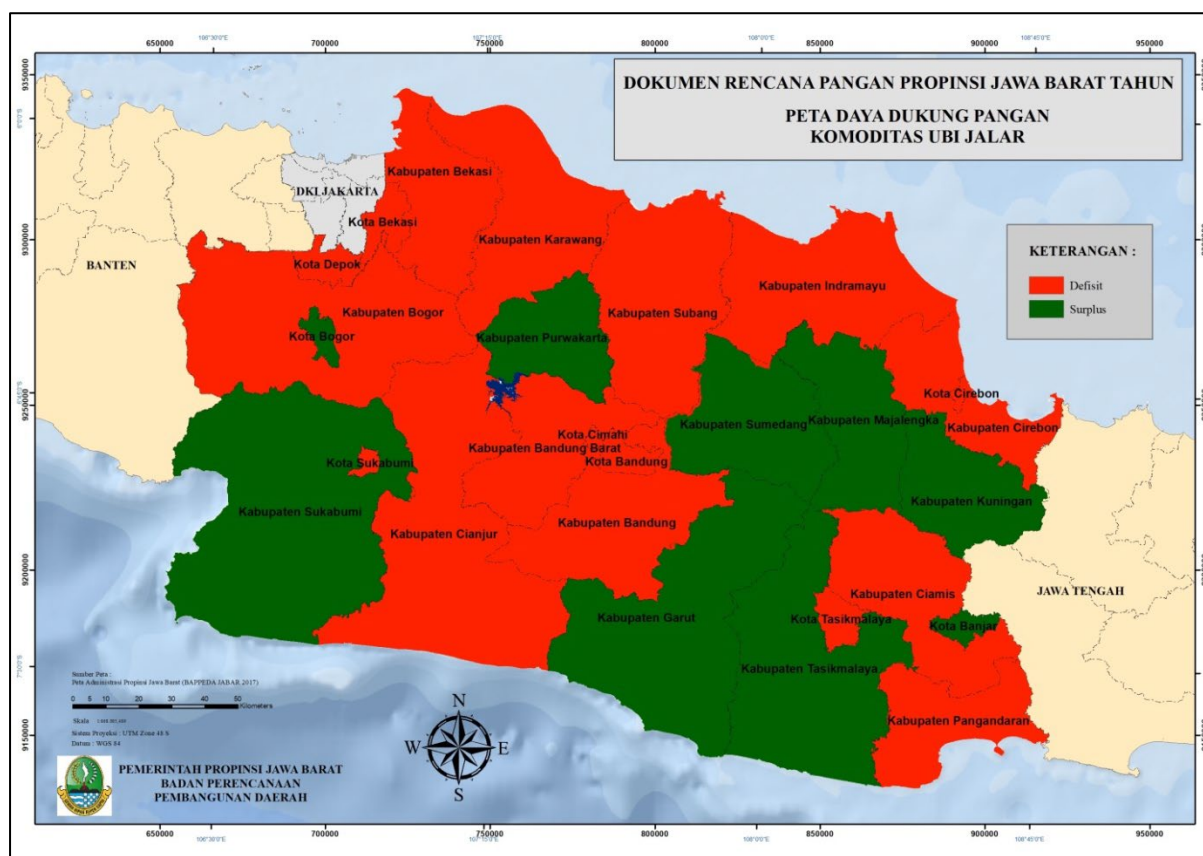
Gambar 7. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Ubi Kayu

WP Purwasuka, WP Priangan Timur, WP Sukabumi, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, sehingga surplus ubi kayu yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Bodebekpunjur dan WP

Ciayumajakuning merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor pertanian di potensi pengembangannya, sehingga surplus ubi kayu di wilayah ini dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri.

Ubi jalar (*Ipomoea batatas* L) merupakan komoditas sumber karbohidrat utama setelah padi, jagung, dan ubi kayu. Ubi jalar mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Ubi jalar merupakan komoditas pangan yang bernilai surplus di Jawa Barat meskipun jumlahnya tidak sebesar padi, jagung, dan ubi kayu. Jumlah surplus ubi jalar pada tahun 2017 adalah 326.919,17 ton. Daerah dengan surplus ubi jalar tertinggi yaitu Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Garut sedangkan daerah dengan defisit ubi jalar tertinggi yaitu Kabupaten Bogor.

Terdapat 9 (sembilan) wilayah di Provinsi Jawa Barat yang tergolong surplus ubi jalar, diantaranya Kota Bogor yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Purwakarta yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur, Kabupaten Sukabumi yang termasuk dalam WP Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.



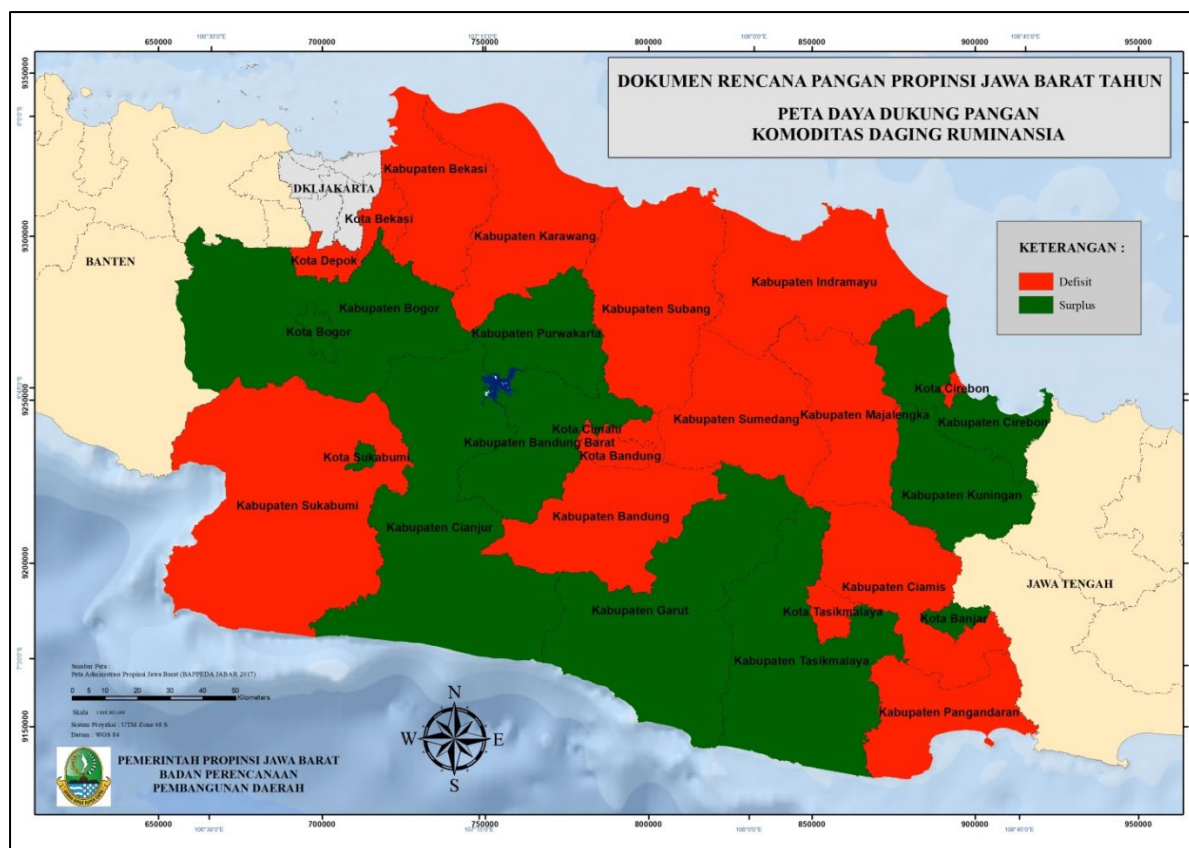
Gambar 8. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Ubi Jalar

Ubi jalar merupakan komoditas pangan yang dapat dikembangkan dalam sektor pertanian, industri pengolahan, agribisnis, dan agroindustri. WP Purwasuka, WP Priangan Timur, WP Sukabumi, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, sehingga surplus ubi jalar yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Bodebekpunjur dan WP Ciayumajakuning merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor pertanian di potensi pengembangannya, sehingga surplus ubi jalar di wilayah ini dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri.

Berikutnya adalah komoditas sumber protein hewani. Ternak ruminansia adalah hewan ternak yang pada sistem pencernaannya mempunyai alat pencernaan yang berbentuk rumen (perut besar). Ternak ruminansia adalah hewan memamah biak (mamalia) berkuku genap seperti sapi, kerbau, domba, kambing, rusa, dan kijang. Ternak ruminansia menjadi salah satu sumber utama protein hewani. Jawa Barat mengalami defisit daging ruminansia dengan capaian angka sebesar -13.674,68 ton pada tahun 2017. Defisit daging ruminansia tertinggi berada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung, sedangkan defisit terendah berada di Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Depok.

Ruminansia merupakan ternak masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia, karena hewan ini yang mampu dengan baik memanfaatkan bahan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hijauan seperti rumput atau limbah pertanian yang tidak dimakan oleh manusia dapat dikonversikan ke dalam makanan bernilai gizi tinggi yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pakan merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk mendapatkan daging ruminansia yang baik dan sehat. Berdasarkan Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arah Komoditas Pertanian yang diterbitkan oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian 2017, diketahui lahan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat selain lahan Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Cimahi sesuai untuk ditanami tumbuhan pakan ternak, sehingga kebutuhan pakan ternak Jawa Barat dapat dipenuhi dengan mengoptimalkan kesesuaian lahan yang ada.

Di sisi lain, terdapat 11 wilayah di Jawa Barat yang tergolong surplus daging ruminansia. Ke sebelas wilayah tersebut terbagi ke dalam enam wilayah pengembangan Jawa Barat, diantaranya Kabupaten Bogor dan Kota Bogor yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Purwakarta yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi yang termasuk dalam WP Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.



Gambar 9. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Daging Ruminansia

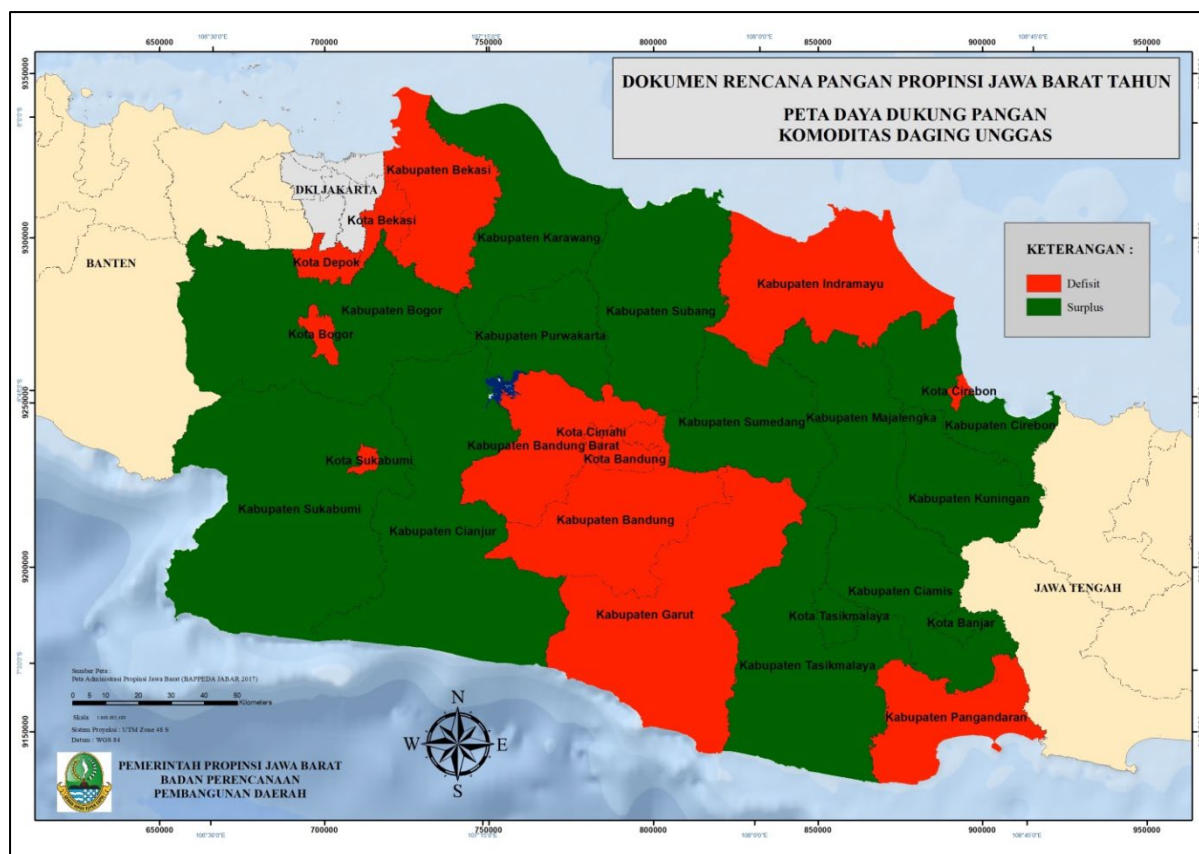
WP Purwasuka dan WP Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor peternakan, sehingga surplus daging ruminansia yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Bodebekpunjur, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor peternakan di potensi pengembangannya, sehingga surplus daging ruminansia di WP Priangan Timur dapat dikembangkan ke dalam sektor industri pengolahan.

Namun di sisi lain, peningkatan produksi daging ruminansia juga ikut menyumbang pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. Hal tersebut terkait dengan sektor peternakan menjadi salah satu penyumbang gas efek rumah kaca. Darbandi dan Saghaian (2018) menyebutkan bahwa sektor peternakan menyumbang sekitar 22% dari total emisi global. Daging sapi dan susu adalah sumber utama emisi gas rumah kaca di antara produk ternak lainnya. Gerber *et al.* (2013) menyebutkan bahwa daging ruminansia menyumbang sekitar 35,3% emisi gas rumah kaca dari total emisi yang dikeluarkan oleh ternak. Produksi ternak berkontribusi terhadap deforestasi dan karbon dioksida (CO₂) baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peningkatan produksi ternak ruminansia tidak menjadi prioritas. Pemenuhan pangan sumber protein hewani dapat menggunakan alternatif daging unggas, telur, maupun ikan.

Selain daging ruminansia, jenis daging lain yang sering dikonsumsi adalah daging unggas. Daging unggas merupakan sumber protein hewani yang baik, karena mengandung asam amino esensial yang lengkap dan dalam jumlah perbandingan yang seimbang. Selain itu, daging unggas lebih diminati oleh konsumen karena mudah dicerna, dapat diterima oleh mayoritas orang (Yashoda *et al.* 2001) dan memiliki harga yang relatif murah (Cohen *et al.* 2007). Daging unggas adalah komoditas pangan yang bernilai surplus di Jawa Barat. Surplus daging unggas mencapai 327.142,92 ton pada tahun 2017. Surplus daging unggas tertinggi berada pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Karawang, tiga wilayah ini dapat menjadi sentra pemasok daging unggas utama untuk memenuhi kebutuhan daging yang masih defisit di 13 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

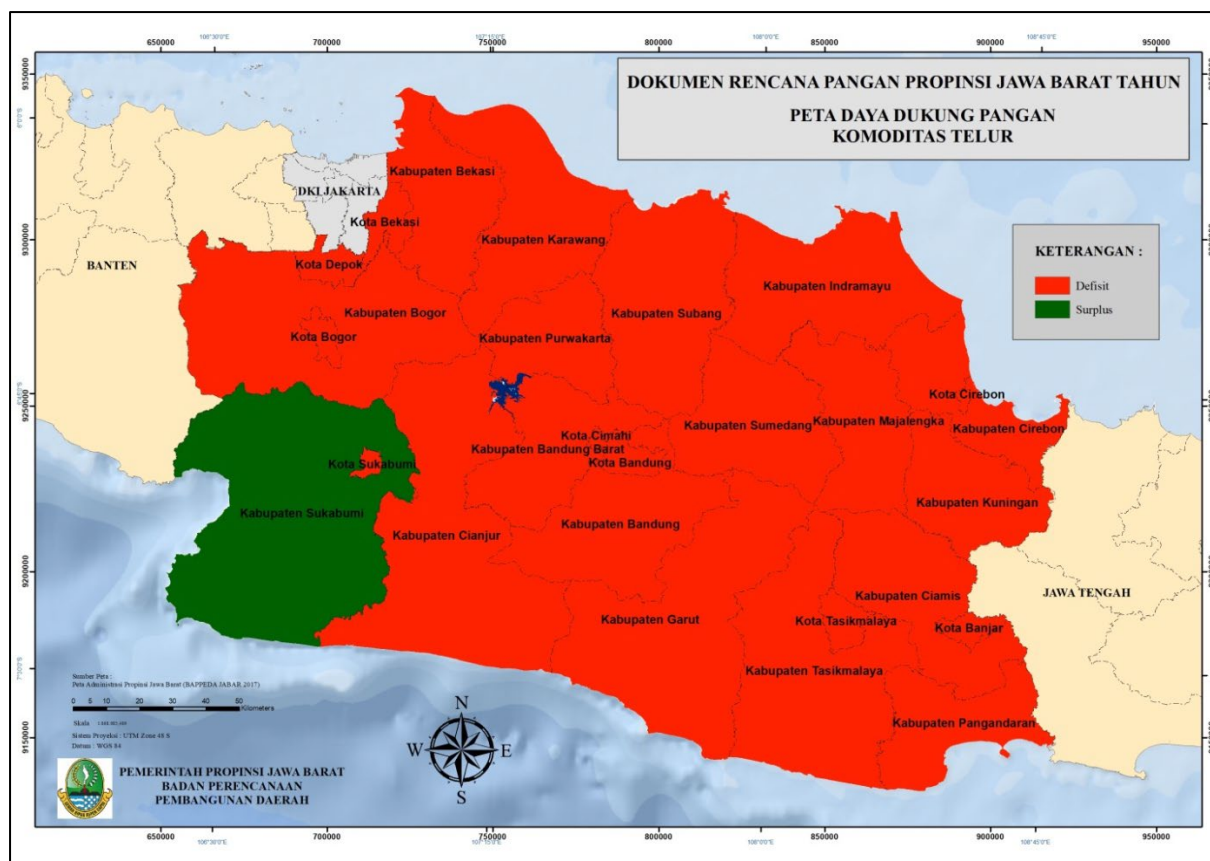
Terdapat 14 wilayah di Jawa Barat yang tergolong surplus unggas. Keempat belas wilayah tersebut terbagi ke dalam enam wilayah pengembangan Jawa Barat, diantaranya Kabupaten Bogor yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam WP Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.

WP Purwasuka dan WP Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor peternakan, sehingga surplus daging unggas yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Bodebekpunjur, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor peternakan di potensi pengembangannya, sehingga surplus daging unggas di WP Priangan Timur dapat dikembangkan ke dalam sektor industri pengolahan.



Gambar 10. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Daging Unggas

Salah satu sumber protein selain daging ruminansia dan daging unggas adalah telur. Jawa Barat merupakan daerah yang mengalami defisit telur sebesar -220.391,57 ton pada tahun 2017. Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami defisit telur, kecuali Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung menjadi tiga daerah dengan defisit telur terbesar di Jawa Barat. Sementara itu, defisit telur terendah berada di Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, dan Kota Cirebon. Adapun Kabupaten Sukabumi menjadi satu-satunya daerah di Jawa Barat yang mengalami surplus telur sebanyak 6.231,51 ton pada tahun 2017. Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang termasuk ke dalam WP Sukabumi yang memiliki potensi pengembangan di sektor peternakan dan industri pengolahan, sehingga surplus telur di wilayah ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung potensi pengembangan Kabupaten Sukabumi.



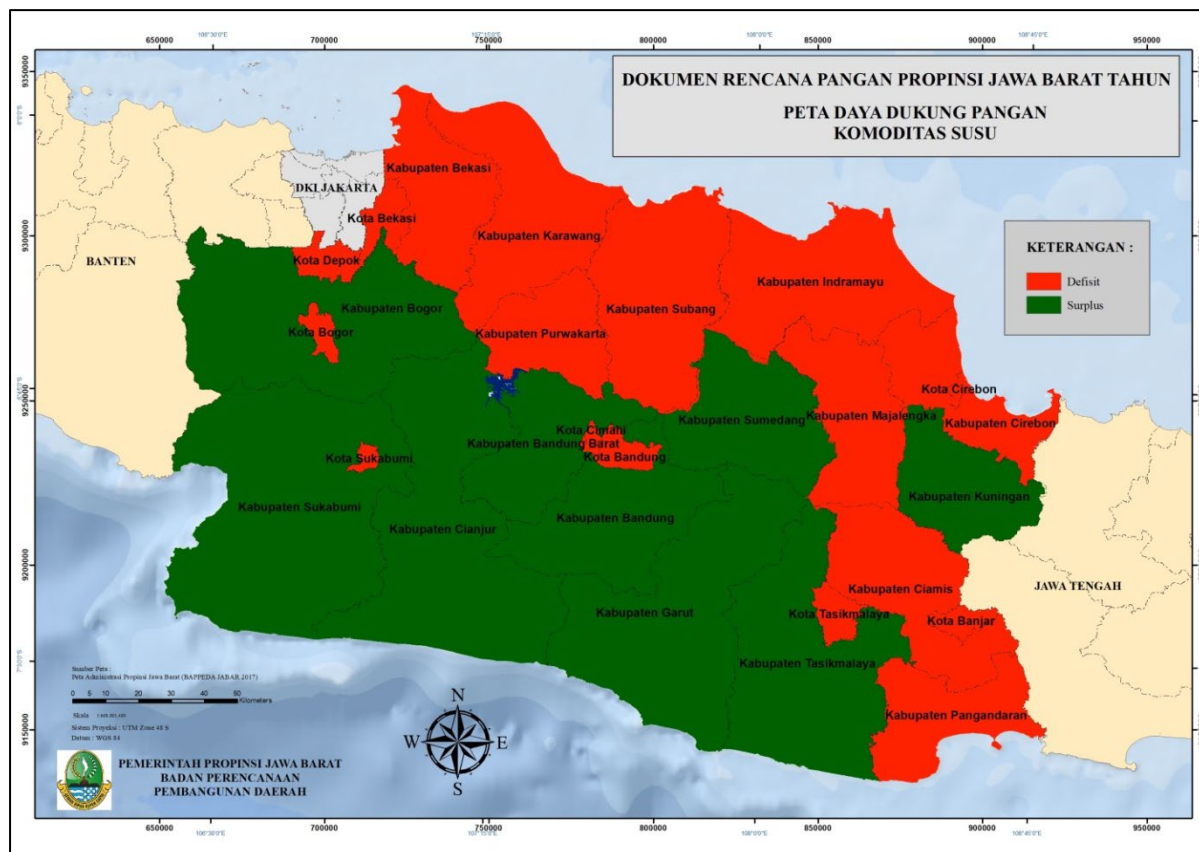
Gambar 11. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Telur

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah surplus susu sebanyak 183.110,63 ton pada tahun 2017. Sembilan dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami surplus susu, sedangkan lainnya defisit. Daerah Bandung Barat mengalami surplus susu terbesar dengan total 116.460,46 ton pada tahun 2017. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah penghasil susu terbesar di Jawa Barat, hal tersebut tercermin dari jumlah populasi sapi perah di Kabupaten Bandung Barat yang mencapai 26.382 ekor pada tahun 2013 atau 25,41% dari total populasi sapi perah yang ada di Provinsi Jawa Barat (Dinas Peternakan Jawa Barat 2014). Kabupaten Bandung Barat merupakan dataran tinggi dan memiliki lahan pertanian yang luas sehingga mendukung keberadaan usaha peternakan sapi perah. Kabupaten Bandung Barat dapat dijadikan sentra pemasok susu untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Barat.

Sembilan wilayah lainnya yang tergolong surplus susu di Jawa Barat diantaranya Kabupaten Bogor yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Kuningan yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk dalam WP Priangan Timur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam WP Sukabumi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.

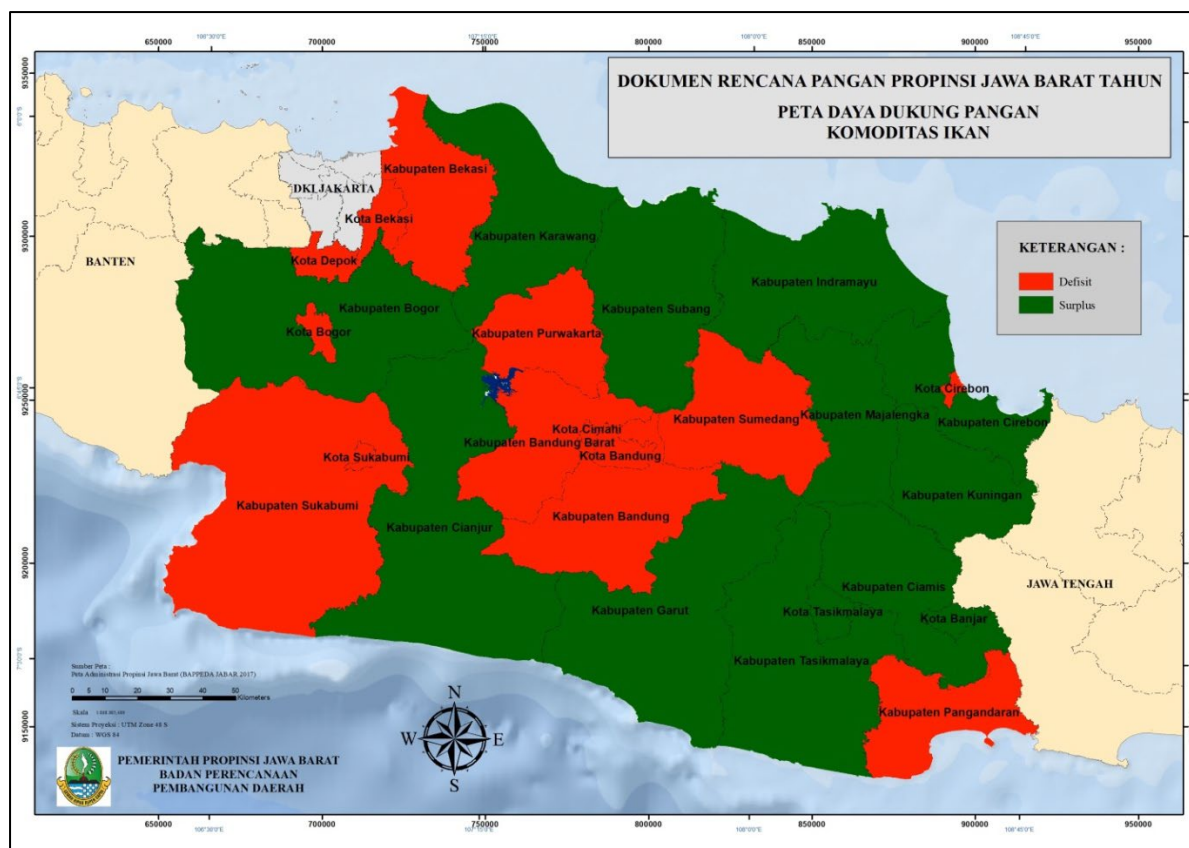
Susu adalah komoditas pangan yang dapat dikembangkan dalam sektor peternakan dan industri pengolahan. WP Sukabumi merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor peternakan, sehingga surplus susu yang dimiliki masing-masing wilayah dapat

digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Bodebekpunjur, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor peternakan di potensi pengembangannya, sehingga surplus susu di WP Priangan Timur dapat dikembangkan ke dalam sektor industri pengolahan.



Gambar 12. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Susu

Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah yang mengalami surplus ikan. Surplus ikan di Jawa Barat mencapai 540.468,72 ton pada tahun 2017. Daerah surplus ikan tertinggi berada pada Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cianjur, sedangkan defisit ikan terendah dialami oleh Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan Kota Bandung. Daerah surplus ikan di Jawa Barat diantaranya Kabupaten Bogor yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur, dan Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam WP Sukabumi. Seluruh wilayah pengembangan tersebut memiliki potensi pengembangan di sektor perikanan, sehingga surplus ikan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pengembangan tersebut.



Gambar 13. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Ikan

Selanjutnya, kedelai merupakan komoditas pangan dengan kandungan protein nabati tinggi dan telah digunakan sebagai bahan baku produk olahan seperti susu kedelai, tempe, tahu, kecap, dan berbagai makanan ringan lainnya. Di Indonesia, kedelai merupakan komoditas pangan terpenting setelah padi dan jagung (Krisnawati 2017). Provinsi Jawa Barat merupakan daerah defisit kacang kedelai, yakni sebesar -369.089,86 ton pada tahun 2017. Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami defisit kedelai. Daerah defisit kedelai tertinggi di Jawa Barat berada pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cirebon. Sedangkan daerah defisit kedelai terendah berada pada Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar. Berdasarkan Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arah Komoditas Pertanian yang diterbitkan oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian 2017, diketahui lahan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat selain lahan Kabupaten Pangandaran, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi sesuai untuk ditanami kedelai. Kondisi tersebut dapat dijadikan alternatif strategi untuk membangun wilayah produksi kedelai sehingga dapat mengurangi defisit kedelai di Jawa Barat.

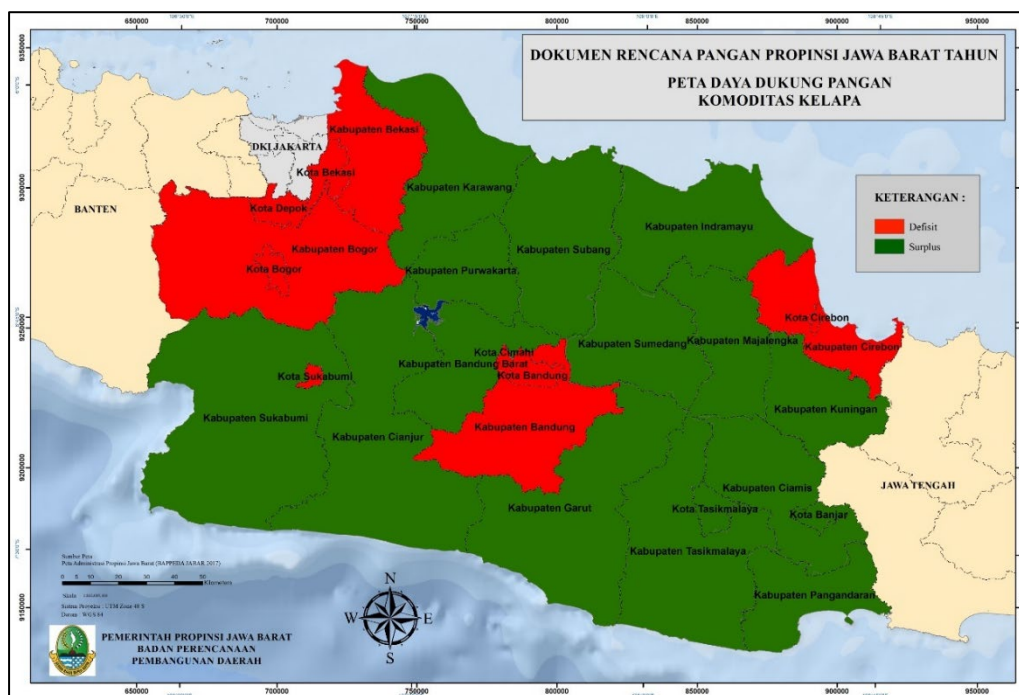


Gambar 14. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Kacang Kedelai

Kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) merupakan komoditas kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia (Respati *et al.* 2013). Surplus kacang tanah mencapai 32.765,56 ton pada tahun 2017. Surplus tertinggi kacang tanah berada pada Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan daerah defisit terendah berada pada Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi.

Kacang tanah merupakan komoditas pangan yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian, industri pengolahan, agribisnis, dan agroindustri. Daerah surplus kacang tanah di Jawa Barat diantaranya Kabupaten Subang yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam WP Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.

WP Purwasuka, WP Priangan Timur, WP Sukabumi, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian dan perkebunan, sehingga surplus kacang tanah yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Ciayumajakuning tidak memiliki sektor pertanian dan perkebunan di potensi pengembangannya, sehingga surplus kacang tanah di wilayah ini dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri.



Gambar 16. Peta daya dukung pangan komoditas kelapa

Daerah yang mengalami surplus kelapa berada pada Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang yang termasuk ke dalam WP Purwasuka, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning. Selain itu, surplus kelapa juga terjadi di Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur Pangandaran. Adapun daerah surplus kelapa di WP Sukabumi dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung adalah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. WP Purwasuka, WP Priangan Timur Pangandaran, WP Sukabumi, dan WP Cekungan Bandung merupakan wilayah pengembangan yang memiliki sektor perkebunan dalam potensi pengembangannya, sehingga surplus kelapa di masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu WP Ciayumajakuning tidak memiliki sektor perkebunan dalam potensi pengembangannya, sehingga surplus kelapa dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri.

Selanjutnya, minyak sawit merupakan salah satu dari 17 jenis minyak dan lemak dunia dengan kontribusi mencapai 27,8% (Carter 2007). Indonesia sebagai penghasil minyak sawit terbesar dunia telah berkontribusi untuk mengisi kebutuhan minyak sawit dunia. Minyak sawit biasanya digunakan untuk kebutuhan bahan pangan, industri kosmetik, industri kimia, dan industri pakan ternak. Sebagai fakta, CPO Indonesia menjadi salah satu komoditas ekspor yang menambah devisa negara selain migas (Tarmizi 2008). Provinsi Jawa Barat merupakan daerah defisit minyak kelapa sawit yaitu sebesar -377.431,42 ton pada tahun 2017. Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat kecuali Kabupaten Sukabumi mengalami defisit minyak sawit. Daerah defisit minyak sawit terbesar berada pada Kabupaten Bandung, Kabupaten

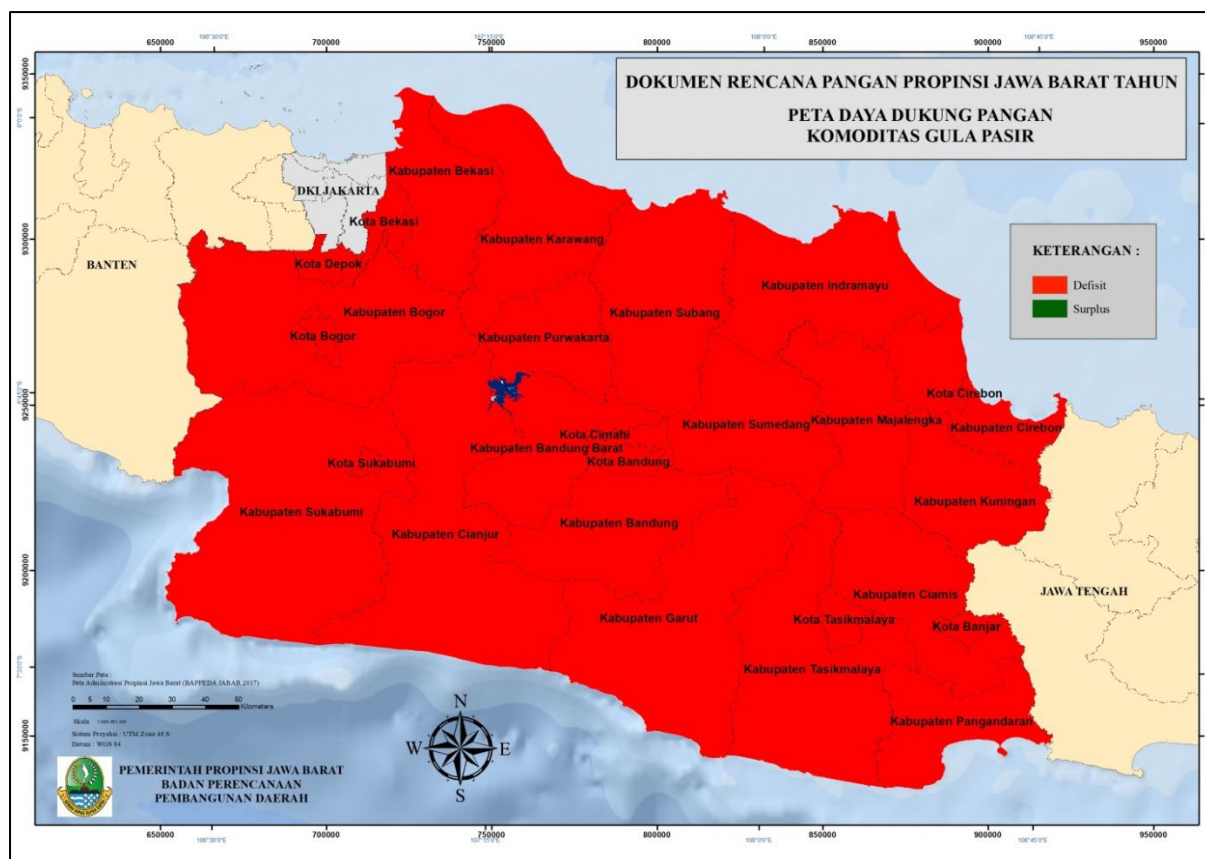
Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Daerah defisit minyak sawit terendah berada pada Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Banjar.



Gambar 17. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Minyak Sawit

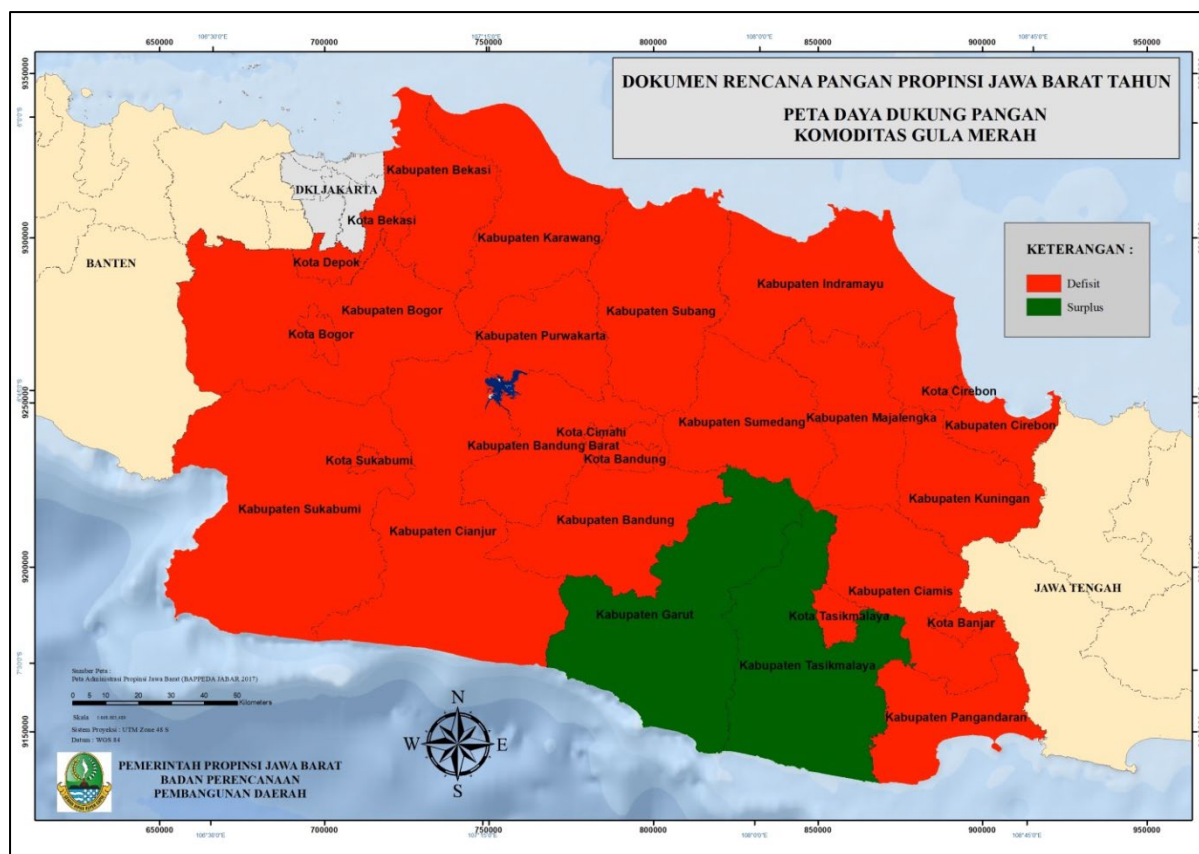
Berdasarkan Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arahkan Komoditas Pertanian yang diterbitkan oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian 2017, diketahui lahan di 13 wilayah di Jawa Barat sesuai untuk ditanami kelapa sawit. Tiga belas wilayah tersebut diantaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, dan Kota Tasikmalaya. Kondisi tersebut dapat dijadikan alternatif strategi untuk membangun wilayah produksi minyak kelapa sawit sehingga dapat mengurangi defisit minyak kelapa sawit di Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah defisit gula pasir, yaitu sebesar -237.055,20 ton pada tahun 2017. Seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat mengalami defisit gula pasir. Daerah defisit gula pasir terendah berada pada Kota Banjar, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Pangandaran. Daerah defisit gula pasir tertinggi berada pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung.



Gambar 18. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Gula Pasir

Tingginya defisit gula pasir pada 3 wilayah tersebut disebabkan tingginya pula jumlah penduduk sehingga menyebabkan permintaan gula pasir juga tinggi. Berdasarkan data produksi Susenas 2017, menunjukkan bahwa tidak ada produksi gula pasir pada 11 kabupaten dan 9 kota di Jawa Barat. Padahal, Atlas Peta Kesesuaian Lahan dan Arah Komoditas Pertanian yang diterbitkan oleh Balitbangtan Kementerian Pertanian 2017, menunjukkan bahwa lahan pada 16 wilayah di Jawa Barat sesuai untuk ditanami tebu. Daerah-daerah tersebut diantaranya Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.



Gambar 19. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Gula Merah

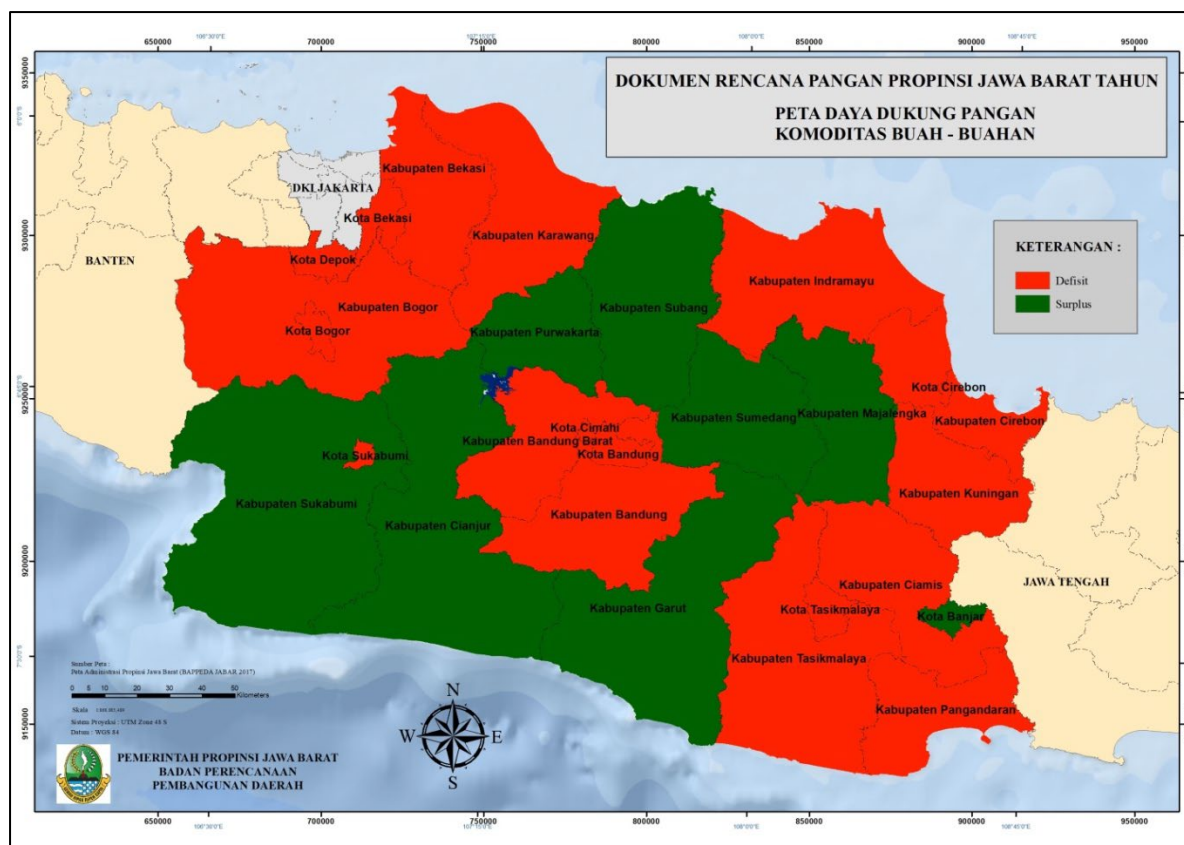
Tidak jauh berbeda dengan gula pasir, Provinsi Jawa Barat juga merupakan daerah defisit gula merah. Gula merah adalah gula yang memiliki bentuk padat dengan warna yang coklat kemerahan hingga coklat tua. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3743-1995) gula merah atau gula palma adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan nira pohon palma yaitu aren (*Arenga pinnata Merr*), nipah (*Nypafruticans*), siwalan (*Borassus flabellifera Linn*), dan kelapa (*Cocos nucifera Linn*). Defisit gula merah di Jawa Barat mencapai -39.652,68 ton pada tahun 2017. Daerah defisit tertinggi gula merah berada pada Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis dan Kota Bandung. Sementara itu, surplus gula merah hanya terjadi pada Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Kedua kabupaten ini termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Priangan Timur yang memiliki sektor pertanian dalam potensi pengembangannya. Sehingga, surplus gula merah di kedua wilayah dapat dikembangkan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya.

Komoditas pangan selanjutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan adalah jenis pangan sumber vitamin dan mineral. Provinsi Jawa Barat mengalami defisit pada komoditas buah yaitu sebesar -97.408,69 pada tahun 2017. Sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami defisit buah dengan jumlah defisit tertinggi berada pada Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Sementara itu, defisit buah terendah terjadi pada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon.

Buah merupakan komoditas pangan yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian hortikultura, industri pengolahan, agribisnis, dan agroindustri. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi besar untuk dapat menghasilkan aneka macam buah. Terdapat 8 wilayah di Jawa Barat yang tergolong surplus buah, diantaranya Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur, dan Kabupaten Sumedang yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.

WP Purwasuka, WP Priangan Timur, WP Sukabumi, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian dan perkebunan, sehingga surplus buah yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Ciayumajakuning merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor pertanian dan perkebunan di potensi pengembangannya, sehingga surplus buah di wilayah ini dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian dalam hal ini buah-buahan.

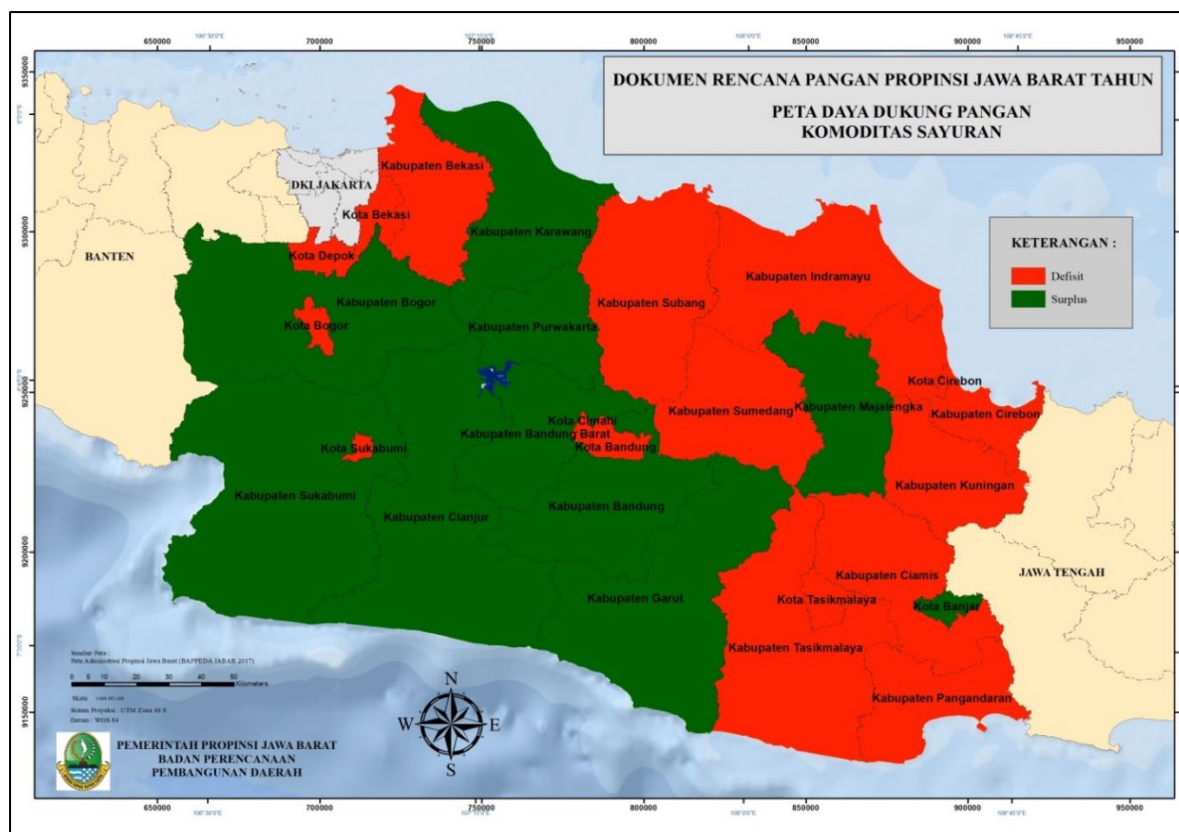
Komoditas buah seringkali disandingkan dengan komoditas sayur. Sayur adalah komoditas pangan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Kombinasi konsumsi buah dan sayur akan memenuhi kebutuhan zat gizi mikro manusia. Sayur banyak dikonsumsi dalam berbagai bentuk pangan olahan dan masakan pada masyarakat, bahkan ada pula yang dikonsumsi mentah sebagai lalapan. Surplus sayur mayor di Jawa Barat mencapai 2.604.087,88 ton pada tahun 2017. Surplus sayur tertinggi berada di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung, sedangkan defisit terendah berada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, dan Kota Depok.



Gambar 20. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Buah-Buahan

Sayur merupakan komoditas pangan yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian hortikultura, industri pengolahan, agribisnis, dan agroindustri. Terdapat 10 wilayah di Jawa Barat yang tergolong surplus sayur, diantaranya Kabupaten Bogor yang termasuk dalam WP Bodebekpunjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang yang termasuk dalam WP Purwasuka, Kabupaten Majalengka yang termasuk dalam WP Ciayumajakuning, Kabupaten Garut, Kota Banjar yang termasuk dalam WP Priangan Timur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur yang termasuk dalam WP Sukabumi, dan Kabupaten Bandung serta Kabupaten Bandung Barat yang termasuk dalam WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung.

WP Purwasuka, WP Priangan Timur, WP Sukabumi, dan WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, sehingga surplus sayur yang dimiliki masing-masing wilayah dapat digunakan sejalan dengan sektor potensi pengembangannya. Sementara itu, WP Bodebekpunjur dan WP Ciayumajakuning merupakan wilayah yang tidak memiliki sektor pertanian di potensi pengembangannya, sehingga surplus sayur di wilayah ini dapat digunakan ke dalam sektor pengembangan agribisnis dan/atau agroindustri. Peta daya dukung pangan komoditas sayuran disajikan pada gambar berikut.



Gambar 21. Peta Daya Dukung Pangan Komoditas Sayur

Selain daya dukung pangan, perlu diperhatikan juga daya dukung sumber daya air wilayah. Berdasarkan Dokumen KLHS RPJMD Jawa Barat 2018-2023, daya dukung sumber daya air pada suatu wilayah dapat diartikan sebagai ketersediaan potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di wilayah tersebut. Potensi air pada suatu wilayah dinyatakan sebagai *supply*, sedangkan kebutuhan air di wilayah tersebut dinyatakan sebagai *demand*. Idealnya, nilai *demand* tidak melebihi kemampuan *supply*. Jika nilai *demand* lebih besar dari *supply*, maka dapat dikatakan bahwa daya dukung air di wilayah tersebut telah terlampaui, sehingga diperlukan penerapan teknologi dan pengelolaan lingkungan yang baik sebagai bentuk pengendalian. Kondisi daya dukung air Provinsi Jawa Barat disajikan dalam Tabel 19 sebagai berikut:

Tabel 15. Daya Dukung Air Jawa Barat

Nama Wilayah	Ketersediaan (M3/th)	Kebutuhan Air Total (M3/th)	Daya Dukung Air	Surplus/ Defisit (%)
Kabupaten				
Bogor	367.357.614,32	244.727.682	122.629.932	1,50
Sukabumi	479.057.096,81	107.074.181	371.982.916	4,47
Cianjur	455.867.516,19	98.592.793	357.274.724	4,62
Bandung	218.753.288,21	157.532.087	61.221.201	1.39
Garut	187.203.077,16	112.544.319	74.658.758	1.66
Tasikmalaya	266.337.277,14	76.311.689	190.025.588	3.49
Ciamis	86.170.265,06	51.482.038	34.688.227	1.67
Kuningan	65.829.747,49	46.510.607	19.319.141	1.42
Cirebon	57.640.413,85	93.863.356	36.222.942	0.61
Majalengka	76.858.780,77	52.034.575	24.824.206	1.48
Sumedang	135.285.354,57	50.023.849	85.261.506	2.70
Indramayu	99.113.643,37	74.495.697	24.617.946	1.33
Subang	157.764.095,18	67.714.800	90.049.295	2.33
Purwakarta	67.765.672,72	40.852.304	26.913.369	1.66
Karawang	151.438.275,32	100.555.076	50.883.199	1.51
Bekasi	122.801.266,04	147.680.066	24.878.800	0.83
Bandung Barat	77.600.728,91	72.199.351	5.401.378	1.07
Pangandaran	71.348.803,51	17.205.385	54.143.419	4.15
Kota				
Bogor	9.521.640,24	46.633.291	37.111.650	0,20
Sukabumi	4.319.109,26	14.064.049	9.744.939	0,31
Bandung	6.370.319,63	109.089.244	102.718.924	0,06
Cirebon	1.728.047,40	13.599.287	11.871.239	0,13
Bekasi	7.884.480,84	122.079.579	114.195.098	0,06
Depok	9.955.905,03	95.475.809	85.519.904	0,10
Cimahi	1.561.835,21	26.018.120	24.456.285	0,06
Tasikmalaya	14.237.359,63	28.890.743	14.653.383	0,49
Banjar	8.230.758,40	7.967.264	263.495	1,03
Jawa Barat	3.208.002.372,25	2.075.217.238	1.132.785.134	1,55

Sumber : Dokumen KLHS, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat 2018

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat 2018-2023, ketersediaan air untuk lima tahun mendatang secara umum di Provinsi Jawa Barat masih mencukupi kebutuhan. Akan tetapi, terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang akan mengalami kondisi defisit air, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

Mengacu Tabel 18 yang menampilkan jenis pangan surplus dan defisit di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, beberapa daerah yang di prediksi akan mengalami defisit air termasuk daerah surplus pangan. Kabupaten Cirebon merupakan daerah surplus untuk jenis pangan beras, jagung, daging ruminansia, daging unggas, dan ikan. Kota Bogor merupakan daerah surplus untuk jenis pangan jagung, ubi jalar, dan daging ruminansia. Kota Sukabumi merupakan daerah surplus untuk jenis pangan daging ruminansia. Kota Bekasi merupakan daerah surplus untuk jenis pangan jagung dan Kota Tasikmalaya merupakan daerah surplus untuk jenis pangan daging unggas dan ikan. Daerah yang perlu diprioritaskan dalam strategi pengadaan air adalah Kabupaten Cirebon, karena daerah tersebut merupakan daerah surplus beras. Sehingga jika air pada Kabupaten Cirebon mengalami defisit, hal tersebut akan berdampak pada penurunan produksi beras yang kemudian akan mengganggu ketersediaan beras di Provinsi Jawa Barat.

Peningkatan ketersediaan pangan seharusnya tidak hanya fokus oleh peningkatan produksi akan tetapi dapat dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menurunkan kehilangan pada tahap produksi dan distribusi (*food losses*) dan kehilangan pangan pada tahap konsumsi (*food waste*). FAO (2014) telah mengencarkan gerakan untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan selain dari segi peningkatan produksi yaitu dengan menurunkan besarnya bahan pangan yang mengalami kehilangan sepanjang rantai produksi dan distribusi (*food losses*) serta serta menurunkan kehilangan pangan pada rantai konsumsi (*food waste*). *Food losses* dan *food waste* merupakan salah satu permasalahan di bidang pangan dan gizi di berbagai negara (BCFN 2012).

Berdasarkan penelitian Mulyo (2016), *food losses* komoditas beras di Indonesia totalnya mencapai 21,96% dari total produksi beras di Indonesia. Hal ini berarti sebesar 21,96% dari total produksi beras di Indonesia hilang di jalan atau hilang pada tahapan panen dan pascapanen serta distribusi. Kehilangan tersebut senilai dengan 9,07 juta ton. Sedangkan *food waste* komoditas beras di Indonesia mencapai 1,96% dari total produksi beras di Indonesia dengan nilai 866,1 ribu ton beras. Adapun perhitungan *food losses and waste* di Jawa Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16 *Food Losses and Waste* Provinsi Jawa Barat

Tahun	FLW		Konsumsi rata-rata (kg/kap/thn)	Jumlah orang yang bisa diberi makan (jiwa)
	Ton	Kg		
2016	2.052.236	2.052.236.000	102,8	19.963.285
2017	1.493,580	1.493.580.800	100,8	14.817.270

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka , BPS 2016-2018

FAO (2011) menyebutkan bahwa 33,33% pangan yang di produksi dunia hilang atau tercecer. Selama ini peningkatan ketersediaan beras di Indonesia fokus pada peningkatan produksi dan melakukan impor. Padahal peningkatan ketersediaan beras dapat dilakukan dengan cara mengurangi *food losses and food waste* di setiap wilayah. Tabel 20 menunjukkan bahwa data tahun 2016 hingga tahun 2017 terjadi penurunan jumlah *food losses*

and food waste. Terdapat 2.052.236 ton beras yang hilang di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Angka ini menurun menjadi 1.493.580 ton pada tahun 2017.

Kehilangan pada tahapan pascapanen (*food losses*) dapat meliputi kehilangan pada saat pemanenan, perontokan, pengeringan, pengemasan, dan penggilingan (Iswari 2012). Selain itu kehilangan juga dapat terjadi saat distribusi baik pada tahapan pengangkutan gabah maupun pengangkutan beras (Nugraha et al. 2007). Kehilangan beras juga dapat terjadi pada tahap konsumsi (*food waste*). Kehilangan beras pada saat konsumsi dapat terjadi pada berbagai tingkatan meliputi institusi pemerintahan, non pemerintahan, maupun rumah tangga (FAO 2014). Salah satu kehilangan pada saat konsumsi yang cukup besar terjadi pada rumah sakit, rumah tangga, restoran, dan hotel (BCFN 2012). Padahal jika dihitung berdasarkan konsumsi rata-rata penduduk Jawa Barat selama tahun 2016 hingga 2017, jumlah beras yang hilang tersebut dapat memberi makan lebih dari 10 juta orang setiap tahunnya (Tabel 20).

Kehilangan pangan baik pada tahapan produksi dan distribusi (*food losses*) maupun kehilangan pada saat konsumsi (*food waste*) menimbulkan berbagai permasalahan diberbagai bidang termasuk pangan dan gizi (menurunnya kualitas konsumsi dan peningkatan kasus gizi kurang dan gizi buruk), kerugian ekonomi, dan juga kerugian dibidang lingkungan (pencemaran dan pemborosan sumber daya air, udara, hutan dan lain-lain) (BCFN 2012). Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus merespon rekomendasi FAO untuk mengurangi *food losses* dan *food waste* dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk.

3. 2. Situasi Akses Pangan

Akses atau distribusi pangan adalah salah satu subsistem tercapainya ketahanan pangan. Subsistem distribusi pangan yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang baik sepanjang waktu. Subsistem ini mencakup aspek akses secara fisik, ekonomi maupun sosial atas pangan secara merata sepanjang waktu.

Akses pangan secara fisik ditunjukkan oleh kemampuan memperoleh pangan melalui infrastruktur dasar maupun kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. Akses fisik lebih bersifat kewilayahan serta dipengaruhi oleh ciri dan pengelolaan ekosistem. Akses pangan secara ekonomi menyangkut akses masyarakat terhadap pangan yang ditunjukkan oleh harga, sumber mata pencaharian dan pendapatan. Adapun sumber mata pencaharian meliputi kemampuan, aset dan aktivitas yang dapat menjadi sumber pendapatan. Seringkali, sumber mata pencaharian sangat dipengaruhi oleh kondisi maupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Akses pangan secara sosial dicerminkan oleh tingkat pendidikan, bantuan sosial, kebiasaan makan, dan konflik sosial maupun keamanan.

Cakupan sistem distribusi ini menunjukkan bahwa distribusi pangan bukan semata-mata mencakup aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga menyangkut akses ekonomi yang dicerminkan oleh harga dan daya beli masyarakat. Meskipun ketersediaan pangan secara mikro/Nasional maupun per kapita mencukupi,

namun belum tentu setiap rumah tangga memiliki akses yang nyata secara sama. Dengan demikian surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan bagi individu. Adapun akses pangan yang dibahas dalam laporan ini adalah akses pangan secara ekonomi yang meliputi tingkat kemiskinan penduduk, tingkat pengeluaran makanan, dan stabilitas harga pasar. Berikutnya persentase penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2012-2018 disajikan pada Tabel 21 sebagai berikut:

Tabel 17 Persentase Penduduk Miskin di Jawa Barat

No,	Kabupaten/Kota	Penduduk Miskin (%)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kab Bogor	8,83	9,54	8,91	8,96	8,83	8,57	7,14
2	Kab Sukabumi	9,79	9,24	8,81	8,96	8,13	8,04	6,76
3	Kab Cianjur	13,18	12,02	11,47	12,21	11,62	11,41	9,81
4	Kab Bandung	8,33	7,94	7,65	8,00	7,61	7,36	6,65
5	Kab Garut	12,72	12,79	12,47	12,81	11,64	11,27	9,27
6	Kab Tasikmalaya	11,76	11,57	11,26	11,99	11,24	10,84	9,85
7	Kab Ciamis	9,63	8,62	8,38	8,98	8,42	8,2	7,22
8	Kab Kuningan	13,70	13,34	12,72	13,97	13,59	13,27	12,22
9	Kab Cirebon	14,96	14,65	14,22	14,77	13,49	12,97	10,70
10	Kab Majalengka	14,46	14,07	13,42	14,19	12,85	12,6	10,79
11	Kab Sumedang	11,87	11,31	10,78	11,36	10,57	10,53	9,76
12	Kab Indramayu	15,44	14,99	14,29	14,98	13,95	13,67	11,89
13	Kab Subang	12,49	12,35	11,73	12,27	11,05	10,77	8,67
14	Kab Purwakarta	9,57	9,28	8,80	9,14	8,98	9,06	7,99
15	Kab Karawang	11,11	10,69	10,15	10,37	10,07	10,25	8,06
16	Kab Bekasi	5,25	5,20	4,97	5,27	4,92	4,73	4,37
17	Kab Bandung Barat	13,35	12,92	12,26	12,67	11,71	11,49	10,06
18	Kab Pangandaran	-	-	-	10,76	10,23	10,00	8,12
19	Kota Bogor	8,48	8,19	7,74	7,60	7,29	7,11	5,93
20	Kota Sukabumi	8,42	8,05	7,65	8,79	8,59	8,48	7,12
21	Kota Bandung	4,55	4,78	4,65	4,61	4,32	4,17	3,57
22	Kota Cirebon	11,10	10,54	10,03	10,36	9,73	9,66	8,88
23	Kota Bekasi	5,56	5,33	5,25	5,46	5,06	4,79	4,11
24	Kota Depok	2,46	2,32	2,32	2,40	2,34	2,34	2,14
25	Kota Cimahi	6,68	5,63	5,47	5,84	5,92	5,76	4,94
26	Kota Tasikmalaya	18,94	17,19	15,95	16,28	15,60	14,80	12,71
27	Kota Banjar	7,79	7,11	6,95	7,41	7,01	7,06	5,70
	Jawa Barat	9,88	9,61	9,18	9,53	8,95	8,71	7,94

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2013-2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2015-2018. Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin pada 2017-2018. Pada tahun 2018, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi berada pada Kota Tasikmalaya, sementara itu wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah berada pada Kota Depok. Perilaku konsumsi masyarakat merupakan dampak dari tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyangkut suatu kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi, pendapatan, dan kebutuhan sosial. Semakin rendah tingkat kemiskinan, maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat. Pratama (2014) menunjukkan bahwa kemiskinan mempengaruhi tingkat konsumsi ($pvalue < 0,05$). Tingkat kemiskinan mempengaruhi tingkat konsumsi secara negatif dan signifikan, artinya bahwa semakin rendah angka kemiskinan maka akan semakin tinggi tingkat konsumsi. Sementara itu, data pengeluaran rata-rata sebulan makanan dan non-makanan disajikan pada Tabel 22 sebagai berikut:

Tabel 18. Pengeluaran Rata-Rata Sebulan Makanan dan Non-Makanan Penduduk Jawa Barat 2014-2018

Kelompok Barang	Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A. Makanan										
1. Padi-padian	55.861	7,2	67.169	7,5	60.427	6,1	58.734	5,3	67.880	5,6
2. Umbi-umbian	2.352	0,3	3.264	0,4	4.164	0,4	4.799	0,4	4.541	0,4
3. Ikan	22.115	2,8	23.032	2,6	25.504	2,6	32.083	2,9	33.769	2,8
4. Daging	17.709	2,3	21.022	2,3	25.403	2,6	31.727	2,9	27.957	2,3
5. Telur dan susu	22.861	2,9	26.438	2,9	28.841	2,9	30.089	2,7	33.894	2,8
6. Sayur-sayuran	24.759	3,2	23.429	2,6	28.920	2,9	36.896	3,3	35.336	2,9
7. Kacang-kacangan	10.565	1,4	10.077	1,1	10.981	1,1	11.954	1,1	12.123	1,0
8. Buah-buahan	16.631	2,1	20.274	2,3	19.309	2,0	24.419	2,2	31.890	2,6
9. Minyak dan lemak	10.333	1,3	10.838	1,2	10.984	1,1	11.938	1,1	11.983	1,0
10. Bahan minuman	11.358	1,5	13.633	1,5	15.101	1,5	16.494	1,5	17.087	1,4
11. Bumbu-bumbuan	7.171	0,9	8.118	0,9	9.716	1,0	10.230	0,9	10.992	0,9
12. Konsumsi lainnya	8.441	1,1	10.707	1,2	11.762	1,2	13.070	1,2	12.032	1,0
13. Makanan dan minuman jadi	115.104	14,7	131.255	14,6	157.273	16,0	206.807	18,7	226.268	18,6
14. Tembakau dan sirih	50.490	6,5	56.626	6,3	69.429	7,1	73.527	6,7	75.215	6,2
Jumlah Makanan	375.749	48,1	425.883	47,5	477.814	48,6	562.767	51,0	600.967	49,3
B. Non-makanan										
1. Perumahan dan Fasilitas rumah tangga	179.000	22,9	245.053	27,3	264.183	26,9	264.503	24,0	303.233	24,9
2. Barang dan jasa	146.017	18,7	123.429	13,8	132.459	13,5	137.426	12,5	157.915	13,0
3. Pakaian. alas kaki dan tutup kepala	23.364	3,0	26.061	2,9	30.971	3,1	33.901	3,1	35.727	2,9

Kelompok Barang	Tahun									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
4. Barang-barang yang tahan lama	32.200	4,1	43.384	4,8	41.147	4,2	58.161	5,3	64.758	5,3
5. Pajak dan asuransi	13.870	1,8	19.123	2,1	20.839	2,1	27.817	2,5	30.755	2,5
6. Keperluan pesta dan upacara	10.865	1,4	13.961	1,6	16.464	1,7	18.762	1,7	24.724	2,0
Jumlah Non-makanan	405.316	51,9	471.012	52,5	506.063	51,4	540.571	49,0	617.112	50,7
Jumlah Makanan dan Non-makanan	781.065	100,0	896.895	100,0	983.877	100,0	1.103.337	100,0	1.218.078	100,0

Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat, BPS 2015-2019

Tabel 22 menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran makanan tertinggi penduduk Provinsi Jawa Barat dari 2014-2018 adalah makanan dan minuman jadi yakni berturut-turut 14,7%; 14,6%; 16,0%; 18,7%; dan 18,6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Jawa Barat pada umumnya lebih memilih membeli makanan dan minuman jadi dibandingkan memasak. Kondisi tersebut diduga didukung oleh semakin banyaknya keluarga *dual earner* (keluarga dengan kedua orang tua yang sama-sama bekerja) serta semakin mudahnya jasa pesan-antar makanan melalui aplikasi *online*.

Setelah makanan dan minuman jadi, pengeluaran makanan tertinggi berikutnya adalah pengeluaran untuk padi-padian dan tembakau. Kedua jenis pengeluaran ini terus bersaing dari tahun ke tahun. Namun, pengeluaran rumah tangga untuk tembakau masih lebih besar dibanding pengeluaran untuk pangan jenis lain selain padi-padian. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata rumah tangga di Jawa Barat lebih banyak mengalokasikan uangnya untuk membeli rokok dibandingkan kebutuhan pangan seperti pangan hewani, kacang-kacangan, umbi-umbian serta sayur dan buah.

Selain tingkat kemiskinan dan pengeluaran pangan, akses ekonomi juga dapat digambarkan dari stabilitas harga di pasar. Stabilisasi harga pangan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia. Harga komoditas pangan yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial (Sari 2010). Oleh karena itu, hampir semua negara melakukan intervensi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis. Indonesia saat ini juga masih berusaha untuk mencari solusi permasalahan fluktuasi harga pangan di dalam negeri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 26 Ayat 1 disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan Nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Ayat 3 menyebutkan dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.

Sebanyak dua puluh komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2018. Barang kebutuhan pokok tersebut diantaranya beras premium, beras medium, beras termurah, jagung, kasang kedelai, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, cabe merah TW, cabe keriting, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, ubi kayu, ubi jalar, dan tepung terigu. Adapun data stabilitas harga dua puluh barang pokok tersebut tahun 2017-2018 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Stabilitas Harga Pangan Di Jawa Barat Tahun 2017-2018

No.	Jenis Pangan	SKi (%)	
		2017	2018
1	Beras premium	70,63	26,65
2	Beras medium	68,79	-33,14
3	Beras termurah	46,95	-112,47
4	Jagung	-553,47	-91,27
5	Kacang kedelai	23,48	-364,23
6	Kacang tanah	2,65	-
7	Daging sapi	117,39	80,33
8	Daging ayam	20,01	-72,00
9	Telur ayam ras	7,16	-73,98
10	Gula pasir	101,41	115,70
11	Minyak goreng curah	101,29	149,77
12	Minyak goreng (bimoli)	-1.068,00	174,45
13	Cabe merah TW	-1.122,77	-
14	Cabe keriting	- 818,76	- 498,74
15	Cabe rawit	-1.537,24	-752,54
16	Bawang merah	-608,85	-361,20
17	Bawang putih	- 1.624,36	-254,60
18	Ubi kayu	- 420,41	-
19	Ubi jalar	-366,02	-
20	Tepung terigu	-1.075,52	95,82
Capaian stabilitas harga pangan		- 431,78	-98,57

Keterangan :

SKi : Capaian stabilitas (SPM 90%)

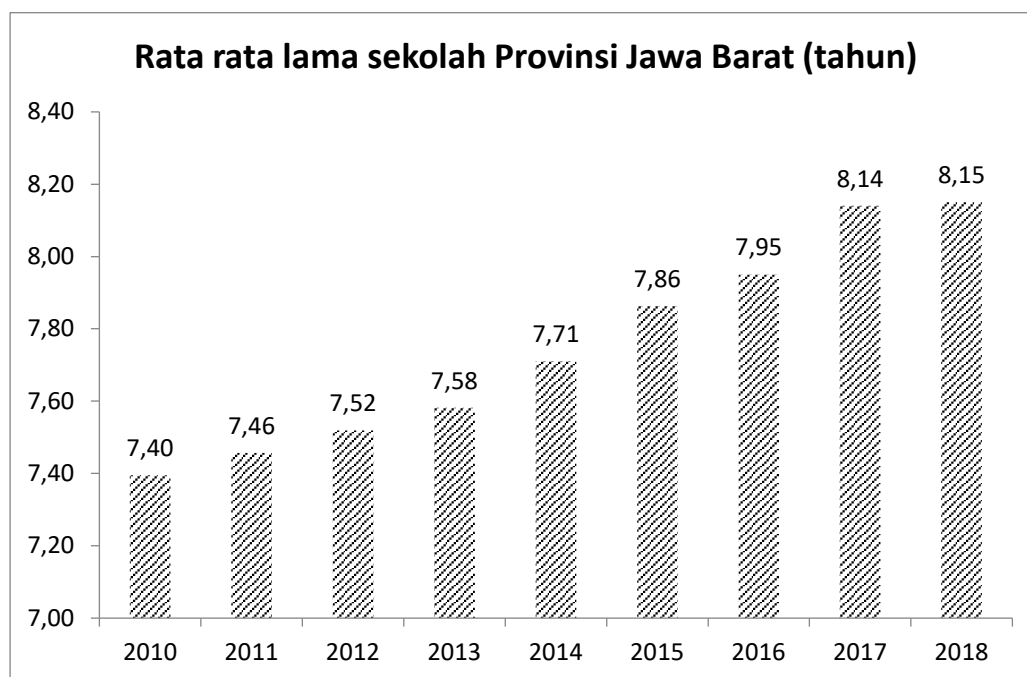
Dalam menghitung stabilitas harga digunakan indikator SKi atau capaian stabilitas harga. SKi merupakan persentase yang menunjukkan persentase capaian stabilitas harga pangan yang memiliki standar pemenuhan minimal (SPM) sebesar 90%. Artinya jika persentasenya mencapai minimal 90% maka semakin stabil harga pangannya. Sebaliknya, capaian stabilitas harga (SKi) semakin kecil maka harga stabilitas pangan semakin tidak stabil. Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 terdapat tiga jenis komoditas pangan yang harga pangannya tergolong stabil, yakni daging sapi, gula pasir, dan minyak goreng curah. Pangan yang paling stabil diantara ketiganya adalah daging sapi dengan nilai SKi 117,39%. Pangan yang tidak stabil di tahun 2017 adalah bawang putih dan cabe rawit. Rata-rata stabilitas harga pangan pokok Jawa Barat adalah sebesar -431,78%. Angka ini masih jauh dari standar pemenuhan minimal, sehingga harga pangan pokok di Jawa Barat pada tahun 2017 dapat dikatakan belum stabil.

Selanjutnya pada tahun 2018, dari dua puluh jenis komoditas, terdapat empat komoditas yang data harga pangannya tidak tersedia lengkap, sehingga tidak dapat diketahui stabilitas harga pangannya. Empat komoditas tersebut adalah kacang tanah, cabe merah TW, ubi kayu, dan ubi jalar. Berdasarkan tabel diatas, terdapat empat bahan pokok yang memiliki nilai SKi lebih dari 90% yaitu gula pasir, minyak goreng curah, minyak goreng (bimoli), dan tepung terigu. Gula pasir dan minyak goreng curah menjadi komoditas yang tetap stabil pada tahun 2017 dan 2018. Sementara itu, SKi

daging sapi menurun dari 117,39%. menjadi 80,33%. Komoditas yang paling tidak stabil pada tahun 2018 adalah cabe rawit. Adapun rata-rata stabilitas harga pangan pokok di Jawa Barat meningkat menjadi -98,57% pada tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dari angka pada tahun 2017, sehingga dapat dikatakan harga pokok di Jawa Barat tahun 2018 lebih stabil dibanding tahun 2017.

Stabilitas harga pangan di pasar akan mempengaruhi tingkat akses pangan penduduk. Semakin tinggi harga pasar, maka akan semakin rendah akses pangan. Rendahnya akses pangan pada akhirnya akan berdampak pada penurunan konsumsi. Penelitian yang dilakukan oleh Nur *et al.* (2017) menunjukkan bahwa harga merupakan faktor yang mempengaruhi akses konsumsi, sehingga upaya stabilisasi harga harus terus dilakukan untuk memudahkan akses terhadap konsumsi pangan.

Pilihan masyarakat terhadap konsumsi pangan yang ideal dipengaruhi oleh akses ekonomi, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, pilihan masyarakat terhadap konsumsi pangan yang ideal dipengaruhi oleh pola asuh (Anantayu *et al.* 2018). Salah satu fondasi bagi pola asuh adalah tingkat pendidikan (akses sosial). Gambar 27 menunjukkan Rata-rata Lama Sekolah penduduk Jawa Barat pada tahun 2010-2018.



Gambar 22. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Provinsi Jawa Barat

Rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat sebesar 8,14 tahun atau setara Sekolah Menengah Pertama semester 1 pada tahun 2017, dengan rata-rata laju 1,8 tahun dari tahun 2013 – 2017 atau setara hampir 2 tahun. Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 12,43 tahun atau setara pendidikan tinggi semester 1, dengan rata-rata laju 2013 – 2017 sebesar 1,57 tahun (BPS, 2018).

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat telah mengetahui dan memperoleh akses pendidikan yang baik. Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2017 sebesar 99,51% untuk Sekolah Dasar, 93,77%

untuk Sekolah Menengah Pertama, dan 66,62% untuk Sekolah Menengah Atas (BPS, 2018). Angka Partisipasi Sekolah seyogyanya merata ke seluruh daerah, mengingat Indeks Gini yang masih menunjukkan ketimpangan. Apalagi adanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang mengatur penerimaan peserta didik baru sesuai zonasi. Selain itu, langkah untuk meningkatkan pola asuh adalah meningkatkan rasio guru terhadap murid Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas, sesuai dengan rata-rata lama sekolah. Tingkat pendidikan umumnya akan sejalan dengan tingkat pengetahuan gizi. Hasil penelitian Worsley *et al*, (2004) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan diasosiasikan dengan konsumsi makanan yang lebih beragam.

3. 3. Situasi Konsumsi Pangan

Tujuan penyelenggaraan pangan adalah mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan harga yang wajar dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat dipengaruhi hasil interaksi antara kondisi makro ekonomi dan keputusan mikro ekonomi. Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pangan diukur dari skor PPH. Semakin mendekati skor PPH 100, konsumsi masyarakat semakin ideal untuk hidup aktif, produktif, dan berkelanjutan. Skor PPH Jawa Barat Tahun 2013–2017 yang dihitung berdasarkan AKE 2.000 kkal/kap/hari berturut-turut sebesar 74,9; 78,3; 81; 84,3; dan 85,2 (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2018). Sementara itu, skor PPH Jawa Barat Tahun 2017–2018 yang dihitung berdasarkan AKE 2.150 kkal/kap/hari adalah sebesar 81,6 dan 85,2 Skor PPH Jawa Barat masih lebih rendah dari skor PPH Nasional selama kurun waktu tersebut.

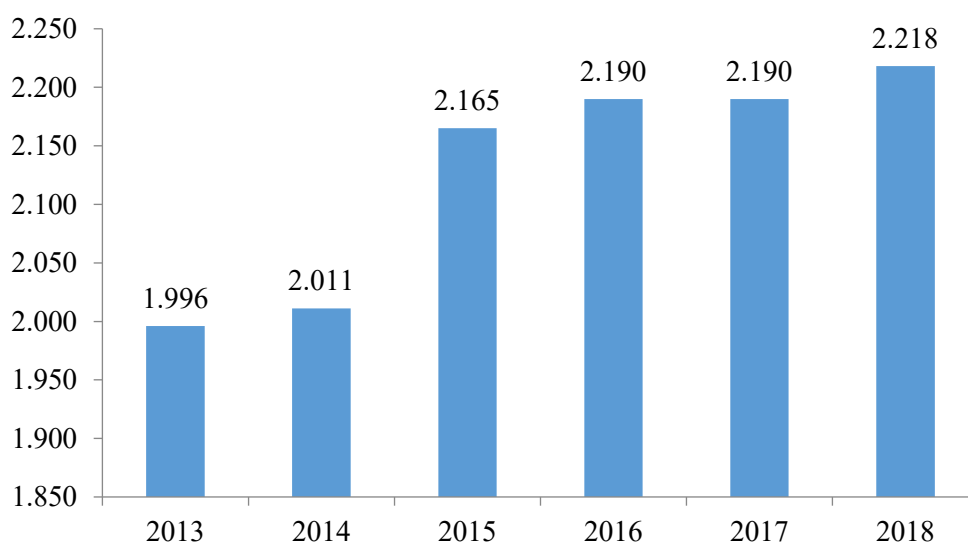
Tabel 20 Perkembangan Skor PPH Jawa Barat Tahun 2013-2017

No	Kelompok Pangan	Skor PPH (AKE 2000 kkal/kap/hr)					Skor Ideal	Skor PPH (AKE 2150 kkal/kap/hr)	
		2013	2014	2015	2016	2017		2017	2018
1	Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	0,6	0,6	0,8	0,9	1,4	2,5	1,3	1,0
3	Pangan Hewani	17,3	19,0	21,3	24,0	24,0	24,0	22,5	22,7
4	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	1,0	0,4	0,2
6	Kacang-kacangan	5,7	5,4	5,1	5,6	5,8	10,0	5,4	5,6
7	Gula	1,5	1,3	1,6	1,9	1,7	2,5	1,5	1,1
8	Sayur dan Buah	19,4	21,7	21,9	21,4	22,0	30,0	20,5	24,7
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skor PPH Jawa Barat		74,9	78,3	81	84,3	85,2	100	81,6	85,2
Target Skor PPH Jawa Barat		72	74	76	78	80	-	80	81,6
Skor PPH Nasional		81,4	83,4	85,2	86	90,4	-	90,4	92,5

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2019, diolah

Tabel 24 menunjukkan penduduk Jawa Barat belum mengonsumsi pangan secara beragam. Skor PPH kelompok padi-padian sudah mencapai ideal yaitu 25,0. Sama halnya dengan skor PPH kelompok minyak dan lemak juga sudah ideal yaitu 5,0. Kelompok pangan lainnya yaitu umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah belum mencapai ideal, artinya belum dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan beragam. Pada tahun 2018, terjadi penurunan skor PPH pada jenis pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, dan gula. Sementara itu, skor PPH untuk jenis pangan hewani, kacang-kacangan, serta sayur dan buah meningkat.

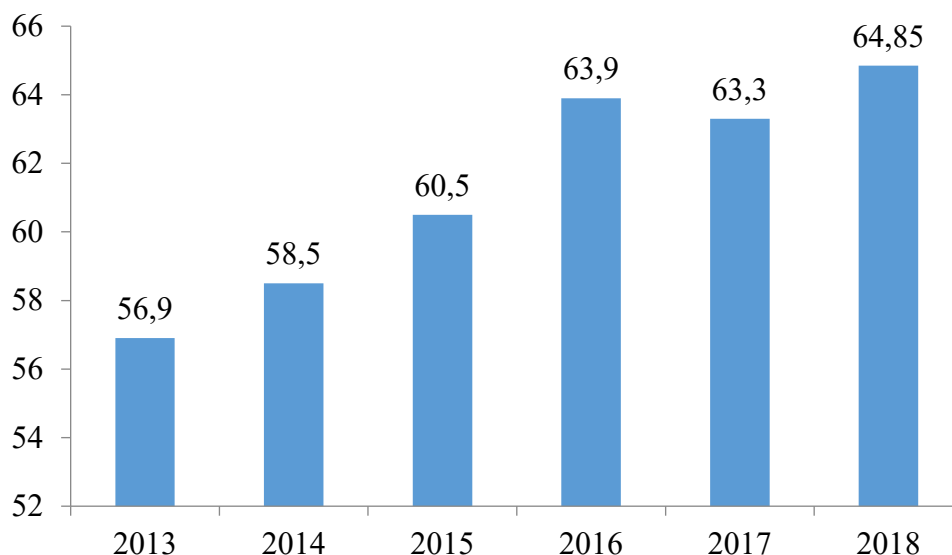
Skor PPH tahun 2017 jika dihitung berdasarkan AKE 2.000 kkal/kap/hari adalah sebesar 81,6 poin, sedangkan jika dihitung berdasarkan AKE 2.150 kkal/kap/hari sebesar 85,1 poin. Kedua skor PPH ini telah mencapai target skor PPH Jawa Barat tahun 2017 yakni 80 poin, sehingga tahun 2017 dijadikan tahun dasar perencanaan kebutuhan pangan. Adapun skor PPH Jawa Barat tahun 2018 yang dihitung dengan menggunakan AKE 2.150 kkal/kap/hari memiliki skor 85,2 poin. Angka ini sudah mencapai target skor PPH Jawa Barat sesuai tahun dasar 2017 yakni 81,6 namun masih jauh dari target skor PPH Nasional sebesar 92,5 poin. Adapun perkembangan AKE dan AKP di Jawa Barat disajikan pada gambar berikut.



Gambar 23. Perkembangan AKE Jawa Barat tahun 2013-2018 (kkal/kap/hari)

Pehitungan AKE tahun 2013-2017 masih menggunakan angka 2.000 kkal/kap/hari, sedangkan AKE tahun 2018 sudah dihitung dengan menggunakan AKE 2.150 kkal/kap/hari. Terjadi peningkatan Angka Konsumsi Energi di Jawa Barat dari tahun ke tahun. Peningkatan AKE tertinggi terjadi dari tahun 2014 yakni 2.011 kkal/kap/hari menjadi 2.165 kkal/kap/hari pada tahun 2015. Laju peningkatan AKE pada tahun ini mencapai 7,66%. Sementara itu AKE tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 2.218 kkal/kap/hari. Tidak pernah terjadi penurunan AKE pada tahun 2013-2018. Sejak tahun 2015, konsumsi energi penduduk Jawa Barat

sudah memenuhi AKE standar yang ditetapkan yakni 2.150 kkal/kap/hari. Lebih lanjut lagi, Persentase AKE Jawa Barat dari tahun 2013-2018 berturut turut adalah sebesar 99,8%, 100,6%; 108,3%; 109,5%; 109,5%; dan 103,2%. Departemen Kesehatan Tahun 1996 menyatakan bahwa suatu wilayah dikatakan tahan pangan jika memiliki nilai AKE 90-110%. Berdasarkan kategori ini, Jawa Barat sudah termasuk wilayah tahan pangan (dalam segi energi) sejak tahun 2013 hingga saat ini.



Gambar 24. Perkembangan AKP Jawa Barat tahun 2013-2018 (g/kap/hari)

Pehitungan AKP tahun 2013-2017 masih menggunakan angka 52 g/kap/hari, sedangkan AKP tahun 2018 sudah dihitung dengan menggunakan AKP standar 57 g/kap/hari. Sejak tahun 2014, Angka Kecukupan protein penduduk Jawa Barat sudah memenuhi AKP ideal yang ditetapkan yakni 57 g/kap/hari. AKP Jawa Barat sempat menurun pada tahun 2017 menjadi 63,3 g/kap/hari, namun kembali meningkat pada tahun 2018 mencapai 64,85 g/kap/hari. Persentase AKP penduduk Jawa Barat dari tahun 2013 hingga 2018 berturut turut adalah sebesar 109,4%; 112,5%; 116,3%; 122,9%; 121,7% dan 113,8%. Berikutnya data perkembangan skor PPH Kabupaten/Kota di Jawa Barat berdasarkan AKE 2.000 kkal/kap/hari disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Perkembangan Skor PPH Kabupaten/Kota di Jawa Barat

No	Nama Daerah	Skor PPH						Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017*	2017**	
1	Kab Bogor	66,2	69,8	77,0	82,1	86,9	83,6	Naik
2	Kab Sukabumi	65,8	65,8	80,5	78,6	78,0	74,6	Naik → Turun
3	Kab Cianjur	61,9	65,7	70,0	71,6	76,1	72,9	Naik
4	Kab Bandung	67,6	70,4	78,6	79,3	84,6	82,5	Naik
5	Kab Garut	58,0	62,2	66,7	75,9	76,9	69,2	Naik
6	Kab Tasikmalaya	60,2	60,2	76,2	67,4	79,3	75,8	Fluktuatif
7	Kab Ciamis	66,3	69,9	77,0	76,7	89,8	85,6	Fluktuatif

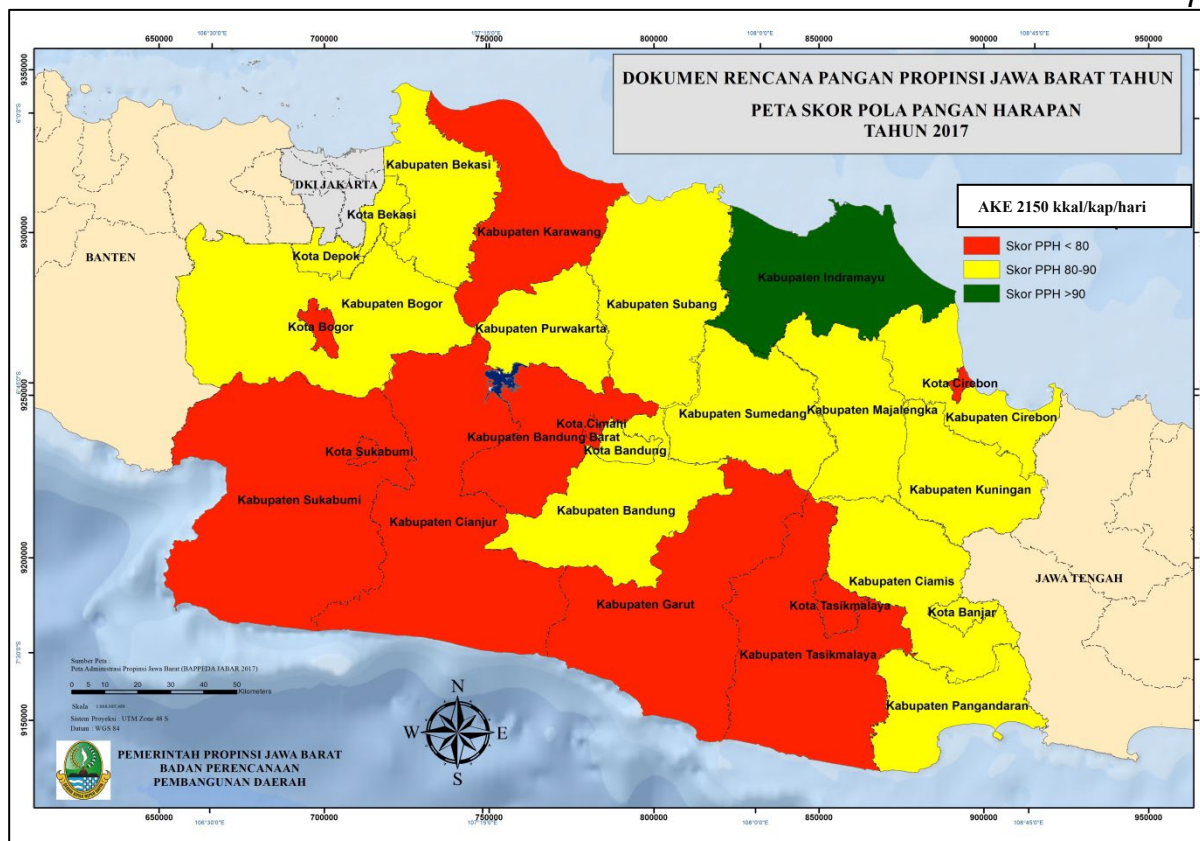
No	Nama Daerah	Skor PPH						Keterangan
		2013	2014	2015	2016	2017*	2017**	
8	Kab Kuningan	70,3	74,6	81,6	82,3	84,0	80,2	Naik
9	Kab Cirebon	66,5	69,3	77,1	84,5	86,9	83,3	Naik
10	Kab Majalengka	67,6	79,6	81,6	89,6	84,8	80,8	Naik → Turun
11	Kab Sumedang	74,2	87,9	84,7	86,1	85,0	81,2	Fluktuatif
12	Kab Indramayu	77,0	94,0	85,4	92,1	94,2	93,5	Fluktuatif
13	Kab Subang	68,2	83,5	85,9	86,2	83,3	80,4	Naik → Turun
14	Kab Purwakarta	70,5	87,7	86,1	82,2	87,6	84,6	Fluktuatif
15	Kab Karawang	62,1	74,0	79,0	84,1	80,6	77,0	Naik → Turun
16	Kab Bekasi	70,5	84,3	87,8	88,7	88,3	85,9	Naik → Turun
17	KBB	55,6	70,8	77,0	77,8	81,8	78,2	Naik
18	Kab Pangandaran	-	-	89,1	85,8	91,8	87,6	Turun → Naik
19	Kota Bogor	71,1	80,5	82,3	78,6	78,9	77,1	Fluktuatif
20	Kota Sukabumi	65,0	75,8	84,6	83,6	79,7	77,9	Naik → Turun
21	Kota Bandung	71,5	84,8	86,3	87,7	82,0	80,1	Naik → Turun
22	Kota Cirebon	67,8	84,6	87,9	81,7	80,1	77,8	Naik → Turun
23	Kota Bekasi	75,8	84,7	85,0	89,2	84,1	82,0	Fluktuatif
24	Kota Depok	76,9	89,9	86,5	84,7	85,1	82,9	Fluktuatif
25	Kota Cimahi	75,1	86,1	85,6	84,2	81,0	79,1	Naik → Turun
26	Kota Tasikmalaya	56,3	70,1	77,3	67,6	76,5	73,0	Fluktuatif
27	Kota Banjar	72,4	92,6	88,3	87,4	87,2	83,2	Naik → Turun

Ket : *AKE 2000 kkal/kap/hari

**AKE 2150 kkal/kap/hari

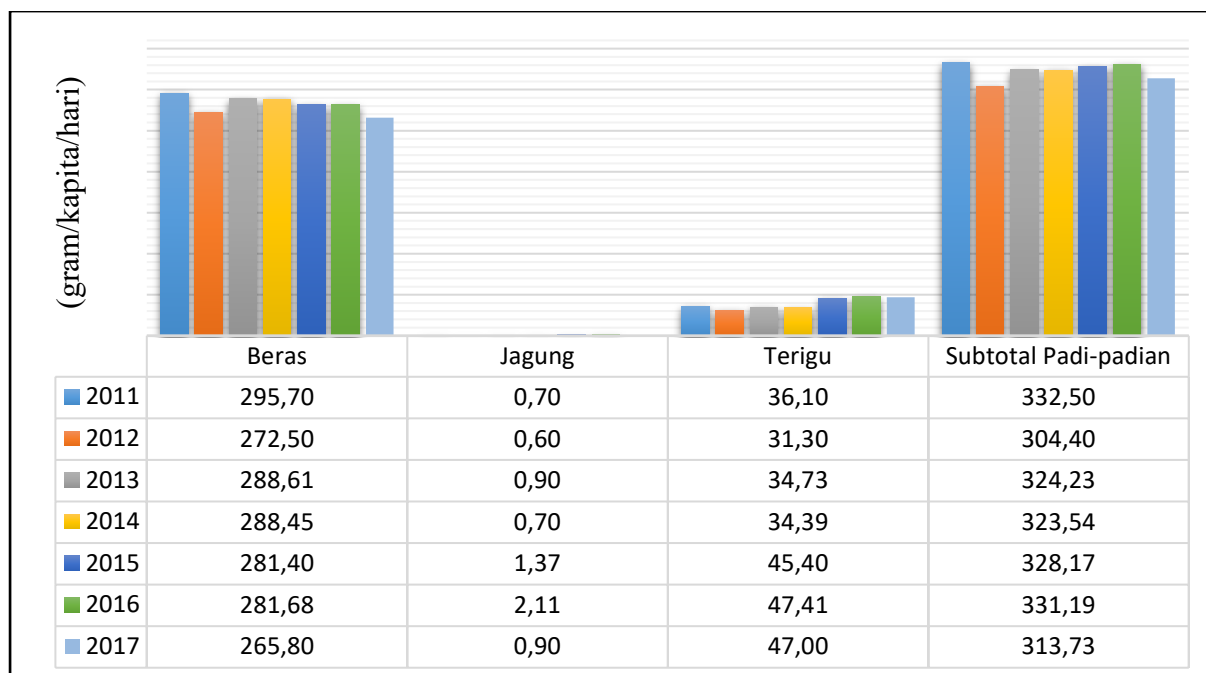
Sumber : DKPP Jawa Barat dalam Buku Direktori Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat 2018 dan Susenas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Data perkembangan skor PPH yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat masih menggunakan AKE 2.000 kkal/kap/hari. Terdapat 7 wilayah di Jawa Barat yang skor PPH nya konsisten meningkat tiap tahun. Tujuh wilayah tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, dua puluh wilayah lainnya memiliki perkembangan skor PPH yang fluktuatif. Pada tahun 2017, skor PPH tertinggi terjadi pada Kabupaten Indramayu dengan nilai 94,2 poin. Adapun skor PPH terendah terjadi pada Kabupaten Indramayu yakni 76,1 poin. Jika dihitung berdasarkan AKE 2.150 kkal/kap/hari, terjadi perubahan skor PPH pada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Skor PPH menggunakan AKE 2.150 kkal/kap/hari cenderung lebih rendah dibanding menggunakan AKE 2.000 kkal/kap/hari. Peta sebaran skor PPH Kabupaten/Kota di Jawa Barat menggunakan AKE 2.150 kkal/kap/hari disajikan pada gambar berikut.



Gambar 31. Sebaran Skor PPH Kabupaten/Kota Jawa Barat

Hanya Kabupaten Indramayu yang memiliki nilai skor PPH > 90 poin. Sementara itu, terdapat 15 wilayah dengan skor PPH 80-90 poin. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Banjar. Adapun 11 wilayah lainnya memiliki nilai skor PPH < 80 poin. Selanjutnya, perkembangan konsumsi pangan penduduk Jawa Barat disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

*Jenis Pangan Beras berasal Beras (beras lokal, kualitas unggul, impor), Beras ketan, Tepung beras, Padi-padian lainnya, Bihun, Bubur bayi kemasan, Lainnya, Kue basah, Nasi campur/rames, Nasi goreng, Nasi putih, Lontong/ketupat sayur.

Gambar 25. Perkembangan Konsumsi Padi-Padian Tahun 2011-2017

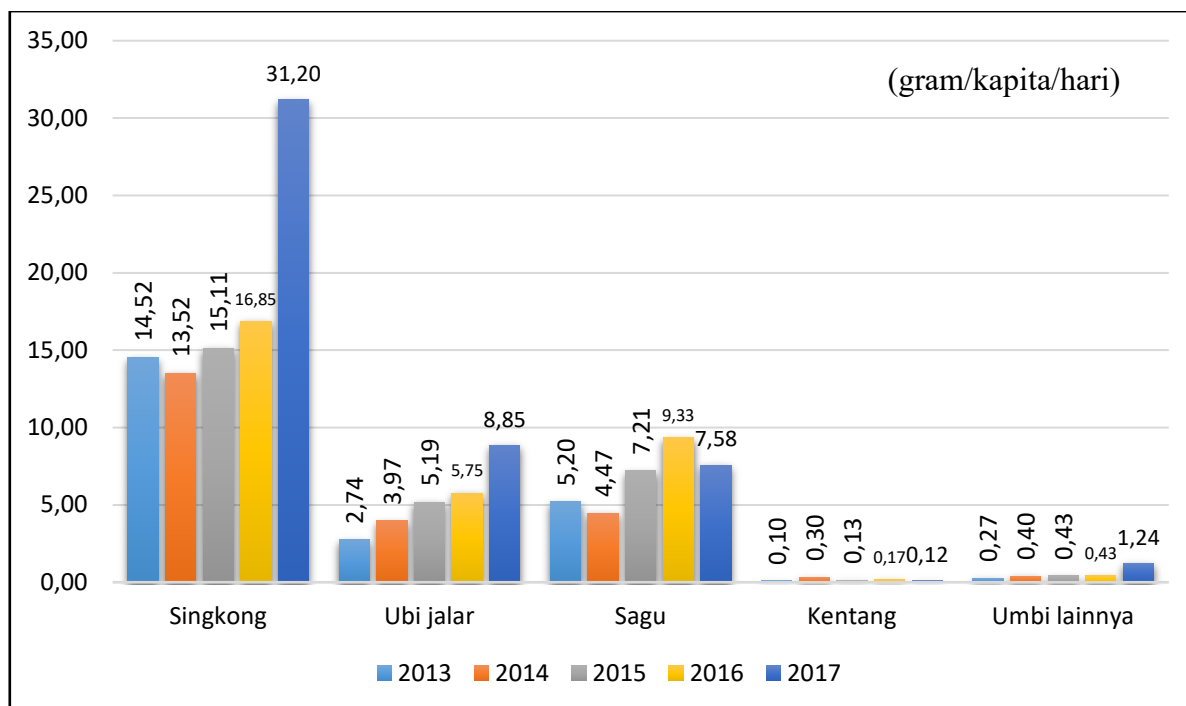
Gambar 32 menunjukkan perkembangan konsumsi padi-padian di Jawa Barat. Konsumsi pangan sumber karbohidrat didominasi oleh beras dan terigu. Konsumsi beras di Jawa Barat pada tahun 2016 sejumlah 281,68 g/kap/hari, sedangkan konsumsi terigu sebesar 47,41 g/kap/hari. Konsumsi beras cenderung menurun namun konsumsi terigu meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat 11 wilayah di Jawa Barat yang mengalami peningkatan konsumsi beras selama 2013 hingga 2017. Kabupaten Garut merupakan daerah dengan peningkatan konsumsi beras tertinggi di Jawa Barat. Sementara itu, sepuluh wilayah di Jawa Barat mengalami penurunan konsumsi beras. Meskipun cenderung mengalami penurunan, persentase AKE padi-padian Provinsi Jawa Barat (2.150 kkal/kap/hari) masih cukup tinggi dan melebihi angka ideal. Persentase AKE padi-padian Jawa Barat tahun 2017 mencapai 68,3%, sedangkan persentase AKE padi-padian Kabupaten/Kota di Jawa Barat berada pada rentang 51,8% - 70,9%.

Konsumsi beras penduduk Jawa Barat jika dikonversi menjadi satuan kg/kap/tahun sejak 2013-2017 berturut-turut sebesar 105,3; 105,3; 102,7; 102,8; dan 100,8. Laju penurunan konsumsi beras tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015 dan 2016-2017 yakni mencapai -2,47% dan -1,95%. Pemerintah menetapkan kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yang ditindaklanjuti dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal oleh Kementerian Pertanian dengan target terjadi penurunan konsumsi beras sebesar 1,5% per tahun dan kenaikan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar satu poin per tahun. Hal ini berarti pola pangan masyarakat Indonesia harus berdiversifikasi tidak hanya pangan pokok yang bertumpu pada beras tetapi juga diversifikasi pangan secara luas.

Potensi pangan lokal sumber karbohidrat di Indonesia telah banyak dan beragam jenisnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, adung, gembili, pisang, sukun, talas dan lain-lain. Berdasarkan target ini, Jawa Barat dapat dikatakan telah berhasil melakukan upaya diversifikasi/penganekaragaman pangan pada tahun 2015 dan 2017. Namun perlu diperhatikan bahwa berhasilnya penurunan konsumsi beras di Jawa Barat juga diikuti oleh peningkatan konsumsi terigu. Peningkatan konsumsi terigu tertinggi terjadi pada tahun 2014-2015 yakni dari 34,39 g/kap/hari menjadi 45,4 g/kap/hari. Hal ini mengindikasikan perlu adanya program yang menekankan pada penurunan konsumsi beras dan konsumsi terigu secara bersamaan.

Peningkatan konsumsi beras secara tidak langsung akan ikut meningkatkan emisi rumah kaca. Sumber emisi yang dibahas adalah karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan oksida nitrat (N₂O) dari kegiatan pertanian seperti pembakaran *biomass*, penanaman padi, *fermentasi enteric*, pengelolaan pupuk, tanah, dan sumber-sumber pertanian lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga PEACE (2007) menyebutkan bahwa di Indonesia, sektor pertanian menjadi sumber utama penghasil emisi metana, dengan angka 59 % dari total emisi Nasional. Emisi metana di sektor pertanian sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak efisien seperti pengairan yang berlebihan dan penyalahgunaan penggunaan pupuk.

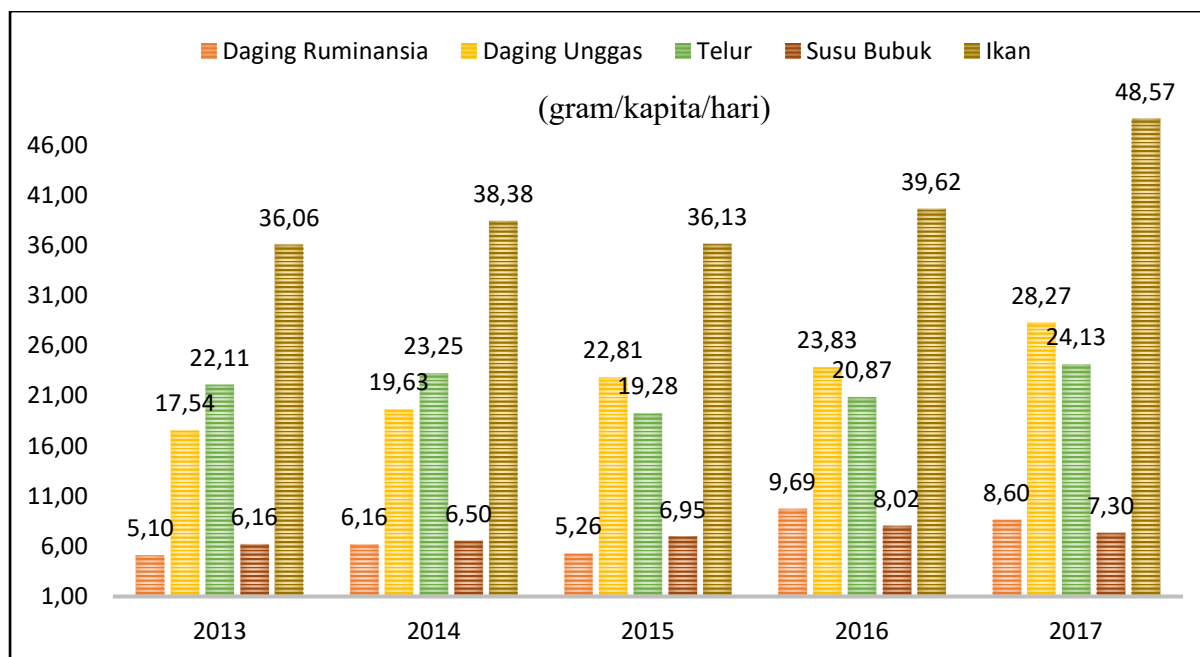
Tingkat partisipasi konsumsi jagung rendah disebabkan jagung hanya dikonsumsi secara langsung dalam bentuk jagung pipilan atau jagung dengan kelobotnya. Jagung lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan, sehingga masyarakat mengonsumsi jagung secara tidak langsung melalui ayam, itik, dan telur. Meskipun dikonsumsi dalam jumlah sedikit, konsumsi jagung cenderung meningkat setiap tahunnya. Seluruh wilayah di Jawa Barat kecuali Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan konsumsi jagung selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi jagung tertinggi terjadi di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tasikmalaya. Konsumsi terigu cenderung meningkat selama 5 tahun. Terdapat dua puluh lima wilayah di Jawa Barat yang mengalami peningkatan konsumsi terigu. Peningkatan konsumsi terigu tertinggi terjadi di Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, dua wilayah di Jawa Barat mengalami penurunan konsumsi terigu. Penurunan konsumsi terigu terjadi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 26. Perkembangan Konsumsi Umbi-Umbian Tahun 2013-2017

Singkong merupakan jenis umbi yang paling banyak dikonsumsi penduduk di Jawa Barat. Konsumsi singkong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Konsumsi pada tahun 2017 sebesar 31,2 g/kap/hari. seluruh wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi ubi kayu selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi ubi kayu tertinggi terjadi di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan. Peningkatan konsumsi ubi kayu terendah terjadi di Kota Depok, Kota Bandung, dan Kabupaten Majalengka. Meskipun mengalami peningkatan, konsumsi umbi-umbian di Provinsi Jawa Barat masih tergolong rendah. Persentase AKE ideal umbi-umbian adalah 6%, namun pada tahun 2017 Jawa Barat baru mencapai 2,8 %AKE. Adapun persentase AKE umbi-umbian Kabupaten/Kota di Jawa Barat berada pada rentang 1,3% -3,9%. Selanjutnya perkembangan konsumsi pangan hewani disajikan pada Gambar 34 berikut.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 27. Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani Tahun 2013-2017

Protein merupakan makronutrien kedua paling dibutuhkan setelah energi. Protein dalam pangan menyediakan asam amino yang tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh. Sebanyak satu setengah dari berat kering sel adalah protein. Protein berfungsi sebagai komponen struktural, biokatalis (sebagai enzim), antibodi, pelumas (*lubricants*), *messengers* (dalam bentuk hormon dan sitokin), *receptors*, dan sebagai hambatan atau *transporter* (Carolyn, 1998).

Pangan hewani yang banyak dikonsumsi penduduk Jawa Barat adalah ikan diikuti oleh daging unggas, telur, daging ruminansia, dan susu. Konsumsi pangan hewani menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya. Persentase AKE pangan hewani di Jawa Barat juga sudah memenuhi angka ideal yakni 12,1%. Seluruh wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi ikan selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi ikan tertinggi terjadi di Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan konsumsi ikan terendah terjadi di Kabupaten Majalengka, Kota Bogor, dan Kota Banjar. Konsumsi ikan pada tahun 2017 di Jawa Barat sebesar 48,57 g/kap/hari.

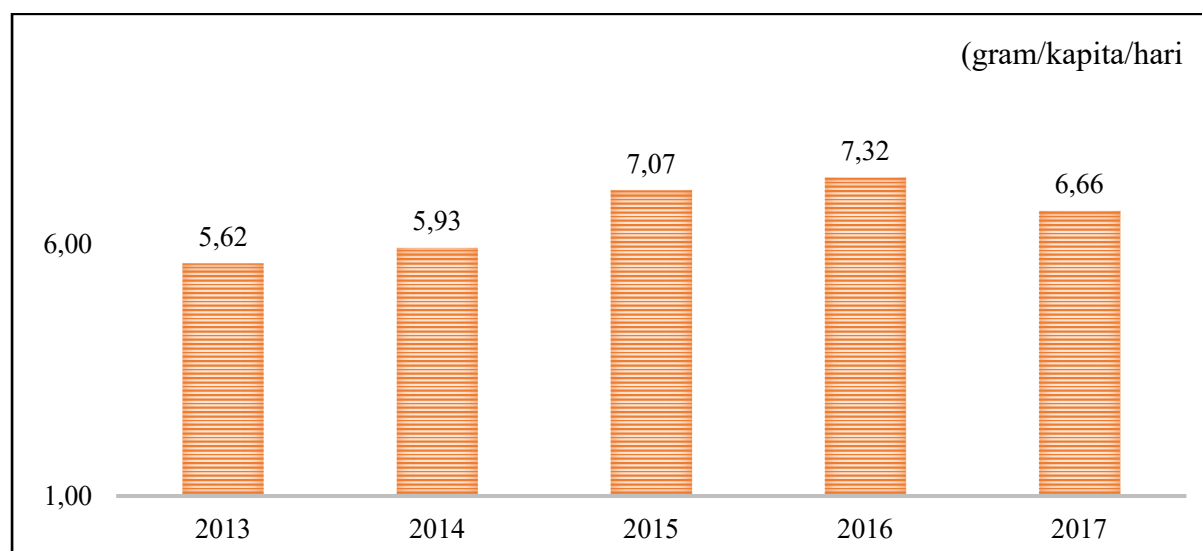
Seluruh wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi daging unggas selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi daging unggas tertinggi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bekasi. Peningkatan konsumsi daging unggas terendah terjadi di Kota Banjar, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Konsumsi daging unggas tahun 2017 sebesar 28,27 g/kap/hari. Sama halnya dengan daging unggas, seluruh wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi telur selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi telur tertinggi terjadi di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Tasikmalaya. Peningkatan konsumsi telur terendah terjadi di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang. Konsumsi telur di Jawa Barat sebesar 24,13 g/kap/hari.

Daging ruminansia merupakan jenis protein hewani terbanyak ke-4 yang dikonsumsi penduduk Jawa Barat, yaitu sebesar 8,6 g/kap/hari. Seluruh wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi daging ruminansia selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi daging ruminansia tertinggi terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Indramayu, dan Kota Tasikmalaya. Peningkatan konsumsi daging ruminansia terendah terjadi di Kota Bogor, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Di satu sisi, peningkatan konsumsi daging ruminansia dapat meningkatkan pemenuhan kecukupan protein penduduk. Namun di sisi lain, peningkatan konsumsi daging ruminansia juga ikut menyumbang pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim.

Hal tersebut terkait dengan sektor peternakan menjadi salah satu penyumbang gas efek rumah kaca. Darbandi dan Saghaian (2018) menyebutkan bahwa sektor peternakan menyumbang sekitar 22% dari total emisi global. Daging sapi dan susu adalah sumber utama emisi gas rumah kaca di antara produk ternak lainnya. Gerber *et al.* (2013) menyebutkan bahwa daging ruminansia menyumbang sekitar 35,3% emisi gas rumah kaca dari total emisi yang dikeluarkan oleh ternak. Produksi ternak berkontribusi terhadap deforestasi dan karbon dioksida (CO₂) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, penggembalaan hewan ternak akan menghasilkan degradasi atau menebangi hutan untuk menyediakan lebih banyak ruang peternakan. Secara tidak langsung dari meningkatnya permintaan pakan ternak yang mengarah pada perluasan padang rumput melalui penggundulan hutan. Daging ruminansia (sapi, kambing, dan domba) menghasilkan gas metana yang keluar dari sendawa dan kotoran ternak. Gas metana berujung menghasilkan karbon dioksida yang kemudian ikut meningkatkan efek rumah kaca. Selanjutnya perkembangan konsumsi susu disajikan pada Gambar 35 sebagai berikut:

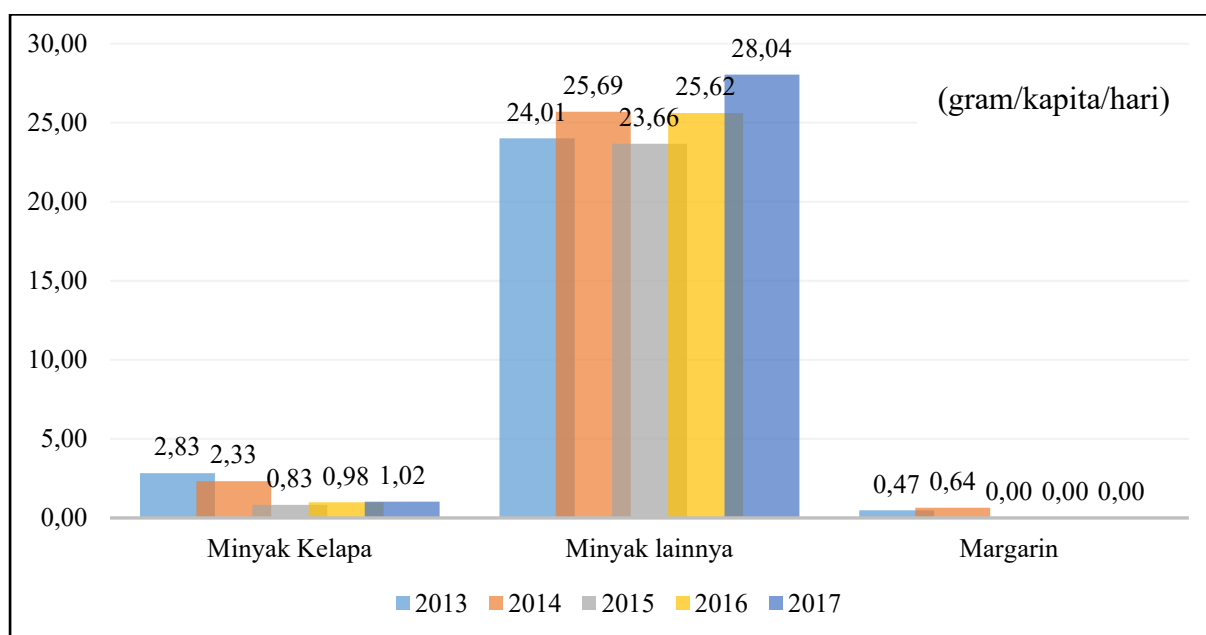


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 28. Perkembangan Konsumsi Susu Cair Tahun 2013-2017

Susu merupakan makanan alami yang hampir sempurna. Sebagian besar zat gizi esensial ada dalam susu, diantaranya protein, kalsium, fosfor, vitamin A, dan vitamin B1. Susu merupakan sumber kalsium paling baik, karena di samping kadar kalsium yang tinggi, laktosa di dalam susu membantu absorpsi susu di dalam saluran cerna (Almatsier, 2004). Sumber susu yang paling umum digunakan adalah sapi. Namun ada juga yang menggunakan ternak lain, seperti domba, kambing, dan kerbau.

Susu juga merupakan jenis protein hewani yang paling mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Namun, tingkat konsumsinya relatif rendah. Konsumsi susu bubuk di Jawa Barat sebesar 7,3 g/kap/hari sementara konsumsi susu cair sebesar 6,66 g/kap/hari pada tahun 2017. Peningkatan konsumsi susu tertinggi terjadi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Penurunan konsumsi susu terjadi di tiga wilayah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Sumedang. Sama halnya dengan daging sapi, produksi susu juga menyumbang pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim. FAO (2013) menyebutkan bahwa susu menyumbang sekitar 30,11% emisi gas rumah kaca dari total emisi yang dikeluarkan oleh ternak. Sehingga pemenuhan kebutuhan protein pada manusia dapat disiasati dengan mengonsumsi pangan nabati kaya protein seperti kacang-kacangan. Sementara itu, perkembangan konsumsi minyak dan lemak disajikan pada Gambar 36 sebagai berikut:

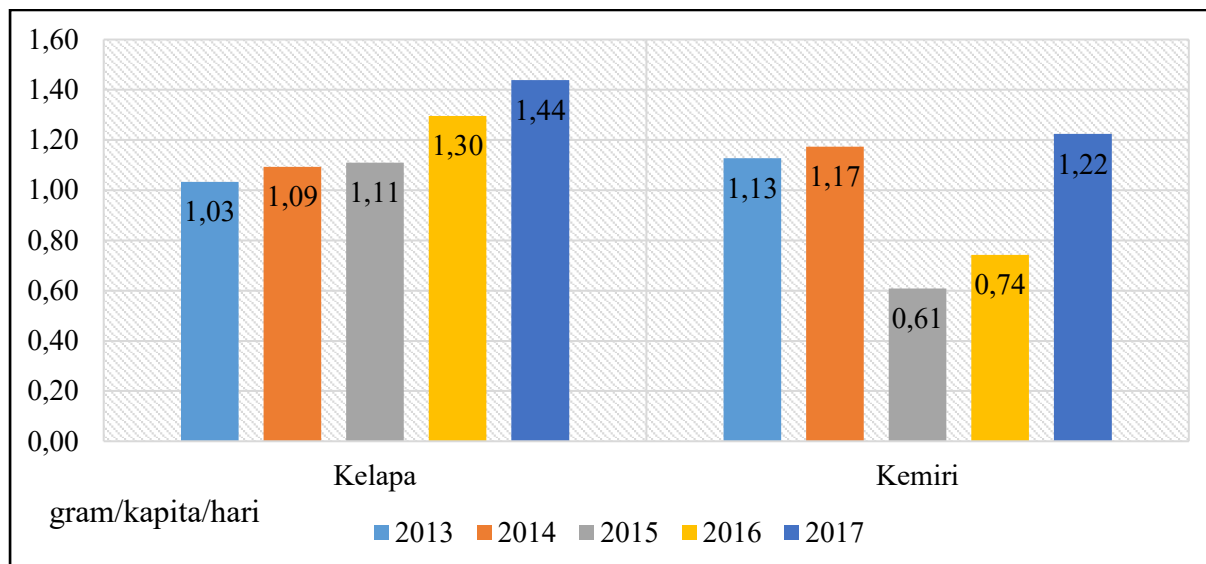


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 29. Perkembangan Konsumsi Minyak Dan Lemak Tahun 2013-2017

Konsumsi minyak lemak di Jawa Barat cenderung berlebih. Konsumsi tertinggi adalah pada minyak lainnya (minyak sawit) yang digunakan penduduk untuk mengolah makanan dengan cara menggoreng dan menumis. Konsumsi minyak sawit tahun 2017 sebesar 28,04 g/kap/hari. Peningkatan konsumsi minyak tertinggi terjadi di Kabupaten Tasikmalaya,

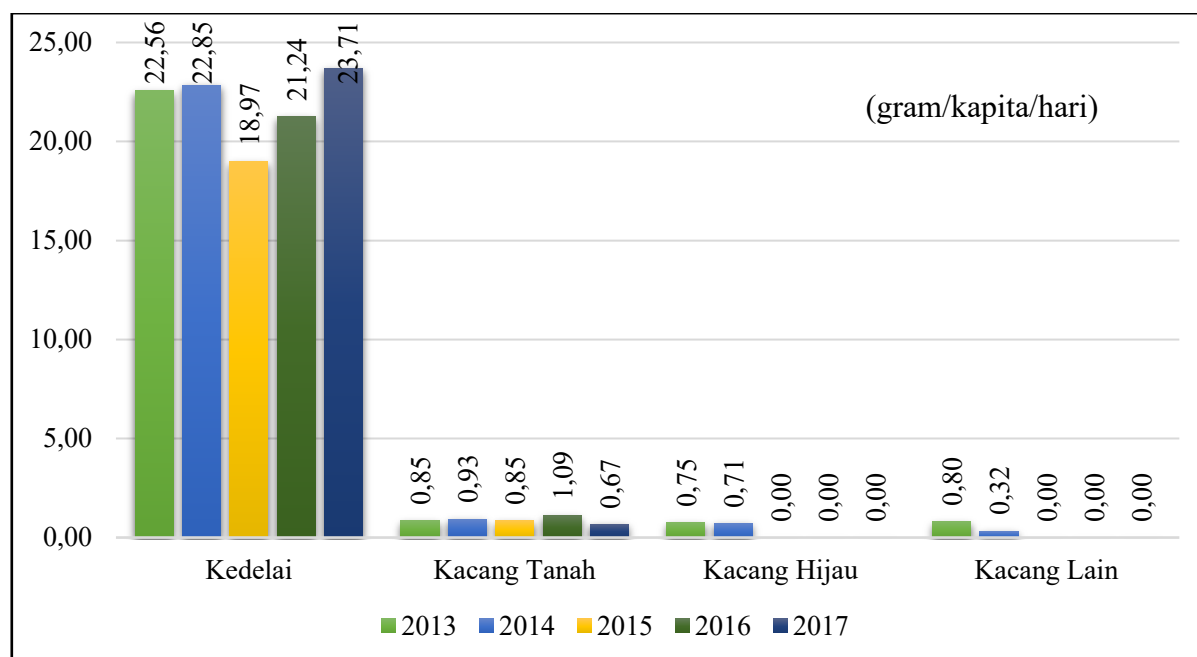
Kota Cirebon, dan Kota Bekasi. Selain pangan sumber minyak dan lemak, disajikan pula perkembangan konsumsi pangan jenis buah/biji berminyak. Kelompok pangan buah/biji berminyak terdiri dari kelapa dan kemiri. Adapun perkembangan konsumsi pangan jenis buah/biji berminyak di Jawa Barat disajikan pada Gambar 37.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 30. Perkembangan Konsumsi Buah Biji Berminyak Tahun 2013-2017

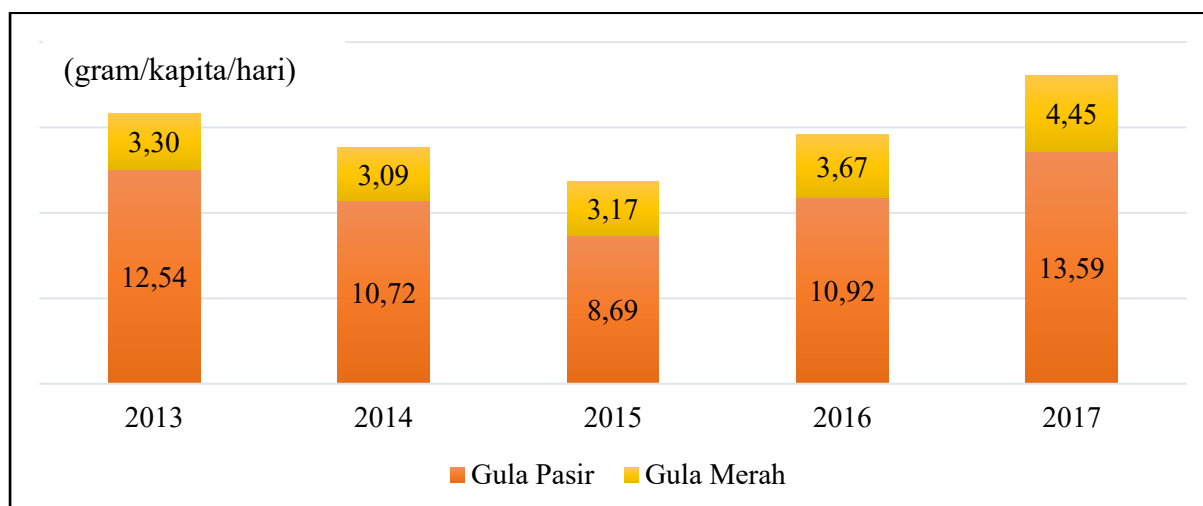
Konsumsi buah/biji berminyak lebih rendah dari standar ideal. Seluruh wilayah di Jawa Barat kecuali Kota Bekasi mengalami peningkatan konsumsi kelapa selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi kelapa tertinggi terjadi di Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Sukabumi. Adapun perkembangan konsumsi kacang-kacangan penduduk Jawa Barat disajikan pada Gambar 38 sebagai berikut:



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 31. Perkembangan Konsumsi Kacang-Kacangan Tahun 2013-2017

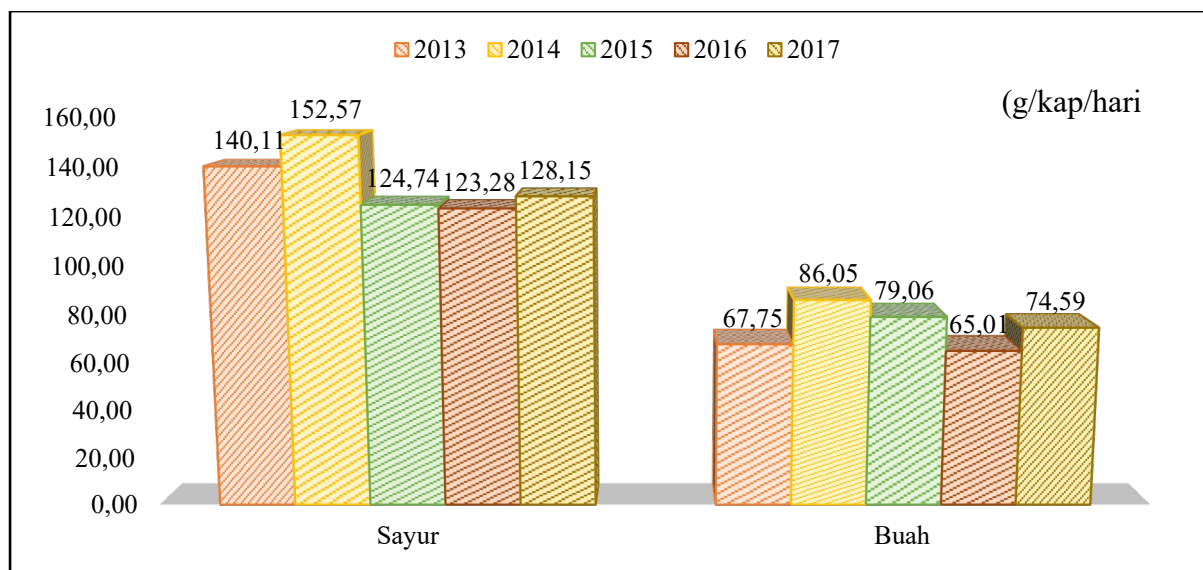
Kelompok pangan kacang-kacangan terdiri dari kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang lainnya. Kedelai merupakan jenis kacang-kacangan dengan konsumsi pangan tertinggi di Jawa Barat, digunakan sebagai bahan baku tempe dan tahu. Konsumsi kedelai pada tahun 2017 sebesar 23,71 g/kap/hari dan jumlah ini masih lebih rendah dari standar ideal. Pada tahun 2017, persentase AKE konsumsi kacang-kacangan Jawa Barat baru mencapai 2,9% dari standar ideal 5%. Meskipun tingkat konsumsinya rendah, namun menunjukkan tren yang meningkat. Sebanyak tujuh belas wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi kacang kedelai selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi kacang kedelai tertinggi terjadi di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, sepuluh wilayah lainnya mengalami penurunan konsumsi kacang kedelai. Penurunan konsumsi tertinggi terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Selanjutnya perkembangan konsumsi gula disajikan pada Gambar 39 sebagai berikut:



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 32. Perkembangan Konsumsi Gula Tahun 2013-2017

Konsumsi gula pasir cenderung meningkat setiap tahunnya namun jumlahnya masih di bawah standar ideal. seluruh wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi gula pasir selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi gula pasir tertinggi terjadi di Kabupaten Pangandaran, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Peningkatan konsumsi gula pasir terendah terjadi di Kabupaten Kuningan, Kota Depok, dan Kota Bogor. Sama halnya dengan gula pasir, konsumsi gula merah juga meningkat di seluruh Kabupaten/Kota. Peningkatan konsumsi gula merah tertinggi terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Bekasi. Sementara itu, perkembangan konsumsi sayur dan buah disajikan pada Gambar 40 sebagai berikut.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 2018

Gambar 33. Perkembangan Konsumsi Sayur Buah Tahun 2013-2017

Konsumsi sayur buah di Jawa Barat masih belum memenuhi standar ideal. Pada tahun 2017, persentase AKE sayur dan buah Jawa barat baru mencapai 4,4% dari standar ideal 6%. Konsumsi sayur buah tertinggi terjadi pada tahun 2014 kemudian menurun pada tahun 2015 dan 2016 dan kembali meningkat pada tahun 2017. Konsumsi sayuran pada tahun 2017 sebesar 128,15 g/kap/hari. Sebanyak dua puluh satu wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi sayur mayur selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi sayur tertinggi terjadi di Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu, enam wilayah lainnya mengalami penurunan konsumsi sayur mayur. Penurunan konsumsi tertinggi terjadi di Kabupaten Subang, Kota Cimahi, dan Kota Sukabumi.

Sayuran merupakan pilihan utama penduduk Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Konsumsi buah-buahan lebih sedikit daripada sayuran, sebesar 74,59 g/kap/hari pada tahun 2017. Sebanyak dua puluh tiga wilayah di Jawa Barat mengalami peningkatan konsumsi buah selama 2013 hingga 2017. Peningkatan konsumsi buah tertinggi terjadi di Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Tasikmalaya. Sementara itu, empat wilayah lainnya mengalami penurunan konsumsi buah, yaitu Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Cimahi.

4. 4. Masalah Gizi

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi, yang dibedakan menjadi status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada tingkat yang lebih tinggi (Almatsier, 2004).

Status gizi balita dikategorikan menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan

Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Ketiga nilai indeks status gizi ini dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO yang diimplementasikan dengan *Z-score*. *Z-score* adalah nilai simpangan BB atau TB dari nilai BB atau TB normal menurut baku pertumbuhan WHO. Kategori BB/U jika memiliki nilai kurang dari *Z-score* yang ditentukan, maka status gizi balita tersebut tergolong *underweight* (berat badan kurang atau gizi kurang). Prevalensi balita yang tergolong *underweight* di Jawa Barat disajikan dalam Tabel 26 sebagai berikut.

Tabel 22 Prevalensi balita *underweight* penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2017

Prevalensi <i>Underweight</i> Balita (%)	
Kabupaten/Kota	Tahun 2017
Kabupaten Bogor	15,20
Kabupaten Sukabumi	14,80
Kabupaten Cianjur	15,20
Kabupaten Bandung	18,60
Kabupaten Garut	15,70
Kabupaten Tasikmalaya	14,30
Kabupaten Ciamis	13,80
Kabupaten Kuningan	11,60
Kabupaten Cirebon	19,60
Kabupaten Majalengka	16,40
Kabupaten Sumedang	13,10
Kabupaten Indramayu	18,40
Kabupaten Subang	15,10
Kabupaten Purwakarta	16,50
Kabupaten Karawang	18,80
Kabupaten Bekasi	16,20
Kabupaten Bandung Barat	16,70
Kabupaten Pangandaran	12,20
Kota Bogor	11,10
Kota Sukabumi	9,20
Kota Bandung	11,50
Kota Cirebon	21,90
Kota Bekasi	11,10
Kota Depok	8,60
Kota Cimahi	14,60
Kota Tasikmalaya	15,20
Kota Banjar	17,40
Jawa Barat	15,10

Sumber : Penilaian Status Gizi, Kementerian Kesehatan RI 2018

Underweight merupakan suatu keadaan kekurangan dan/atau ketidakseimbangan gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas fisik, berfikir, dan semua hal yang terkait tumbuh kembang. Dampak lainnya yang dialami dari *underweight* yaitu penurunan daya tahan, hilangnya masa hidup sehat balita, serta dampak yang lebih serius seperti kecacatan, tingginya angka kesakitan dan percepatan kematian. *Underweight* ditandai dengan indikator BB/U berada pada *Z-score* < -3,0 SD untuk gizi buruk dan -3,0 s.d -2,0 SD untuk gizi kurang. Berdasarkan Tabel 21, diketahui bahwa, Kota Cirebon merupakan wilayah dengan prevalensi *underweight* balita tertinggi di Jawa Barat yakni 21,90%. Sementara itu, prevalensi *underweight* terendah terjadi di Kota Depok yakni 8,60%. Selanjutnya, prevalensi *wasting* balita penduduk di Jawa Barat disajikan dalam Tabel 27 sebagai berikut.

Tabel 23. Prevalensi Balita *Wasting* Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Prevalensi <i>Wasting</i> Balita (%)	
Kabupaten/Kota	Tahun 2017
Kabupaten Bogor	4,6
Kabupaten Sukabumi	4,4
Kabupaten Cianjur	3,2
Kabupaten Bandung	4,6
Kabupaten Garut	4,0
Kabupaten Tasikmalaya	4,8
Kabupaten Ciamis	5,5
Kabupaten Kuningan	5,5
Kabupaten Cirebon	13,8
Kabupaten Majalengka	7,7
Kabupaten Sumedang	5,0
Kabupaten Indramayu	9,0
Kabupaten Subang	8,3
Kabupaten Purwakarta	6,6
Kabupaten Karawang	10,7
Kabupaten Bekasi	11,7
Kabupaten Bandung Barat	8,2
Kabupaten Pangandaran	4,1
Kota Bogor	4,0
Kota Sukabumi	5,6
Kota Bandung	3,9
Kota Cirebon	10,6
Kota Bekasi	7,5
Kota Depok	5,4
Kota Cimahi	5,6
Kota Tasikmalaya	3,5
Kota Banjar	7,4
Jawa Barat	6,4

Sumber : Penilaian Status Gizi, Kementerian Kesehatan RI 2018

Wasting merupakan masalah gizi akut pada anak usia 0-59 bulan yang ditandai dengan indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) berada pada $z\text{-score} < -3,0$ SD untuk sangat kurus dan $3,0 \text{ s.d} < -2,0$ SD untuk kurus. *Wasting* dapat disebabkan oleh asupan zat gizi yang kurang cukup dan adanya penyakit, khususnya yang berhubungan dengan infeksi yang mengganggu pencernaan. Dampak *wasting* adalah anak mengalami penurunan daya eksplorasi terhadap lingkungannya, peningkatan frekuensi menangis, kurang bergaul dengan sesama anak, kurang perasaan gembira, dan cenderung menjadi apatis. Dalam jangka panjang, anak yang mengalami *wasting* juga mengalami gangguan kognitif, penurunan prestasi belajar, gangguan perilaku bahkan peningkatan resiko kematian. Berdasarkan WHO

(2010), *wasting* ditetapkan sebagai masalah kesehatan masyarakat kategori rendah apabila prevalensinya <5%, kategori sedang apabila prevalensinya 5-10%, kategori serius apabila prevalensinya antara 10,0-14,0% dan kategori kritis apabila prevalensinya $\geq 15,0\%$.

Berdasarkan Tabel 27, prevalensi balita *wasting* Jawa Barat bervariasi sesuai wilayah. Prevalensi *wasting* tertinggi terjadi di Kabupaten Cirebon yakni sebesar 13,8%, sedangkan prevalensi terendah terjadi di Kabupaten Cianjur yakni sebesar 3,2%. Sementara itu, prevalensi *wasting* Jawa Barat sebesar 6,4%. Status gizi selanjutnya adalah balita pendek (*stunting*). Prevalensi balita *stunting* penduduk Jawa Barat disajikan dalam Tabel 28 sebagai berikut:

Tabel 24. Prevalensi Balita *Stunting* Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Prevalensi Balita <i>Stunting</i> (%)	
Kabupaten/Kota	Tahun 2017
Kabupaten Bogor	28,50
Kabupaten Sukabumi	37,60
Kabupaten Cianjur	35,70
Kabupaten Bandung	38,70
Kabupaten Garut	43,10
Kabupaten Tasikmalaya	33,40
Kabupaten Ciamis	29,00
Kabupaten Kuningan	28,50
Kabupaten Cirebon	25,60
Kabupaten Majalengka	30,20
Kabupaten Sumedang	28,10
Kabupaten Indramayu	29,90
Kabupaten Subang	25,50
Kabupaten Purwakarta	30,80
Kabupaten Karawang	26,10
Kabupaten Bekasi	23,70
Kabupaten Bandung Barat	34,30
Kabupaten Pangandaran	28,10
Kota Bogor	25,00
Kota Sukabumi	23,10
Kota Bandung	25,80
Kota Cirebon	26,50
Kota Bekasi	15,00
Kota Depok	14,90
Kota Cimahi	25,60
Kota Tasikmalaya	38,20
Kota Banjar	28,00
Jawa Barat	29,20

Sumber : Penilaian Status Gizi, Kementerian Kesehatan RI 2018

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (TB/U). *Stunting* memiliki konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak. Konsekuensi jangka pendek yang dapat dialami adalah bahwa *stunting* meningkatkan resiko infeksi sebagai dampak negatif fungsi epitel dan respon imun berubah. Konsekuensi lainnya adalah perkembangan psikomotorik dan mental yang buruk, dan peningkatan biaya pelayanan kesehatan karena anak *stunting* lebih rentan terhadap penyakit menular (Stewart *et al.* 2013).

Stunting merupakan masalah gizi yang menjadi perhatian secara global karena terdapat sekitar 22,8% atau 150,8 juta anak di seluruh dunia yang menderita *stunting*. WHO (2010) mengklasifikasikan *stunting* sebagai masalah kesehatan masyarakat rendah apabila prevalensi <20,0%, sedang apabila 20,0 – 29,0 %, tinggi apabila 30,0% - 39,0%, dan sangat tinggi apabila $\geq 40.0\%$. *Stunting* juga merupakan masalah gizi prioritas di Indonesia karena prevalensinya paling tinggi dibandingkan dengan masalah gizi lainnya. Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa *stunting* di Indonesia terkategori masalah masyarakat kategori tinggi yakni 30,8%. Oleh karena itu, indikator dan target pencegahan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019, angka *stunting* Nasional diharapkan turun menjadi <28% pada tahun 2019. Pada rancangan RPJMN 2020-2024 teknokratik, *stunting* ditargetkan untuk turun menjadi 19% di tahun 2024.

Menurut WHO, suatu wilayah dikatakan kategori baik bila prevalensi balita *stunting* kurang dari 20% dan prevalensi *wasting* kurang dari 5%. Sebaliknya, suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita *stunting* lebih dari 20% dan prevalensi *wasting* 5% atau lebih. Berdasarkan Tabel 28, diketahui terdapat 25 (dua puluh lima) wilayah Jawa Barat yang memiliki prevalensi balita *stunting* lebih dari 20%. Sementara itu pada Tabel 27, terdapat 17 (tujuh belas) wilayah Jawa Barat yang memiliki prevalensi *wasting* 5% atau lebih. Ke-17 wilayah termasuk ke dalam wilayah dengan prevalensi balita *stunting* lebih dari 20%, sehingga dikatakan wilayah yang mengalami masalah gizi akut.

Wilayah yang mengalami masalah gizi akut di Jawa Barat terdiri dari 11 (sebelas) Kabupaten yaitu Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan Bandung Barat serta 6 (enam) Kota yaitu, Sukabumi, Bekasi, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi dan Banjar. Sementara itu, angka prevalensi *stunting* Jawa Barat tahun 2017 mencapai 29,20% dan termasuk dalam kategori masalah kesehatan masyarakat tingkat sedang menurut WHO 2010. Selain kekurangan gizi, kelebihan gizi juga menjadi masalah yang umum. Kelebihan gizi merupakan istilah untuk konsumsi energi atau zat gizi yang melebihi kebutuhan. Prevalensi obesitas (18+) penduduk Jawa Barat tahun 2017 disajikan dalam Tabel 29 sebagai berikut.

Tabel 25 Prevalensi obesitas (18+) penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2017

Prevalensi Obesitas (18+) (%)	
Kabupaten/Kota	Tahun 2017
Kabupaten Bogor	44,40
Kabupaten Sukabumi	44,30
Kabupaten Cianjur	46,00
Kabupaten Bandung	44,10
Kabupaten Garut	45,00
Kabupaten Tasikmalaya	42,50
Kabupaten Ciamis	45,10
Kabupaten Kuningan	46,80
Kabupaten Cirebon	43,80
Kabupaten Majalengka	45,10
Kabupaten Sumedang	44,90
Kabupaten Indramayu	46,60
Kabupaten Subang	45,70
Kabupaten Purwakarta	44,30
Kabupaten Karawang	48,50
Kabupaten Bekasi	48,90
Kabupaten Bandung Barat	39,30
Kabupaten Pangandaran	40,50
Kota Bogor	44,60
Kota Sukabumi	47,40
Kota Bandung	51,10
Kota Cirebon	44,40
Kota Bekasi	47,00
Kota Depok	52,80
Kota Cimahi	49,30
Kota Tasikmalaya	43,60
Kota Banjar	35,90
Jawa Barat	45,10

Sumber : Penilaian Status Gizi, Kementerian Kesehatan RI 2018

Obesitas adalah proses akumulasi lemak (trigliserida) dalam jaringan adiposa sebagai akibat energi yang dikonsumsi melebihi energi yang dibutuhkan (Brody 1999). Obesitas terjadi sebagai akibat dari kombinasi paparan lingkungan obesogenik, yaitu lingkungan yang menyediakan dan mendorong konsumsi makanan padat energi dan kebiasaan yang cenderung pasif (*sedentary behaviour*). Penurunan obesitas pada orang dewasa dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan turun menjadi 15,4% di tahun 2019 sedangkan dalam rancangan ternokratik RPJMN 2020-2024, target penurunan obesitas adalah 21,8%. Target baru tersebut menyesuaikan dengan kondisi obesitas di Indonesia yang masih tinggi berdasarkan hasil Riskesdas 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa prevalensi obesitas di Jawa Barat berkisar 40-50%. Prevalensi obesitas terbesar terjadi di Kota Depok sebesar 52,80%, sedangkan prevalensi terendah terjadi di Kabupaten Bandung Barat sebesar 39,30%. Sementara itu, prevalensi obesitas Provinsi Jawa Barat mencapai angka 45,10%. Dari keempat masalah gizi di Provinsi Jawa Barat, penurunan *stunting* merupakan isu prioritas pembangunan Nasional. Penanganan *stunting* menjadi isu prioritas dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 sekaligus menjadi salah satu *major project* pembangunan 2020-2024. *Major project* merupakan *project* strategis pembangunan yang dilaksanakan secara lintas sektor dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Penyusunan *major project* dimaksudkan untuk memperkuat fokus dan pengendalian program.

Penanganan *stunting* akan sekaligus berdampak pada penanganan *wasting*, *underweight* dan obesitas pada dewasa. *Stunting* terkait dengan *underweight* maupun *wasting* karena anak dengan *stunting* memiliki resiko mengalami *underweight* dan/atau *wasting* secara bersamaan (Myatt *et al.* 2018). Selain itu, permasalahan *underweight* dan *wasting* pada balita jika tidak ditangani dapat meningkatkan resiko anak menjadi *stunting* hingga usia lima tahun. Hal ini dikarenakan anak yang *underweight* ataupun *wasting* identik dengan nafsu makan yang rendah serta rentan terhadap infeksi penyakit. Data di Jawa Barat menunjukkan bahwa terjadinya masalah *stunting* diikuti dengan masalah *underweight* dan *wasting*.

Selain berkorelasi dengan masalah *undernutrition* lainnya, *stunting* juga sangat terkait dengan masalah kelebihan gizi pada orang dewasa. Anak dengan riwayat *stunting* lebih beresiko menjadi gemuk dan obesitas hingga penyakit tidak menular ketika dewasa, sebagai akibat perubahan fisiologis *stunting* (Stewart *et al.* 2013; Myatt *et al.* 2018). Kejadian *stunting* pada balita dapat menyebabkan rendahnya kecerdasan (*Intelligence Quotient/IQ*). Anak yang *stunting* mempunyai nilai rata-rata IQ 11 poin lebih rendah dari anak normal (UNICEF 1998). Ketika anak menjadi dewasa, kemampuan kognitif yang lebih rendah akan berdampak pada pendapatan yang lebih rendah, sehingga investasi negara untuk sumber daya manusia menjadi menurun.

Menurut hasil penelitian Kusumawardhani dan Martianto (2011) didapatkan nilai *slope* yang negatif antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan prevalensi gizi buruk balita. Hal tersebut memiliki arti semakin tinggi nilai PDRB per kapita di suatu wilayah maka akan semakin rendah prevalensi gizi buruk di wilayah tersebut. Berdasarkan penelitian Renyoet (2016), besar potensi ekonomi yang hilang akibat masalah *stunting* pada balita di Jawa Barat, ketika dewasa dan mengalami kehilangan produktivitas sebesar 2% adalah Rp365 miliar, sedangkan jika penurunan produktivitas sebesar 9% adalah Rp1.644 miliar. Oleh karena itu, penanganan *stunting* akan sekaligus meningkatkan produktivitas SDM sehingga PDRB Jawa Barat ikut meningkat.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Merujuk pada pola pikir *United Nations Children's Fund* (UNICEF), masalah *stunting* terutama disebabkan karena ada pengaruh dari pola asuh, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, lingkungan, dan ketahanan pangan. Dilihat dari faktor ibu, *stunting* dapat disebabkan oleh ibu dengan

anemia yang kemudian memiliki resiko melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR). Berdasarkan analisis determinan pangan dan gizi, diketahui bahwa anemia pada ibu hamil dan bayi BBLR di Jawa Barat memiliki prevalensi yang rendah.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jawa Barat dalam Dokumen Profil Kesehatan Jawa Barat 2017, persentase BBLR di Jawa Barat pada tahun 2017 adalah 2,4%, Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan RI dalam Dokumen Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017, menyebutkan bahwa persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah darah (TTD) ≤ 90 tablet selama kehamilannya adalah 43,6%, sedangkan ibu hamil yang mendapat TTD >90 tablet selama kehamilan sebanyak 47,4%. Oleh karena itu, kedua masalah tersebut dianggap bukan menjadi penyebab utama dari permasalahan gizi di Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan gizi balita di Jawa Barat cenderung disebabkan oleh faktor-faktor pada periode setelah kelahiran anak, antara lain asupan makanan, pola asuh serta akses pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan yang belum optimal.

Pola asuh (*caring*) termasuk di dalamnya adalah inisiasi menyusui dini (IMD), menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MPASI) sampai dengan 2 tahun merupakan proses untuk membantu tumbuh kembang bayi dan anak. Masa ini merupakan masa kehidupan yang sangat penting atau masa periode emas pada anak sehingga penerapan pola asuh orang tua yang baik dan benar sangat penting dilakukan. Kualitas pola asuh dapat dicerminkan dengan faktor pendidikan, baik formal maupun informal. Tingkat pendidikan penduduk dapat diukur dengan Rata Rata Sekolah (RLS), yaitu jumlah rata-rata tahun pendidikan yang telah diterima oleh penduduk usia lebih dari 25 tahun. RLS menjelaskan tingkat pengetahuan dan/atau kemampuan rata-rata penduduk untuk memperoleh pengetahuan.

Pada tahun 2018, RLS penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 8.15 tahun. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat baru menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8 (belum tamat). Capaian tersebut masih kurang karena belum berhasil mencapai target program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

Tingkat pendidikan umumnya akan sejalan dengan tingkat pengetahuan gizi. Hasil penelitian Worsley *et al.*, (2004) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan diasosiasikan dengan konsumsi makanan yang lebih beragam. Pengetahuan gizi berkaitan dengan pola asuh pemberian makanan oleh ibu kepada anaknya. Hasil penelitian Yabanci *et al.* (2014) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan gizi ibu memengaruhi kebiasaan makan anak. Selanjutnya, hasil penelitian Hossain dan Khan (2017) menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan orang tua berhubungan dengan rendahnya resiko *stunting* dan *underweight* ($p < 0.001$). Terdapat penurunan 31% resiko *stunting* ketika ibu dapat mencapai pendidikan minimal tingkat 10 (RR=0.69) dan 27% resiko *stunting* ketika ayah mencapai pendidikan minimal tingkat 10 (RR=0.73) atau setara dengan pendidikan sekolah menengah atas tingkat pertama. Terdapat penurunan 25% resiko *underweight* ketika ibu dapat mencapai pendidikan minimal tingkat 10 (RR=0.75) dan 17% resiko

underweight ketika ayah mencapai pendidikan minimal tingkat 10 (RR=0.83) atau setara dengan pendidikan sekolah menengah atas tingkat pertama.

Pola asuh (*caring*) termasuk di dalamnya adalah inisiasi menyusui dini (IMD), menyusui eksklusif sampai dengan 6 bulan, dan pemberian ASI dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MPASI) sampai dengan 2 tahun merupakan proses untuk membantu tumbuh kembang bayi dan anak. Data menunjukkan bahwa praktek inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif masih belum optimal dan belum merata di setiap kabupaten. Kementerian Kesehatan RI dalam Dokumen Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 menyatakan bahwa persentase bayi yang memperoleh ASI eksklusif pada tahun 2017 baru sebesar 38,2% padahal ASI eksklusif bersifat wajib dan menjadi hak setiap anak. Berikutnya, IMD Provinsi Jawa Barat baru mencapai 56,3%.

Peran praktek IMD dan pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi sangat besar sehingga peningkatan cakupan IMD dan ASI eksklusif mutlak diperlukan. Penelitian Stewart (2013) menunjukkan bahwa keterlambatan IMD berkaitan dengan kejadian *stunting*. Selanjutnya, penelitian Kuchenbecker *et al.* (2015) menyatakan bahwa pemberian ASI eksklusif 6 bulan berkaitan dengan rata-rata tinggi badan dan berat badan menurut umur yang lebih tinggi.

Pada fase setelah periode menyusui, pola asuh pada anak yang terkait dengan status gizi mencakup pemberian makanan yang mempertimbangkan kualitas (nutrisi dan keamanan makanan) dan kuantitas makanan, waktu dan frekuensi pemberian makanan serta higienitas lingkungan. Asupan makanan merupakan faktor langsung yang menentukan status gizi seseorang. Semakin baik asupan makanan maka resiko malnutrisi semakin rendah. Hasil penelitian oleh Sie *et al.* 2018 menyatakan bahwa peningkatan keragaman pangan secara signifikan dapat mengurangi *stunting*.

Data situasi konsumsi penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa asupan makanan penduduk Jawa Barat belum berkualitas. Hal ini ditunjukkan dari skor PPH Jawa Barat tahun 2017 yang mencapai 85,2 poin (AKE 2.000 kkal/kapita/hari). Konsumsi pangan penduduk Jawa Barat belum beragam yakni berlebih pada kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, namun masih kurang pada kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah. Kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa terjadi masalah gizi kurang yakni *stunting*, *wasting* dan *underweight* pada balita serta obesitas pada penduduk dewasa 18+ tahun di Provinsi Jawa Barat.

Masalah gizi kurang yakni *stunting*, *wasting* dan *underweight* sangat dipengaruhi oleh konsumsi pangan hewani. Hasil penelitian Sari *et al.* (2010) menunjukkan bahwa rendahnya konsumsi pangan hewani berhubungan signifikan dengan resiko *stunting*. Hal ini dikarenakan pangan hewani merupakan sumber pangan kaya kolin merupakan zat gizi penting untuk sintesis *sphingolipid* dan *gliserophospholipid* yang beresiko meningkatkan *stunting* (Semba *et al.* 2016). Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi pangan hewani penduduk Jawa Barat sudah cukup. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan *stunting* di Jawa Barat secara umum tidak disebabkan oleh kekurangan konsumsi pangan hewani. Meski demikian, data tersebut merupakan data rata-rata konsumsi seluruh

penduduk sehingga tidak sepenuhnya mewakili profil konsumsi penduduk dengan pendapatan yang rendah. Penelitian Ariani *et al.* (2018) menunjukkan bahwa penduduk dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung mengonsumsi daging sapi dan daging ayam ras yang lebih rendah.

Selain protein hewani, konsumsi sayur dan buah juga berkorelasi dengan kejadian masalah gizi kurang dan gizi lebih. Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi buah dan sayur adalah 400 g/kap/hari, yang terdiri dari 250 gr sayur dan 150 gr buah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri menyarankan orang dewasa untuk mengonsumsi 400 hingga 600 gr sayuran dan buah. Sementara itu, anak-anak disarankan untuk mengonsumsi 300 hingga 400 gr. Dari segi jenis, konsumsi sayur dan buah yang ideal dalam sehari adalah 5 jenis sayuran dan 2 jenis buah-buahan (*The National Health and Medical Research Council* (NHMRC)). Sayangnya, konsumsi sayur dan buah di Jawa Barat masih kurang yakni 233,6 g/kap/hari atau baru 58,4% dari anjuran ideal. Hal tersebut diduga menjelaskan terjadinya masalah *stunting*, *wasting* dan *underweight* pada balita serta obesitas pada penduduk dewasa 18+ tahun di Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian Wekesa (2017) menunjukkan bahwa rendahnya jumlah dan keragaman konsumsi buah pada anak usia 6-59 bulan di Kabupaten Kakamaga dan Siaga Indonesia berhubungan dengan resiko kurang gizi, termasuk *stunting*, *underweight* dan *wasting* (Wekesa 2017). Penelitian pada wanita dewasa di Perkotaan Ghana menunjukkan bahwa wanita dewasa yang mengonsumsi sayur dan buah kurang dari 5 porsi/hari beresiko 2,39 kali dan 9,27 kali anemia (Ghose dan Yaya 2018). Selanjutnya, penelitian Sharma *et al.* (2016) menunjukkan bahwa konsumsi buah dapat dijadikan sebagai faktor kunci mempertahankan berat badan ideal untuk mengurangi resiko obesitas.

Selain karena kurangnya konsumsi sayur dan buah, tingginya obesitas di Jawa Barat juga diduga disebabkan tingginya konsumsi padi-padian serta minyak dan lemak. Beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk Jawa Barat merupakan sumber karbohidrat sederhana yang jika dikonsumsi berlebihan beresiko menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular (PMT) seperti obesitas, penyempitan pembuluh darah, jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lemak merupakan zat gizi yang lebih lambat dicerna dibandingkan nutrisi lainnya sehingga kelebihan konsumsi minyak mengakibatkan gangguan pencernaan dan berpotensi membunuh bakteri baik di usus. Selain itu, lemak memiliki kandungan kalori yang tinggi. Satu gram lemak setara dengan 9 kalori sehingga kelebihan konsumsi minyak beresiko tinggi menyebabkan obesitas.

3. 5. Sinkronisasi Program Antar Organisasi Perangkat Daerah

Ketersediaan dan akses pangan merupakan indikator proses dan konsumsi pangan sebagai indikator dampak. Indikator dampak secara langsung adalah konsumsi dan frekuensi pangan sedangkan indikator dampak tak langsung adalah penyimpanan pangan dan status gizi. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk, berupa jumlah dan komposisi pangan menurut kelompok secara agregat digunakan parameter Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima. Semakin baik penyediaan maupun konsumsi pangan di suatu wilayah, maka semakin tinggi skor PPH dan semakin baik pula status gizinya. Oleh karena itu, skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023.

Urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang bersifat multisektoral. Selain ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur, skor PPH hendaknya juga ditetapkan sebagai IKU Bupati/Walikota. Selain itu, juga diperlukan kontribusi dari OPD terkait untuk pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Analisis program-program pembangunan ketahanan pangan mencakup ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Adapun program pembangunan daerah di Jawa Barat yang terkait ketersediaan pangan disajikan pada Tabel 30 sebagai berikut:

Tabel 26. Program Pembangunan Daerah Terkait Ketersediaan Pangan di Jawa Barat

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
1	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Program Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Air Tanah	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
3	Dinas Kehutanan	Program Pengelolaan DAS	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan dan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
		Daya Saing Produk Perikanan	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Utara	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Wilayah Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Utara	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Teknologi Perikanan Air Payau dan Laut Wilayah Selatan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Mutu Produk Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Produk Peternakan	Program Penyuluhan Pertanian
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Produksi Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Sapi Perah Bunikasih	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
23	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Pengembangan Konsumsi, Penganekaragaman, dan Keamanan Pangan : Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
24	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pelestarian Keanekaragaman Hayati	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pengembangan Potensi Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Jawa Barat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
27	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
28	Dinas Perkebunan	Program Pemberdayaan Sumber Daya Alam Perkebunan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
29	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Permodalan Petani Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian
30	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian
31	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Benih Perkebunan secara Berkelanjutan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Jawa Barat
32	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Produksi Produktifitas dan Nilai Tambah Perkebunan	-
33	Dinas Sumber Daya Air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Tambak dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
34	Dinas Sumber Daya Air	Program Bina Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
35	Dinas Sumber Daya Air	Program Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
36	Dinas Sumber Daya Air	Program Perencanaan Teknis Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
37	Dinas Sumber Daya Air	Program Bina Konstruksi Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
38	Dinas Sumber Daya Air	Program Bina Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
39	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
40	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
41	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
42	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengembangan Perbenihan Kentang	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
43	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
44	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
45	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
46	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
47	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyuluhan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program Penyuluhan Pertanian
48	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Program pelatihan Sumber Daya Manusia tanaman pangan dan hortikultura	Program Penyuluhan Pertanian

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Analisis program-program pembangunan ketahanan pangan pada subsistem ketersediaan pangan meliputi aspek pengelolaan lahan dan air, produksi, cadangan dan ketersediaan pangan. Hasil analisis pada Tabel 30 menunjukkan bahwa OPD yang berperan dalam subsistem ketersediaan pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada umumnya, program-program OPD tersebut sudah dapat mendukung subsistem ketersediaan pangan, namun terkait perdagangan pangan (ekspor dan impor) sebagai salah satu aspek pada ketersediaan pangan belum dijabarkan secara jelas. Selanjutnya, adapun program pembangunan daerah di Jawa Barat yang terkait akses pangan disajikan pada Tabel 31 sebagai berikut:

Tabel 27. Program pembangunan daerah terkait akses pangan di Jawa Barat

No.	OPD	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
1	Dinas BMPR	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
2	Dinas BMPR	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan : Penguatan Pemasaran dan Distribusi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
7	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program Usaha Kecil	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program Kelembagaan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program Penciptaan 100 ribu Wirausaha Baru	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Program Peningkatan Kerjasama Desa
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan	Program Peningkatan Kerjasama Desa

No.	OPD	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Program Peningkatan Kerjasama Desa
14	Dinas Pendidikan	Program Pendidikan Menengah	Program Pengembangan Kurikulum
15	Dinas Pendidikan	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Program Pengelolaan Pendidikan
16	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
17	Dinas Perhubungan	Pengembangan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pemberdayaan Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
21	Dinas Perkebunan	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perkebunan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program layanan rumah kemasan untuk 200 IKM pangan	Program Pengembangan Umkm
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program layanan mobil kemasan untuk 100 IKM pangan	Program Pengembangan Umkm
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program operasi pasar murah komoditi agro	Program Pengembangan Umkm
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	Program fasilitasi pasar lelang komoditi agro	Program Pengembangan Umkm

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Subsistem akses menggambarkan akses pangan oleh penduduk yang dilihat dari aspek fisik dan ekonomi. Akses secara fisik mengharuskan bahan pangan mudah dicapai individu atau rumah tangga. Sedangkan akses ekonomi berarti kemampuan memperoleh atau membeli pangan atau berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap pangan. Akses secara fisik dapat dilihat dari tersedianya sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran distribusi pangan seperti sarana perhubungan antar wilayah dan kelembagaan pangan yang mengatur sistem distribusi. Pada Tabel 31 terlihat bahwa program-program peningkatan kualitas sarana dan prasarana seperti jalan dan fasilitas perhubungan lainnya sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas BMPR.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat akses secara ekonomi antara lain tingkat pendidikan penduduk, tingkat kemiskinan dan stabilitas harga pangan di Jawa Barat. Tabel 31 menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut diwujudkan dalam program-program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Selanjutnya, adapun program pembangunan daerah di Jawa Barat yang terkait distribusi pangan disajikan pada Tabel 32 sebagai berikut:

Tabel 28. Program Pembangunan Daerah Terkait Konsumsi Pangan Dan Gizi di Jawa Barat

No.	OPD	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Peningkatan Produksi Perikanan Dan Daya Saing Produk Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
3	Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Akibat Bencana dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

No.	OPD	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
			Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Mutu Unit Pelatihan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
9	Dinas Kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
10	Dinas Kesehatan	Program Manajemen Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Konsumsi dan pengembangan sumber daya manusia	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Program Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Pengembangan Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan : Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Pengembangan Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan : Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Pengembangan Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan : Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No.	OPD	Program Perangkat Daerah	Nomenklatur Program Permendagri 90 Tahun 2019
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Pengembangan Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan : Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Pengembangan Konsumsi, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan : Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
18	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air, Sampah dan B3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan pola pemanfaatan pangan secara Nasional agar memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya. Pada subsistem konsumsi pangan dapat dilihat pencapaiannya dari konsumsinya (tingkat kecukupan) yang dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan (pengetahuan, praktek budaya setempat dan alokasi waktu) dan akan berdampak pada status gizi. Maka, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pengasuhan dalam rumah tangga penduduk. Adapun hasil analisis pada Tabel 32 menunjukkan program-program yang mendukung terwujudnya konsumsi pangan dan status gizi yang baik di Jawa Barat dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Tabel 32 menunjukkan bahwa perwujudan indikator-indikator sub sistem konsumsi pangan didominasi dalam program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait pelayanan kesehatan. Beberapa program juga diwujudkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Namun belum ada penjabaran program sub sistem konsumsi pangan dan status gizi oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dinas Perkebunan maupun Dinas Pendidikan dalam hal pengetahuan konsumsi pangan dan status gizi. Dinas Pendidikan memiliki peran besar dalam perbaikan konsumsi pangan melalui pendidikan formal sejak usia dini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Selanjutnya, target skor PPH yang menjadi IKU Gubernur Provinsi Jawa Barat harus diturunkan menjadi target kinerja utama bagi Bupati/Walikota di Jawa Barat. Adapun rekap komitmen Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam peningkatan skor PPH disajikan pada Tabel 33 sebagai berikut

Tabel 29. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat dalam Pencapaian Skor PPH

No.	Nama Daerah	Skor PPH di RPJMD	Program			
			Peningkatan Ketersediaan Pangan	Peningkatan Distribusi Pangan	Peningkatan Konsumsi Pangan	Peningkatan Status Gizi
1	Kab. Bogor	v	v	v	v	v
2	Kab. Sukabumi	v	v	v	v	v
3	Kab. Cianjur	v	v	v	v	v
4	Kab. Bandung	v	v	v	v	v
5	Kab. Garut	v	v	v	v	v
6	Kab. Tasikmalaya	v	v	v	v	v
7	Kab. Ciamis	v	v	v	v	v
8	Kab. Kuningan	v	v	v	v	v
9	Kab. Cirebon	v	v	v	v	v
10	Kab. Majalengka	v	v	v		v
11	Kab. Sumedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Kab. Indramayu	v	v	v	v	V
13	Kab. Subang	v	v	v	v	
14	Kab. Purwakarta	v	v	N/A	N/A	N/A
15	Kab. Karawang	v	v	v	v	v
16	Kab. Bekasi	v	v	v	v	v
17	Kab. Bandung Barat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kab. Pangandaran	v	v	v	v	v
19	Kota Bogor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kota Sukabumi	v	v	v	v	v
21	Kota Bandung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kota Cirebon	v	v	v	v	v
23	Kota Bekasi	v	v	v	v	v
24	Kota Depok	v	v	v	v	

No.	Nama Daerah	Skor PPH di RPJMD	Program			
			Peningkatan Ketersediaan Pangan	Peningkatan Distribusi Pangan	Peningkatan Konsumsi Pangan	Peningkatan Status Gizi
25	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kota Tasikmalaya	v	v	v	v	v
27	Kota Banjar	v	v	-	v	v

Sumber : Isian Kuesioner Setda dan Bappeda Jawa Barat 2019, diolah

Tabel 33 menunjukkan bahwa dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, diketahui 22 wilayah yang telah menetapkan skor PPH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati/Walikota. Lima wilayah lainnya tidak mengumpulkan kuesioner sehingga tidak diketahui status penetapan skor PPH sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati/Walikota. Kelima wilayah tersebut diantaranya Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Melalui dokumen rencana pangan ini diharapkan dapat mendorong ke-5 wilayah tersebut segera memasukkan skor PPH sebagai salah satu IKU Bupati/Walikota.

Penetapan skor PPH pada IKU tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program/kegiatan terkait sub sistem ketahanan pangan, yaitu sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, dan status gizi. Berdasarkan Tabel 30 diketahui bahwa program yang telah diwujudkan pemerintah daerah Jawa Barat lebih terfokus pada program peningkatan ketersediaan pangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya program peningkatan ketersediaan dibanding program lainnya. Pada sub sistem ketersediaan pangan, 22 wilayah telah memiliki program peningkatan ketersediaan pangan, sementara 5 wilayah lainnya tidak diketahui.

Program peningkatan ketersediaan pangan mencakup program yang berkaitan dengan peningkatan produksi, perluasan lahan pertanian, pengembangan kawasan, cadangan pangan, dan kegiatan ekspor-impor. Dua puluh dua wilayah yang sudah diketahui program peningkatan ketersediaan pangan cenderung memiliki banyak program ke arah peningkatan produksi, perluasan areal produksi, pelatihan produksi, maupun pengembangan kawasan pertanian. Tiga belas wilayah juga telah memiliki program peningkatan cadangan makanan, seperti program desa mandiri pangan, lumbung pangan, dan bank pangan. Enam wilayah telah memiliki program penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), dan hanya empat wilayah yang memiliki program penyusunan peta kerawanan pangan. Namun, wilayah di Jawa Barat belum memiliki program terkait kegiatan ekspor-impor dalam sub sistem ketersediaan pangan.

Pada sub sistem distribusi pangan, 21 wilayah di Jawa Barat sudah memiliki program peningkatan distribusi pangan sementara 6 wilayah lainnya belum diketahui. Program peningkatan distribusi pangan mencakup pengendalian distribusi dan harga pasar, operasi pasar/bazar murah, monitoring peredaran barang. Dua puluh satu wilayah yang sudah diketahui program peningkatan distribusi pangan tersebut cenderung memiliki banyak program ke arah pengendalian distribusi. Tiga wilayah yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Majalengka sudah memiliki program operasi/bazar pasar murah. Enam wilayah sudah memiliki program pemantauan harga pasar dan monitoring peredaran barang.

Pada sub sistem konsumsi pangan, 21 wilayah di Jawa Barat sudah memiliki program peningkatan konsumsi pangan, sementara 6 wilayah lainnya belum diketahui. Program peningkatan konsumsi pangan mencakup program diversifikasi pangan, jaminan keamanan pangan, kawasan rumah pangan lestari, dan lain sebagainya. Dua puluh satu wilayah yang sudah diketahui program peningkatan konsumsi pangan cenderung memiliki program pada peningkatan keamanan pangan, pengelolaan B2SA, dan pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL). Empat wilayah

sudah memiliki program penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH). Selain program-program yang sudah disebutkan di atas, terdapat wilayah yang menerapkan program unik dalam upaya peningkatan konsumsi pangan, seperti Jambore keamanan pangan untuk remaja/OSIS oleh Kabupaten Sukabumi, lomba bazar ikan oleh Kabupaten Cirebon, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan kegiatan perempuan maju mandiri oleh Kabupaten Cirebon serta gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu oleh Kabupaten Bekasi.

Pada sub sistem status gizi, 21 wilayah di Jawa Barat sudah memiliki program peningkatan status gizi, sementara 6 wilayah lainnya belum diketahui. Program peningkatan status gizi mencakup program penanggulangan kurang gizi, KEP, dan GAKY, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, remaja putri, ibu hamil, maupun masyarakat, penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan kualitas posyandu, dan lain sebagainya. Program peningkatan status gizi di wilayah Jawa Barat didominasi oleh program penanggulangan kurang gizi, KEP, dan GAKY, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita, remaja putri, ibu hamil, maupun masyarakat, dan posyandu. Hanya terdapat dua wilayah yang sudah menerapkan program penurunan *stunting*, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan. Selain program-program yang sudah disebutkan di atas, terdapat wilayah yang menerapkan program yang dinilai merupakan inovasi dalam upaya peningkatan status gizi, diantaranya pembinaan pos pemberdayaan keluarga (posdaya) oleh Kabupaten Bogor, gerakan keamanan pangan desa dan jambore keamanan pangan untuk remaja/OSIS oleh Kabupaten Sukabumi, pembentukan kecamatan sehat oleh Kabupaten Garut, kegiatan gerakan sayang ibu, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan kegiatan perempuan maju mandiri oleh Kabupaten Cirebon, dan Rencana Aksi Pangan dan Gizi oleh Kabupaten Bekasi.

IV. PERENCANAAN PANGAN

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 pasal 6 menyebutkan bahwa perencanaan pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan pangan ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Perencanaan pangan harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah pertumbuhan dan sebaran penduduk; kebutuhan konsumsi pangan dan gizi; daya dukung alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan; kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan; potensi pangan dan budaya lokal; rencana tata ruang wilayah; dan rencana pembangunan nasional dan daerah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pangan Jawa Barat adalah pendekatan skor PPH.

Jawa Barat telah menyusun target pencapaian skor PPH untuk tahun 2019-2023 yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Target skor PPH tersebut termasuk ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur dengan sasaran : Jawa Barat sebagai daerah pertanian, perikanan dan kelautan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan. Target skor PPH ini memiliki kenaikan 0,8 poin tiap tahun. Target pencapaian skor PPH Jawa Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 30. Target Skor PPH Jawa Barat 2019-2023

Sasaran RPJMD 2018 - 2023 (IKU Gubernur)	Indikator Sasaran	Target (poin)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) poin	85,2	84,80	84,00	84,80	85,60

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023

Target skor PPH Jawa Barat kemudian diterjemahkan ke dalam kebutuhan pangan penduduk Provinsi Jawa Barat. Kebutuhan pangan merupakan jumlah dari proyeksi kebutuhan konsumsi, proyeksi penggunaan, proyeksi cadangan pangan, dan ekspor-impor. Namun data ekspor dan impor tidak tersedia sehingga diabaikan.

4.1 Target Kebutuhan Pangan

Target kebutuhan pangan merupakan hasil penjumlahan dari kebutuhan konsumsi pangan, penggunaan pangan dan cadangan pangan. Penggunaan pangan terdiri dari pakan, bibit, tercecer, industri makanan dan non-makanan. Data ekspor dan impor pangan tidak masuk dalam analisis karena tidak tersedia data di lingkup Provinsi Jawa Barat. Berikut merupakan uraian perhitungan kebutuhan pangan.

A. Proyeksi Kebutuhan Konsumsi Pangan

Pangan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Setiap individu memiliki hak bebas dari rasa lapar dan kelaparan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Konsumsi pangan adalah informasi mengenai jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang (keluarga atau rumah tangga) pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa telaahan terhadap konsumsi pangan dapat ditinjau dari aspek jenis pangan yang dikonsumsi dan jumlah pangan yang dikonsumsi.

Menurut Hattas (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi, diantaranya: (a) tingkat pendapatan masyarakat, semakin besar tingkat pendapatan seseorang, biasanya akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi, sebaliknya tingkat pendapatan yang rendah akan diikuti dengan tingkat konsumsi yang rendah pula; (b) selera konsumen, setiap orang memiliki keinginan yang berbeda dan ini akan mempengaruhi pola konsumsi. Konsumen akan memilih satu jenis barang untuk dikonsumsi dibandingkan jenis barang lainnya; (c) harga barang, jika harga suatu barang mengalami kenaikan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka konsumsi barang tersebut akan mengalami kenaikan; (d)

tingkat pendidikan masyarakat, tinggi rendahnya pendidikan masyarakat akan mempengaruhi terhadap perilaku, sikap dan kebutuhan konsumsinya; (e) jumlah keluarga, besar kecilnya jumlah keluarga akan mempengaruhi pola konsumsi dan (f) lingkungan, keadaan sekeliling dan kebiasaan lingkungan akan mempengaruhi perilaku konsumsi pangan masyarakat setempat.

Kebutuhan akan konsumsi ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat. Namun peningkatan jumlah penduduk ini tidak diikuti oleh peningkatan luas lahan pertanian untuk meningkatkan produksi. Adapun proyeksi konsumsi pangan penduduk dalam satuan kkal/kap/hari dan ton/tahun berdasarkan data konsumsi aktual tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31. Proyeksi Konsumsi Pangan

Jenis Pangan	Target Konsumsi Pangan									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	kg/kap/th	Ton/th	kg/kap/th	Ton/th	kg/kap/th	Ton/th	kg/kap/th	Ton/th	kg/kap/th	Ton/th
Beras	83,7	4.100.848	83,3	4.130.373,6	83,0	4.159.229.8	82,7	4.187.577	82,4	4.215.311
Jagung	0,1	4.880	0,1	4.915,0	0,1	4.949.3	0,1	4.983	0,1	5.016
Terigu	33,5	1.644.583	33,4	1.656.423,9	33,3	1.667.996.3	33,2	1.679.365	33,0	1.690.487
Singkong	13,5	662.235	14,0	695.719,3	14,6	729.718.7	15,1	764.256	15,6	799.308
Ubi Jalar	3,9	190.006	4,0	199.613,1	4,2	209.368.0	4,3	219.277	4,5	229.334
Sagu	1,4	67.659	1,4	71.080,3	1,5	74.554.0	1,5	78.083	1,6	81.664
Kentang	0,1	6.922	0,1	7.272,1	0,2	7.627.5	0,2	7.989	0,2	8.355
Daging Ruminansia	4,8	234.822	4,8	240.315,5	4,9	245.853.0	5,0	251.443	5,0	257.080
Daging Unggas	15,6	762.971	15,8	780.819,9	15,9	798.812.1	16,1	816.976	16,3	835.291
Telur	6,0	293.404	6,1	300.268,2	6,1	307.187.2	6,2	314.172	6,3	321.215
Susu	6,8	333.357	6,9	341.155,1	7,0	349.016.3	7,0	356.953	7,1	364.954
Ikan	10,6	519.094	10,7	531.237,3	10,8	543.478.5	11,0	555.837	11,1	568.297
Minyak Kelapa	0,4	17.571	0,4	17.706,9	0,4	17.840.0	0,4	17.971	0,4	18.100
Minyak Sawit	10,2	499.006	10,1	502.863,1	10,1	506.644.5	10,1	510.370	10,0	514.026
Kelapa	0,6	29.926	0,7	33.417,0	0,7	36.974.6	0,8	40.599	0,9	44.289
Kacang Kedelai	8,8	432.912	9,0	447.572,3	9,2	462.412.3	9,4	477.448	9,6	492.665
Kacang Tanah	0,5	23.917	0,5	24.726,8	0,5	25.546.7	0,5	26.377	0,5	27.218
Gula Pasir	5,3	257.548	5,4	268.738,7	5,6	280.090.4	5,8	291.612	5,9	303.294
Gula Merah	1,8	87.405	1,8	91.203,1	1,9	95.055.5	2,0	98.966	2,0	102.930
Sayur	36,6	1.793.318	36,9	1.830.130,0	37,3	1.867.167.9	37,6	1.904.499	38,0	1.942.073
Buah	38,8	1.903.588	39,2	1.942.663,1	39,6	1.981.978.4	39,9	2.021.605	40,3	2.061.489

Proyeksi konsumsi penduduk Jawa Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pangan dengan proyeksi konsumsi tertinggi selama 2019-2023 adalah beras. Beras merupakan pangan sumber karbohidrat yang masih menjadi primadona bagi penduduk Jawa Barat. Pada tahun 2019, proyeksi konsumsi beras Jawa Barat adalah sebesar 83,7 kg/kap/hari atau setara dengan 4.100.848 ton/tahun. Angka ini terus meningkat menjadi 4.215.311 ton pada tahun 2023. Konsumsi beras per kapita diharapkan menurun hingga tahun 2023, hal ini disebabkan konsumsi beras penduduk Jawa Barat telah mencapai batas ideal. Namun, jumlah konsumsi beras penduduk Jawa Barat dalam satuan ton/tahun akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk.

Setelah beras, pangan sumber karbohidrat dengan proyeksi konsumsi tertinggi adalah terigu. Proyeksi konsumsi terigu diharapkan menurun menjadi 33,0 kg/kap/hari pada tahun 2023. Namun angka konsumsi terigu penduduk Jawa Barat dalam satuan ton/tahun akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Terigu banyak digunakan sebagai bahan pembuat makanan, seperti *pie*, *muffin*, roti, kue basah, donat, dan jenis kue lainnya. Hal ini membuat permintaan penduduk akan terigu cukup tinggi. Sementara itu, jagung menjadi pangan sumber karbohidrat dengan proyeksi konsumsi terendah hingga tahun 2023. Tingkat partisipasi konsumsi jagung rendah disebabkan jagung hanya dikonsumsi secara langsung dalam bentuk jagung pipilan atau jagung dengan kelobotnya. Jagung lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan, sehingga masyarakat mengonsumsi jagung secara tidak langsung melalui ayam, itik, dan telur.

Proyeksi konsumsi daging unggas memiliki angka yang lebih tinggi dibanding daging ruminansia. Proyeksi konsumsi daging unggas mencapai 16,3 kg/kap/hari atau setara 835.291 ton pada tahun 2023, sedangkan daging ruminansia hanya mencapai 5,0 kg/kap/hari atau 257.080 ton. Pangan sumber protein hewani dengan proyeksi konsumsi terbesar setelah daging unggas adalah ikan yang mencapai 11,1 kg/kap/hari atau 568.297 ton pada tahun 2023. Selanjutnya, proyeksi konsumsi minyak sawit masih jauh melampaui minyak kelapa. Proyeksi konsumsi minyak sawit mencapai 10 kg/kap/hari atau setara 514.026 ton pada tahun 2023.

Sementara itu, pada pangan sumber protein nabati, kacang kedelai memiliki angka proyeksi konsumsi yang lebih tinggi dibanding kacang tanah. Kacang kedelai banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat tempe, tahu, oncom, maupun kecap. Selain itu, sumber protein nabati yang banyak dijadikan makanan ringan dan lauk sehari-hari adalah pangan olahan kacang kedelai. Hal ini menjadikan proyeksi konsumsi kedelai lebih besar dari kacang tanah. Pada pangan sumber gula, gula pasir memiliki proyeksi konsumsi tertinggi daripada gula merah. Angka proyeksi

konsumsi gula pasir mencapai 303.294 ton pada tahun 2023. Selanjutnya, proyeksi konsumsi sayur dan buah pada tahun 2023 berturut-turut mencapai angka 1.942.073 ton dan 2.061.489 ton. Angka proyeksi konsumsi penduduk Jawa Barat kemudian dikalikan 110% sehingga diperoleh data proyeksi kebutuhan konsumsi pangan. Adapun proyeksi kebutuhan konsumsi pangan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 36 berikut.

Tabel 32. Proyeksi Kebutuhan Konsumsi Pangan

Jenis Pangan	Proyeksi Kebutuhan Konsumsi (Ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
GKG	7.036.239	7.086.900	7.136.411	7.185.049	7.232.634
Beras	4.510.933	4.543.411	4.575.153	4.606.335	4.636.842
Jagung	5.368	5.406	5.444	5.481	5.518
Terigu	1.809.041	1.822.066	1.834.796	1.847.301	1.859.535
Singkong	728.459	765.291	802.691	840.682	879.238
Ubi Jalar	209.007	219.574	230.305	241.205	252.268
Sagu	74.425	78.188	82.009	85.891	89.830
Kentang	7.614	7.999	8.390	8.787	9.190
Daging Ruminansia	258.304	264.347	270.438	276.588	282.788
Daging Unggas	839.268	858.902	878.693	898.674	918.820
Telur	322.745	330.295	337.906	345.590	353.337
Susu	366.692	375.271	383.918	392.648	401.450
Ikan	571.003	584.361	597.826	611.420	625.127
Minyak Kelapa	19.328	19.478	19.624	19.768	19.910
Minyak Sawit	548.907	553.149	557.309	561.407	565.428
Kelapa	32.918	36.759	40.672	44.659	48.718
Kacang Kedelai	476.203	492.330	508.654	525.193	541.932
Kacang Tanah	26.309	27.200	28.101	29.015	29.940
Gula Pasir	283.303	295.613	308.099	320.773	333.623
Gula Merah	96.146	100.323	104.561	108.862	113.223
Sayur	1.972.650	2.013.143	2.053.885	2.094.949	2.136.280
Buah	2.093.947	2.136.929	2.180.176	2.223.766	2.267.638

Tabel 36 menunjukkan proyeksi kebutuhan konsumsi pangan berdasarkan data konsumsi aktual tahun 2017. Kebutuhan konsumsi pangan terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan konsumsi pangan terbesar berada pada jenis pangan padi (GKG), kemudian disusul beras, buah, sayur, dan terigu. Sementara itu, kebutuhan konsumsi pangan terendah berada pada jenis pangan jagung dan kentang.

B. Proyeksi Penggunaan Pangan

Komponen penggunaan pangan meliputi penggunaan untuk pakan, bibit, industri, dan komponen tercecer. Proyeksi penggunaan pangan dihitung dari data dasar produksi tahun 2017. Target penggunaan pangan ini kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan pangan Jawa Barat dalam lima tahun yang akan datang. Adapun data penggunaan pangan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 disajikan pada tabel 37.

Tabel 37 menunjukkan pangan yang digunakan sebagai pakan diantaranya padi, beras, jagung, singkong, ubi jalar, susu, dan kacang

kedelai. Sebanyak 54.118,68 ton padi dan 46.926,24 ton beras digunakan untuk kebutuhan pakan. Limbah proses penyosohan beras dapat dibedakan menjadi dedak (*rice bran*) dan bekatul (*rice polish*). Menurut FAO, dedak adalah hasil samping dari proses penggilingan padi yang terdiri dari lapisan luar butiran beras (*perikarp* dan *tegmen*) serta sejumlah lembaga. Sedangkan bekatul terdiri atas lapisan dalam butiran beras, yaitu aleuron (kulit ari) beras serta sebagian kecil endosperma. Dalam proses penggilingan padi di Indonesia, dedak dihasilkan pada proses penyosohan pertama, sedangkan bekatul pada proses penyosohan kedua (Astawan dan Leomitro, 2009). Dedak dan bekatul ini yang biasanya dijadikan pakan ternak. Selain dedak dan bekatul, tak jarang beras juga dijadikan sebagai pakan ternak unggas terutama ayam.

Selanjutnya, sebanyak 85.495,68 ton jagung digunakan sebagai pakan. Jagung merupakan bahan baku pakan ternak dan ikan/udang. Bahan baku jenis ini digunakan sebagai bahan baku sumber energi utama pakan, terutama untuk ternak monogastrik seperti ayam, itik, dan babi karena kandungan energi yang dinyatakan sebagai energi termetabolis relatif tinggi di banding bahan pakan lainnya. Dalam ransum unggas baik ayam broiler maupun ayam petelur, jagung menyumbang lebih dari separuh energi yang dibutuhkan ayam.

Tabel 33. Proyeksi Penggunaan Pangan

Jenis Pangan	Penggunaan					Total
	Pakan	Bibit	Industri		Tercecer	
			Makanan	Non-makanan		
Padi	54.118,68	114.141,23	0,00	0,00	664.183,85	832.443,76
Beras	46.926,24	73.175,94	0,00	0,00	605.672,20	725.774,37
Jagung	85.495,68	0,00	0,00	0,00	71.246,40	156.742,08
Terigu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Singkong	38.028,66	0,00	0,00	0,00	40.500,52	78.529,18
Ubi Jalar	10.957,60	0,00	0,00	0,00	54.788,00	65.745,60
Sagu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kentang	0,00	3.298,52	0,00	0,00	13.914,77	17.213,29
Daging Ruminansia	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,97	5.974,97
Daging Unggas	0,00	0,00	0,00	0,00	43.657,84	43.657,84
Telur	0,00	12.978,59	0,00	0,00	6.079,14	19.057,72
Susu	30.200,51	0,00	0,00	0,00	17.214,29	47.414,80
Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00	43.056,40	43.056,40
Minyak Kelapa	0,00	0,00	0,00	430,15	33,55	463,70
Minyak Sawit	0,00	0,00	0,00	11.426,16	6.352,17	17.778,33
Kelapa	0,00	0,00	3.584,60	16,03	875,53	4.476,16
Kacang Kedelai	167,48	0,00	0,00	0,00	2.463,00	2.630,48
Kacang Tanah	0,00	0,00	4.378,14	0,00	7.085,24	11.463,38
Gula Pasir	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	12,12
Gula Merah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sayur	0,00	11.253,94	0,00	64,88	151.292,85	162.611,67
Buah	0,00	0,00	0,00	0,00	105.546,45	105.546,45

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018, diolah

Andrizal (2003) menyatakan bahwa selain jagung, ubi kayu dan ubi jalar juga dimanfaatkan sebagai bahan industri pakan ternak (1,80%). Bonggol serta ubi kayu dan ubi jalar kualitas rendah yang tidak layak diproses dikenal dengan istilah ubi afkir. Ubi afkir ini kemudian diberikan kepada ternak dalam keadaan segar maupun kering. Selain hijauan, ubi jalar juga menjadi pakan utama untuk ternak babi. Berdasarkan Tabel 37, sebanyak 38.028,66 ton ubi kayu dan 10.957,60 ton ubi jalar di Jawa Barat digunakan sebagai pakan ternak. Berikutnya sebanyak 30.200,51 ton susu juga dimanfaatkan sebagai pakan. Susu afkir banyak digunakan sebagai probiotik dalam aplikasi pakan ayam broiler dan kambing. Di sisi lain, kedelai juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Selain diambil jeraminya, kedelai sebagai pakan ternak digunakan dalam bentuk ampas tahu, bungkil, maupun dalam bentuk tepung. Penduduk Jawa Barat menggunakan 167,48 ton kacang kedelai sebagai pakan ternak ruminansia.

Penggunaan pangan selanjutnya adalah penggunaan bibit. Bibit adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan reproduksi. Terdapat empat jenis pangan di Jawa Barat yang digunakan sebagai bibit, diantaranya padi 114.141,23 ton yang kemudian dikonversi menjadi 73.175,94 ton beras, kentang 3.298,52 ton, telur 12.978,59 ton, dan sayur 11.253,94 ton. Selanjutnya hanya terdapat dua pangan yang digunakan untuk keperluan industri makanan. Penggunaan pangan untuk industri makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industri makanan dan hasilnya dimanfaatkan untuk makanan manusia dalam bentuk lain. Pangan yang digunakan untuk industri makanan diantaranya kelapa 18.081,02 ton, dan kacang tanah 90.123,14 ton.

Sementara itu, penggunaan pangan untuk industri non-makanan adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri bukan untuk makanan manusia, termasuk untuk industri pakan ternak/ikan. Pangan yang digunakan untuk industri non-makanan diantaranya minyak kelapa 430,15 ton, minyak sawit 11.426,16 ton, kelapa 16,03 ton dan sayur 64,88 ton. Data penggunaan bahan baku industri makanan dan non-makanan seharusnya tersedia dalam data statistik industri Jawa Barat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Namun, karena tidak tersedianya data tersebut, proyeksi penggunaan industri makanan dan non-makanan tidak diperhitungkan.

Selanjutnya, penggunaan tercecceer adalah sejumlah bahan makanan yang hilang atau rusak sehingga tidak dapat dimakan oleh manusia, yang terjadi secara tidak sengaja mulai dari panen, pengolahan pasca panen, penyimpanan, pendistribusian hingga tersedia di pasar. Tabel 37 menunjukkan bahwa hampir semua pangan di Jawa Barat memiliki berat yang tercecceer, kecuali terigu, sagu, dan gula merah. Pangan dengan angka tercecceer tertinggi adalah padi yakni sebesar 664.183,85 ton, sementara pangan yang memiliki angka terendah adalah gula pasir yakni 12,12 ton.

C. Proyeksi Cadangan Pangan

Proyeksi cadangan pangan penduduk Provinsi Jawa Barat dihitung untuk menganalisa kebutuhan pangan penduduk Jawa Barat pada lima

tahun yang akan datang. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi (CBPP) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi yakni sebesar 20% dari cadangan beras total Provinsi. Cadangan total Provinsi adalah total persediaan beras Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Cadangan total Provinsi dihitung dari 0.5% total konsumsi beras penduduk Jawa Barat. Cadangan pangan ini sangat penting untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, atau keadaan darurat. Salah satu keadaan darurat adalah kejadian bencana. Jawa Barat adalah daerah yang rawan bencana. Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2018, Jawa Barat mengalami gempa bumi sebanyak 5 kali, tanah longsor 139 kali, banjir 79 kali, kekeringan 29 kali, kebakaran lahan hutan 12 kali, angin puting beliung 119 kali, dan abrasi sebanyak 3 kali. Jumlah korban yang terdampak dan mengungsi dari bencana tersebut adalah 2.321.892 jiwa. Sepanjang tahun 2018, Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan frekuensi kejadian bencana tertinggi di Jawa Barat.

Cadangan beras Provinsi Jawa Barat dihitung berdasarkan konsumsi aktual penduduk Provinsi Jawa Barat. Konsumsi beras aktual adalah rata-rata jumlah beras yang dikonsumsi penduduk Jawa Barat berdasarkan data Susenas Jawa Barat tahun 2017 publikasi tahun 2018. Adapun cadangan beras total Provinsi Jawa Barat 2019-2023 disajikan pada Tabel 38 sebagai berikut.

Tabel 34. Cadangan Pangan Total Provinsi

Cadangan Pangan Total Provinsi (ton)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Padi	31.982,90	32.213,18	32.438,23	32.659,31	32.875,61
Beras	20.504,24	20.651,87	20.796,15	20.937,89	21.076,55

Sumber : DKPP Jawa Barat 2018 & Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018, diolah

Cadangan pangan Jawa Barat disajikan dalam dua bentuk pangan, yakni padi dan beras. Cadangan padi Provinsi Jawa Barat mencapai angka 32.875,61 ton pada tahun 2023. Sementara itu, cadangan beras Provinsi Jawa Barat memiliki angka 21.076,55 ton hingga tahun 2023. Laju peningkatan cadangan pangan total Provinsi tahun 2019-2023 adalah sebesar 0,7% tiap tahunnya. Cadangan beras ini semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, terdapat 21 jenis pangan yang dianalisis kebutuhan pangannya hingga tahun 2023. Khusus kebutuhan beras, di^{overlay}kan dengan dua data produksi yaitu data produksi tahun 2017 (metode survey ubinan) dan data produksi tahun 2018 (metode Kerangka Sampel Area (KSA)). Sementara itu, untuk pangan lainnya hanya di^{overlay}kan dengan data produksi aktual tahun 2017.

Tabel 35. Kebutuhan Beras

Jenis Pangan	Produksi (Ton)		Kebutuhan Pangan (Ton)				
	Survei Ubinan 2017	KSA (2018)	2019	2020	2021	2022	2023
GKG	11.161.0 82	9.539.3 30	7.900.6 65	7.951.5 56	8.001.2 93	8.050.1 52	8.097.9 54
Beras	7.002.46 3	5.758.5 10	5.257.2 11	5.289.8 37	5.321.7 23	5.353.0 47	5.383.6 93

Sumber : DKPP Jawa Barat 2018 & Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018, diolah

Kebutuhan pangan mengimplementasikan seluruh kebutuhan dari berbagai sisi sehingga dapat dianggap sebagai target produksi yang harus dipenuhi. Pada tahun 2019, kebutuhan pangan GKG di Jawa Barat adalah sebesar 7.900.665 ton. Kebutuhan pangan ini terus meningkat menjadi 8.097.954 ton pada tahun 2023. Kebutuhan pangan beras penduduk Jawa Barat pada tahun 2019 sebesar 5.257.211 ton dan mencapai 5.383.693 ton pada tahun 2023. Kebutuhan pangan beras ini kemudian *dioverlaykan* dengan produksi beras aktual Provinsi Jawa Barat berdasarkan data metode Kerangka Sampel Area (KSA) dan Survei Ubinan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat untuk melihat potensi tercapainya kebutuhan.

Pada tahun 2019, kebutuhan GKG di Jawa Barat adalah sebesar 7.900.665 ton dan mencapai 8.097.954 ton pada tahun 2023. Di sisi lain, produksi aktual GKG tahun 2017 berdasarkan metode survei ubinan menunjukkan angka sebesar 11.161.081,5 ton, sedangkan data KSA menunjukkan produksi GKG sebesar 9.539.330 ton. Berikutnya kebutuhan pangan beras berdasarkan konsumsi aktual di Jawa Barat mencapai 5.383.693 ton pada tahun 2023. Di sisi lain, produksi aktual beras tahun 2017 berdasarkan metode survei ubinan dan KSA menunjukkan angka masing-masing 7.002.463 ton dan 5.758.510 ton.

Kebutuhan beras hingga tahun 2023 masih lebih rendah dari angka produksi. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu mempertahankan produksi beras dan menghimbau penduduk untuk makan sesuai gizi seimbang, maka kebutuhan beras penduduk Jawa Barat masih dapat terpenuhi hingga tahun 2023. Jawa Barat diproyeksi masih memiliki surplus beras pada tahun 2023 sebanyak 1.618.500 ton jika *dioverlaykan* dengan data produksi Survei Ubinan tahun 2017. Disamping itu, Jawa Barat juga masih surplus 374.871 ton beras pada tahun 2023 jika *dioverlaykan* dengan produksi KSA tahun 2018. Namun perlu diingat, angka kebutuhan pangan beras ini perlu dikoreksi oleh data penggunaan industri makanan dan non-makanan. Kebutuhan pangan beras diatas belum termasuk angka penggunaan industri makanan dan non-makanan karena tidak tersedianya data tersebut di lingkup Provinsi Jawa Barat. Adapun data hasil analisis kebutuhan pangan lainnya disajikan pada Tabel 40 sebagai berikut.

Tabel 36. Kebutuhan Pangan Lainnya

Jenis Pangan	Produksi Tahun 2017 (Ton)	Kebutuhan Pangan (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jagung	1.268.186	162.110	162.149	162.186	162.223	162.260
Terigu	0	1.809.041	1.822.066	1.834.796	1.847.301	1.859.535
Singkong	1.822.904	806.988	843.820	881.220	919.211	957.768
Ubi Jalar	482.134	274.752	285.320	296.050	306.951	318.013
Sagu	0	74.425	78.188	82.009	85.891	89.830
Kentang	259.973	24.828	25.213	25.604	26.001	26.404
Daging Ruminansia	137.169	264.279	270.322	276.413	282.563	288.763
Daging Unggas	829.499	882.926	902.560	922.351	942.332	962.478
Telur	202.729	341.803	349.353	356.964	364.647	372.394
Susu	311.065	414.107	422.685	431.333	440.063	448.865
Ikan	1.392.157	614.060	627.417	640.883	654.477	668.183
Minyak Kelapa	1.687	19.792	19.941	20.088	20.232	20.374
Minyak Sawit	114.147	566.685	570.928	575.087	579.185	583.207
Kelapa	91.618	37.394	41.235	45.148	49.135	53.194
Kacang Kedelai	46.630	478.834	494.960	511.284	527.823	544.562
Kacang Tanah	44.497	37.772	38.663	39.565	40.478	41.403
Gula Pasir	1.225	283.315	295.625	308.112	320.785	333.635
Gula Merah	38.425	96.146	100.323	104.561	108.862	113.223
Sayur	3.911.905	2.135.262	2.175.755	2.216.496	2.257.561	2.298.892
Buah	2.149.502	2.199.493	2.242.476	2.285.723	2.329.312	2.373.185

Sumber : DKPP Jawa Barat 2018 & Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018, diolah

Kebutuhan pangan jagung penduduk Jawa Barat mencapai 162.260 ton pada tahun 2023. Kebutuhan terigu terus meningkat menjadi 1.859.535 ton pada tahun 2023. Terigu merupakan pangan sumber karbohidrat dengan angka kebutuhan tertinggi kedua setelah beras di Jawa Barat. Lebih rendah dari terigu, kebutuhan singkong, ubi jalar, sagu, dan kentang berturut-turut sebesar 957.768 ton, 318.013 ton, 89.830 ton, dan 26.404 ton. Pangan sumber protein hewani yang menjadi kebutuhan tertinggi penduduk Jawa Barat adalah daging unggas yakni sebesar 962.478 ton pada tahun 2023, disusul oleh ikan 668.183 ton, susu 448.865 ton, telur 372.394 ton, dan daging ruminansia 288.763 ton. Sementara itu, kebutuhan protein nabati tertinggi berada pada kacang kedelai sebesar 544.562 ton. Di sisi lain, minyak sawit masih menjadi kebutuhan tertinggi untuk pangan sumber minyak dan lemak. Pada pangan sumber gula, kebutuhan tertinggi berada pada gula pasir yakni 333.635 ton pada tahun 2023. Kebutuhan sayur dan buah memiliki angka yang hampir sama, yakni masing-masing 2.298.892 ton dan 2.373.185 ton pada tahun 2023. Kebutuhan pangan kemudian dioverlaykan dengan produksi aktual Provinsi Jawa Barat tahun 2017 untuk

melihat potensi tercapainya kebutuhan. Jenis pangan yang masih dapat dipenuhi oleh Provinsi Jawa Barat hingga tahun 2023 diantaranya jagung, singkong, ubi jalar, kentang, ikan, kelapa dan sayur mayor. Jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mempertahankan produksi pangan tersebut seperti halnya

pada tahun 2017, maka Jawa Barat dapat mencapai mandiri pangan untuk kelompok jagung, singkong, ubi jalar, kentang, ikan, kelapa, dan sayur mayor hingga tahun 2023. Sementara itu, kebutuhan terigu dan sugu mencapai 1.859.535 ton dan 89.830 ton pada tahun 2023, sedangkan produksi aktual keduanya adalah 0 ton, sehingga kebutuhan terigu dan sugu akan terus diimpor dari daerah lain. Selanjutnya, kebutuhan protein hewani yang masih dapat dipenuhi oleh Jawa Barat adalah ikan. Kebutuhan daging ruminansia, daging unggas, telur, dan susu tahun 2019 hingga tahun 2023 tidak dapat dipenuhi oleh produksi Jawa Barat, sehingga pemenuhannya dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi atau melakukan impor dari daerah lain.

Kebutuhan pangan penduduk Provinsi Jawa Barat akan minyak kelapa dan sawit masing masing 20.374 ton dan 759.328 ton pada tahun 2023, sedangkan produksi aktual tahun 2017 hanya mencapai 1.687 ton dan 114.147 ton. Hal ini menunjukkan Provinsi Jawa Barat mengalami defisit minyak dari tahun 2019-2023. Begitu pula dengan kacang kedelai, kacang tanah, gula pasir, gula merah, dan buah. Produksi kacang kedelai, kacang tanah, gula pasir, gula merah, dan buah tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk Jawa Barat hingga tahun 2023, sehingga pemenuhan lima pangan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi atau melakukan impor dari daerah lain.

Selain dilakukan *overlay* terhadap produksi aktual tahun 2017, kebutuhan pangan juga di*overlay* terhadap target produksi dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk melihat sinkronisasi target yang disusun Pemerintah terhadap potensi produksi yang ada dilapang.

Tabel 37 Perbandingan kebutuhan beras terhadap target produksi Jawa Barat

Target	Berat beras (Ton)					Rata-rata laju (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Renstra	6.131.506	6.185.734	6.239.962	6.294.190	6.348.419	0,9
Kebutuhan pangan	5.758.510	5.257.211	5.289.837	5.321.723	5.353.047	-1,7
Gap	372.996	928.523	950.125	972.467	995.372	

Sumber :

Target Renstra : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat

Kebutuhan pangan : DKPP Jawa Barat 2018 & Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018, diolah

Kebutuhan beras penduduk Jawa Barat hingga tahun 2023 mencapai angka 5.353.047 ton. Sementara itu, target produksi beras yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mencapai 6.348.419 ton. Target yang ditentukan DTPH Jawa Barat lebih tinggi dibanding kebutuhan beras penduduk sehingga gap yang dihasilkan adalah positif. Peningkatan

target produksi beras oleh renstra adalah sebesar 0,9% tiap tahunnya. Jika realisasi produksi pada tahun 2019-2023 memenuhi target, dengan kondisi *ceteris paribus* tanpa ada perubahan pada faktor produksi maupun teknologi, maka kebutuhan beras Provinsi Jawa Barat akan terus terpenuhi hingga tahun 2023. Wilayah surplus beras dapat mendistribusikan berasnya ke wilayah defisit melalui arahan kawasan dan simpul pangan. Target produksi beras yang ditetapkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga tidak terlalu jauh dari kondisi produksi beras aktual Jawa Barat yaitu 7.002.463 ton dengan metode survei ubinan dan 6.115.665 ton dengan metode kerangka sampling area. Dengan demikian, potensi pencapaian target produksi cukup baik. Adapun perbandingan kebutuhan pangan lainnya berdasarkan konsumsi aktual terhadap target produksi Pemerintah Jawa Barat disajikan pada Tabel 42.

Terdapat sembilan jenis pangan yang ditetapkan target produksinya oleh Pemerintah Jawa Barat, diantaranya beras, jagung, kedelai, sayur, buah, daging, telur, susu, dan ikan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan target produksi jagung sebesar 1.123.065 ton pada tahun 2019. Target ini terus meningkat setiap tahun dengan laju peningkatan sebesar 0,7%. Gap positif menunjukkan bahwa target yang ditetapkan DTPH sudah memenuhi kebutuhan jagung hingga tahun 2023. Jika realisasi produksi pada tahun 2019-2023 memenuhi target, dengan kondisi *ceteris paribus*, tanpa ada perubahan pada faktor produksi maupun teknologi, maka kebutuhan jagung Provinsi Jawa Barat akan terus terpenuhi hingga tahun 2023.

Selanjutnya, target produksi kedelai ditetapkan sebesar 53.950 ton pada tahun 2019. Target produksi kedelai oleh DTPH terus meningkat dengan laju peningkatan 3,6% tiap tahunnya. Gap negatif menunjukkan bahwa target produksi kedelai yang ditetapkan belum memenuhi kebutuhan kedelai penduduk, sehingga perlu adanya peningkatan produksi dan jaminan pemenuhan pangan melalui impor dari daerah lain. Begitu pula dengan sayur dan buah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan target produksi sayur dan buah pada tahun 2019 masing masing 1.092.292 ton dan 547.196 ton. Laju peningkatan target produksi sayur adalah 1,3% sementara laju peningkatan produksi buah sebesar 1,1%. Gap negatif pada sayur dan buah menunjukkan bahwa target produksi sayur dan buah yang ditetapkan belum memenuhi kebutuhan penduduk Jawa Barat.

Tabel 38 Perbandingan kebutuhan pangan terhadap target produksi Jawa Barat

Jenis Pangan	Target	Berat pangan (Ton)					Rata-rata laju (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
Jagung	Renstra	1.123.065	1.131.030	1.138.995	1.146.960	1.154.925	0,7
	Kebutuhan pangan	162.110	162.149	162.186	162.223	162.260	0,02
	Gap	960.955	968.881	976.809	984.737	992.665	
Kedelai	Renstra	53.950	56.025	58.100	60.175	62.250	3,6
	Kebutuhan pangan	478.834	494.960	511.284	527.823	544.562	3,3
	Gap	-424.884	-438.935	-453.184	-467.648	-482.312	
Sayur	Renstra	1.092.292	1.106.740	1.121.385	1.136.230	1.151.278	1,3
	Kebutuhan pangan	2.135.262	2.175.755	2.216.496	2.257.561	2.298.892	1,9
	Gap	-1.042.970	-1.069.015	-1.095.111	-1.121.331	-1.147.614	
Buah	Renstra	547.196	553.291	559.456	565.693	572.001	1,1
	Kebutuhan pangan	2.199.493	2.242.476	2.285.723	2.329.312	2.373.185	1,9
	Gap	-1.652.297	-1.689.185	-1.726.267	-1.763.619	-1.801.184	
Daging	Renstra	1.043.467	1.099.606	1.158.765	1.221.106	1.286.802	5,4
	Kebutuhan pangan	1.147.205	1.172.882	1.198.764	1.224.895	1.251.241	2,2
	Gap	-103.738	-73.276	-39.999	-3.789	35.561	
Telur	Renstra	243.517	257.373	272.018	287.496	303.854	5,7
	Kebutuhan pangan	341.803	349.353	356.964	364.647	372.394	2,2
	Gap	-98.286	-91.980	-84.946	-77.151	-68.540	
Susu	Renstra	326.698	343.698	361.764	380.685	400.594	5,2
	Kebutuhan pangan	414.107	422.685	431.333	440.063	448.865	2,0
	Gap	-87.409	-78.987	-69.569	-59.378	-48.271	
Ikan	Renstra	1.444.000	1.508.880	1.576.858	1.648.085	1.722.721	4,5
	Kebutuhan pangan	614.060	627.417	640.883	654.477	668.183	2,1
	Gap	829.940	881.463	935.975	993.608	1.054.538	

Sumber :

Target Renstra : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat

Kebutuhan pangan : DKPP Jawa Barat 2018 & Jawa Barat Dalam Angka, BPS 2018, diolah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat menetapkan target produksi daging, telur, dan susu pada tahun 2019 masing-masing 1.043.467 ton, 243.517 ton, dan 326.698 ton. Target produksi daging, susu, dan ikan terus meningkat hingga tahun 2023 dengan laju peningkatan masing-masing 5,4%, 5,7%, dan 5,2%. Gap negatif pada pangan jenis daging, telur, dan susu menunjukkan bahwa target produksi ketiga pangan ini belum memenuhi kebutuhan penduduk Jawa Barat, sehingga perlu adanya peningkatan produksi dan jaminan pemenuhan pangan melalui impor dari daerah lain. Berbeda dengan protein hewani lainnya, target produksi ikan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan telah memenuhi kebutuhan ikan hingga tahun 2023. Jika realisasi produksi pada tahun 2019-2023 memenuhi target, maka Provinsi Jawa Barat dapat menjadi Provinsi mandiri ikan.

Variabel perhitungan kebutuhan pangan terdiri dari kebutuhan konsumsi, penggunaan, dan tercecer. Konsumsi makanan dan minuman menjadi salah satu jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam perhitungan PDRB atas harga konstan (Tabel 12). Konsumsi makanan dan minuman ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB harga konstan. Pada tahun 2017, saat skor PPH Jawa Barat mencapai 81,6 poin, jumlah pengeluaran rumah tangga yang dipakai untuk makanan, minuman, dan rokok adalah sebesar 305.318,20 miliar rupiah atau setara 18,74% dari total PDRB atas harga konstan Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya konsumsi makanan dan minuman secara tidak langsung akan meningkatkan PDRB wilayah. Oleh karena itu dibuat proyeksi peningkatan PDRB Jawa Barat jika konsumsi pangan penduduknya meningkat.

Tabel 39 Proyeksi peningkatan konsumsi terhadap PDRB Jawa Barat 2023

Tahun	Skor PPH	Pengeluaran konsumsi penduduk	PDRB pengeluaran konsumsi atas harga konstan	
			Miliar rupiah	Persentase
2017	81,6	Pengeluaran rata-rata	305.318,20	18,74%
2023	85,6	Rp1.000.000- Rp1.500.000	614.066,40	37,68%.

RPJMD Jawa Barat 2018-2023 menyebutkan bahwa target akhir skor PPH Jawa Barat pada tahun 2023 adalah 85,6 poin. Sementara itu, data Susenas Jawa Barat tahun 2017 menunjukkan bahwa penduduk yang sudah mencapai target skor PPH tersebut adalah penduduk dengan pengeluaran konsumsi Rp1.000.000-1.500.000 dalam sebulan. Jika pengeluaran konsumsi penduduk Jawa Barat mencapai Rp1.000.000-1.500.000 dalam sebulan, maka pada tahun 2023 total pengeluaran konsumsi Jawa Barat adalah sebesar 614.066,40 miliar rupiah. Jika diasumsikan demikian, maka jenis pengeluaran konsumsi rumah tangga akan berkontribusi pada PDRB harga konstan Jawa Barat sebesar 37,68%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatnya konsumsi makanan dan minuman secara tidak langsung akan meningkatkan PDRB wilayah.

4.2 Arahan Kawasan dan Simpul Pangan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029, menetapkan 6 (enam) Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung. Masing-masing WP dirumuskan dengan fokus pengembangan sebagai berikut:

1. **WP Bodebekpunjur**, mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cipanas).
2. **WP Purwasuka**, mencakup Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang.
3. **WP Ciayumajakuning**, mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.
4. **WP Priatim–Pangandaran**, mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
5. **WP Sukabumi**, mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.
6. **WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung**, mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan).

Melalui analisis dengan menggunakan pendekatan Teori Titik Henti (*The Breaking Point Theory*) dapat ditentukan lokasi simpul pangan beras. Simpul pangan ini menjadi pusat perdagangan beras di Jawa Barat dengan mempertimbangkan daerah produsen (surplus), jarak, permintaan beras (jumlah penduduk), dan infrastruktur berupa pasar yang telah ada. Terdapat 7 titik henti (simpul beras) di Jawa Barat, sebagai berikut:

- 1) Lokasi titik henti Antara Bodekbekpunjur – Purwasuka :
Titik henti ini berada di Pasar Induk Cibitung, Jalan Pasar Induk, Wanasari, Kecamatan Cibitung Bekasi. Beras yang dijual di lokasi ini dapat berasal dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang.
- 2) Lokasi titik henti Antara Bodekbekpunjur – Sukabumi :
Titik henti ini berada di Pasar Induk Jambu Dua, Jl. A. Yani, Tanah Sereal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor
- 3) Lokasi titik henti Antara Purwasuka – Kawasan Khusus Cekungan Bandung :
Titik henti ini berada di Pasar Cikalong Wetan, Ciptagumati, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat
- 4) Lokasi titik henti Antara Ciayumajakuning– Kawasan Khusus Cekungan Bandung :

Titik henti ini berada di Pasar Pasar Tanjungsari, Jl. Raya Cirebon - Bandung, Kutamandiri, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang

- 5) Lokasi titik henti Antara Priatim-Pangandaran – Kawasan Khusus Cekungan Bandung :

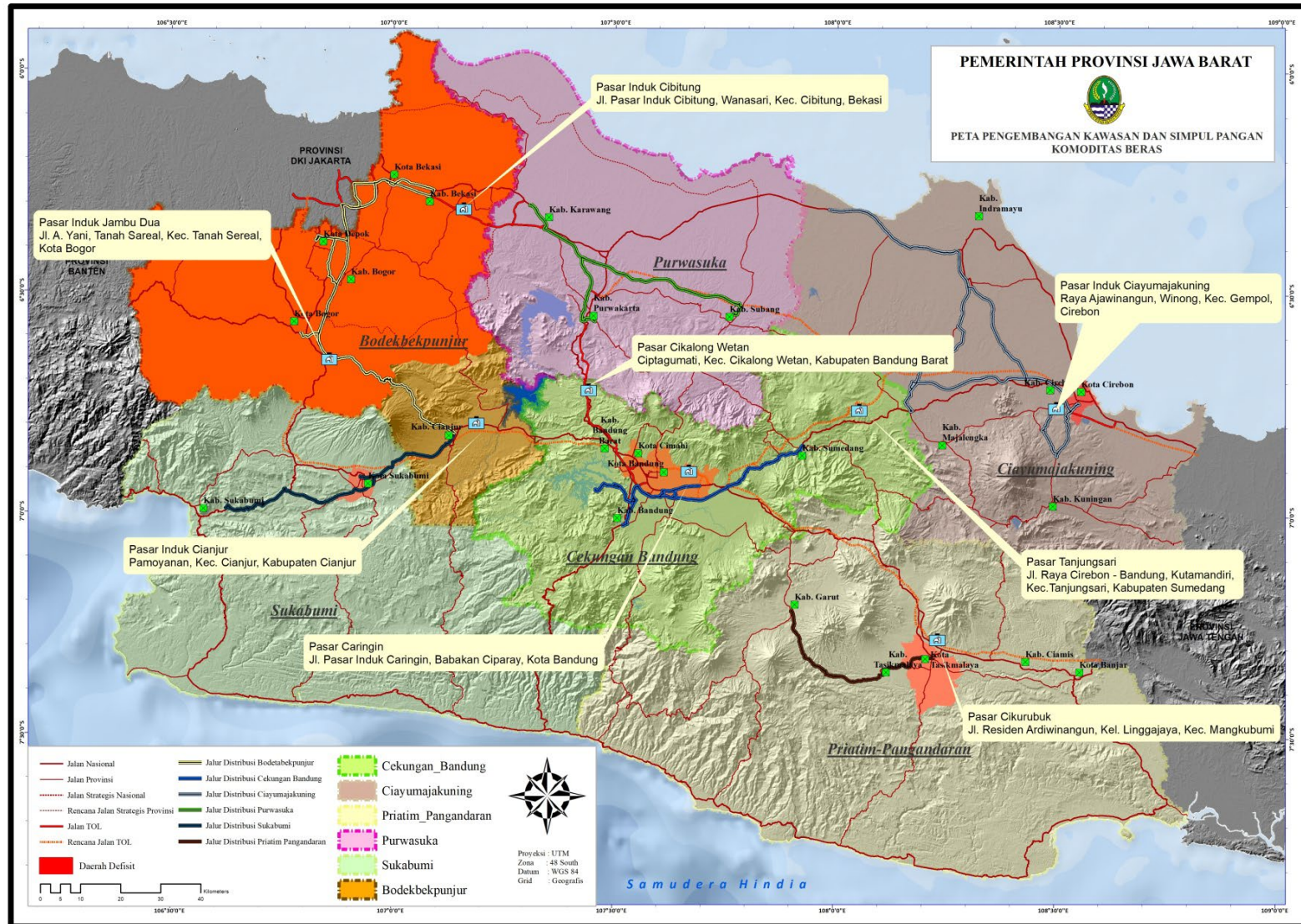
Titik henti ini berada di Pasar Cikurubuk, Jalan Residen Ardiwinangun, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya.

- 6) Lokasi titik henti Antara Sukabumi – Kawasan Khusus Cekungan Bandung

Titik henti ini berada di Pasar Induk Cianjur Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur

- 7) Lokasi titik henti Antara Priatim-Pangandaran – Kawasan Ciayumajakuning

Titik henti ini berada di Pasar Induk Ciayumajakuning, Raya Ajawinangun, Winong, Kec. Gempol, Cirebon.



Gambar 34. Arahan kawasan dan simpul beras Provinsi Jawa Barat

4.3 Arahan Lokus Implementasi Perencanaan Pangan dan Gizi

Penentuan lokus disusun untuk memetakan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang perlu diprioritaskan sebagai daerah sasaran perencanaan pangan. Terdapat dua pendekatan untuk menentukan lokus, yakni *supply* dan *demand* pangan sebagai fokus penanganan untuk OPD terkait. Lokus dari sisi *supply* pangan disebut lokus sentra produksi pangan. Sementara itu, lokus dari sisi *demand* disebut juga lokus perbaikan konsumsi pangan dan gizi.

A. Lokus Sentra Produksi

Lokus sentra produksi adalah hasil *overlay* kemandirian pangan, skor PPH konsumsi, dan prevalensi *stunting*. Terdapat dua jenis prioritas dalam lokus ini, yakni prioritas 1 dan prioritas 2. Lokus sentra produksi prioritas 1 adalah wilayah di Jawa Barat yang memiliki potensi surplus produksi, skor PPH konsumsi kurang dari 80, dan prevalensi *stunting* lebih dari 20%. Adapun lokus sentra produksi prioritas 2 adalah wilayah yang memiliki potensi surplus produksi, skor PPH konsumsi sudah lebih dari 80 namun prevalensi *stunting* masih berada di atas 20%.

Lokus sentra produksi pertama adalah lokus sentra beras. Berdasarkan *overlay* antara kesesuaian lahan, daya dukung pangan, dan daya dukung air, terdapat 16 wilayah yang pengembangan pangannya diarahkan untuk mempertahankan produksi beras. Enam belas wilayah ini merupakan wilayah surplus beras, surplus air, dan memiliki lahan yang sesuai untuk ditanami padi. Wilayah-wilayah tersebut adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Enam belas wilayah ini kemudian dibagi menjadi 2 prioritas dengan mempertimbangkan skor PPH konsumsi dan prevalensi *stunting* masing-masing wilayah.

Tabel 40 Lokus sentra produksi beras

Beras	
P1	P2
Kab Cianjur	Kab Karawang
Kab Garut	Kab Bandung Barat
Kab Sukabumi	Kab Subang
Kab Tasikmalaya	Kab Kuningan
	Kab Majalengka
	Kab Sumedang
	Kab Cirebon
	Kab Indramayu
	Kab Purwakarta
	Kab Ciamis
	Kab Pangandaran
	Kota Banjar

Terdapat empat wilayah yang termasuk ke dalam lokus prioritas 1 dari 16 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi beras. Empat wilayah tersebut yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara dua belas wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Selanjutnya, terdapat 16 wilayah yang kondisi kesesuaian lahan, daya dukung pangan, dan daya dukung airnya mendukung produksi jagung. Keenam belas wilayah tersebut adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

Tabel 41 Lokus sentra produksi jagung

Jagung	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Garut
Kab Cianjur	Kab Tasikmalaya
Kab Bandung	Kab Ciamis
Kab Pangandaran	Kab Kuningan
	Kab Majalengka
	Kab Sumedang
	Kab Indramayu
	Kab Subang
	Kab Purwakarta
	Kab Karawang
	Kab Bandung Barat
	Kota Banjar

Dari 19 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi jagung di Provinsi Jawa Barat. empat diantaranya termasuk ke dalam lokus prioritas 1. Empat wilayah tersebut yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Pangandaran. Sementara lima belas wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Selanjutnya, lokus sentra produksi ubi disajikan pada Tabel 46 sebagai berikut.

Tabel 42 Lokus sentra produksi ubi

Ubi	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Bogor
Kab Cianjur	Kab Bandung
Kab Garut	Kab Ciamis
Kab Tasikmalaya	Kab Kuningan
	Kab Sumedang
	Kab Purwakarta
	Kab Majalengka
	Kota Banjar

Lokus sentra produksi yang dimaksud adalah lokus sentra produksi ubi kayu dan ubi jalar. Terdapat 12 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi ubi di Provinsi Jawa Barat. Dua belas wilayah tersebut merupakan wilayah surplus ubi, surplus air, memiliki skor PPH konsumsi kurang dari 80, dan prevalensi *stunting* lebih dari 20%. Empat diantara dua belas wilayah tersebut yang termasuk ke dalam lokus prioritas 1 adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara delapan wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Selanjutnya, lokus sentra produksi kacang tanah disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 43 Lokus sentra produksi kacang tanah

Kacang tanah	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Bandung
Kab Cianjur	Kab Ciamis
Kab Garut	Kab Kuningan
Kab Tasikmalaya	Kab Majalengka
	Kab Sumedang
	Kab Subang
	Kab Bandung Barat
	Kab Pangandaran
	Kota Banjar

Terdapat 13 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi kacang tanah di Provinsi Jawa Barat. Tiga belas wilayah tersebut merupakan wilayah surplus kacang tanah, surplus air, memiliki skor PPH konsumsi kurang dari 80, dan prevalensi *stunting* lebih dari 20%. Empat dari tiga belas wilayah tersebut yang termasuk ke dalam lokus sentra produksi kacang tanah prioritas 1 adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara sembilan wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Selanjutnya, lokus sentra produksi kelapa disajikan pada Tabel 48 sebagai berikut.

Tabel 44 Lokus sentra produksi kelapa

Kelapa	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Ciamis
Kab Cianjur	Kab Kuningan
Kab Garut	Kab Majalengka
Kab Tasikmalaya	Kab Sumedang
	Kab Indramayu
	Kab Subang
	Kab Purwakarta
	Kab Karawang
	Kab Bandung Barat
	Kab Pangandaran
	Kota Banjar

Terdapat 15 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi kelapa di Provinsi Jawa Barat. Lima belas wilayah tersebut merupakan wilayah surplus kelapa, surplus air, memiliki skor PPH konsumsi kurang dari 80, dan prevalensi *stunting* lebih dari 20%. Empat dari lima belas wilayah yang termasuk ke dalam lokus sentra produksi kelapa prioritas 1 adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara sebelas wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Berikutnya, lokus sentra produksi gula merah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 45 Lokus sentra produksi gula merah

Gula merah	
P1	P2
Kab Garut	-
Kab Tasikmalaya	

Hanya 2 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi gula merah di Provinsi Jawa Barat. Dua wilayah tersebut merupakan wilayah surplus gula merah, surplus air, memiliki skor PPH konsumsi kurang dari 80, dan prevalensi *stunting* lebih dari 20%. Keduanya termasuk ke dalam lokus sentra produksi gula merah prioritas 1. Selanjutnya, lokus sentra produksi daging ruminansia disajikan pada Tabel 50 sebagai berikut.

Tabel 46 Lokus sentra produksi daging ruminansia

Daging ruminansia	
P1	P2
Kab Cianjur	Kab Bogor
Kab Garut	Kab Kuningan
Kab Tasikmalaya	Kab Cirebon
	Kab Purwakarta
	Kab Bandung Barat
	Kota Bogor
	Kota Sukabumi
	Kota Banjar

Terdapat 11 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi daging ruminansia di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI 2018, sebelas wilayah tersebut juga termasuk ke dalam wilayah yang sesuai untuk ditanami pakan ternak. Pakan ternak adalah bahan konsumsi ternak baik ternak ruminansia maupun unggas, sehingga ketersediaannya akan berpengaruh pada produksi daging ruminansia, daging unggas, susu dan telur. Tiga dari sebelas wilayah yang termasuk ke dalam lokus sentra produksi prioritas 1 adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, sembilan wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Berdasarkan data konsumsi, jenis daging ruminansia

yang paling disukai penduduk Jawa Barat adalah daging sapi. Sebanyak 15,2% konsumsi energi daging berasal dari daging sapi, tertinggi kedua setelah daging ayam. Sehingga, pengembangan ternak ruminansia diarahkan ke produksi daging sapi. Namun, peningkatan produksi ini juga perlu memperhatikan dampak pada perubahan iklim. Hal ini disebabkan peningkatan produksi daging ruminansia juga ikut menyumbang pemanasan global dan menyebabkan gas efek rumah kaca.

Tabel 47 Lokus sentra produksi daging unggas

Daging Unggas	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Bogor
Kab Cianjur	Kab Ciamis
Kab Tasikmalaya	Kab Kuningan
Kota Tasikmalaya	Kab Cirebon
	Kab Majalengka
	Kab Sumedang
	Kab Subang
	Kab Purwakarta
	Kab Karawang
	Kota Banjar

Terdapat 14 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi daging unggas di Provinsi Jawa Barat. Empat diantaranya termasuk ke dalam lokus sentra produksi prioritas 1 yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Sementara itu, sepuluh wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Berdasarkan data konsumsi, jenis daging unggas yang paling disukai penduduk Jawa Barat adalah daging ayam. Sebanyak 84,67% konsumsi energi daging berasal dari daging ayam. Sehingga daging unggas yang perlu diprioritaskan untuk mengisi sentra produksi adalah daging ayam.

Tabel 48 Lokus sentra produksi daging ikan

Ikan	
P1	P2
Kab Cianjur	Kab Bogor
Kab Garut	Kab Ciamis
Kab Tasikmalaya	Kab Kuningan
Kota Tasikmalaya	Kab Cirebon
	Kab Majalengka
	Kab Indramayu
	Kab Subang
	Kab Karawang
	Kota Banjar

Terdapat 13 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi ikan di Provinsi Jawa Barat. Empat diantaranya termasuk ke dalam lokus sentra produksi prioritas 1 yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Sementara itu, sembilan wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Berdasarkan data konsumsi, lima jenis ikan yang paling disukai penduduk Jawa Barat adalah ikan mas (18,16%), ikan teri (12,24%), ikan mujair/nila (9,23%), ikan kembung (8,35%), dan ikan tongkol/tuna/cakalang (7,75%). Dengan demikian, pengembangan produksi komoditas ikan sebaiknya diprioritaskan pada lima jenis ikan tersebut.

Tabel 49 Lokus sentra produksi susu

Susu	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Bogor
Kab Cianjur	Kab Bandung
Kab Garut	Kab Kuningan
Kab Tasikmalaya	Kab Sumedang
	Kab Bandung Barat

Terdapat 9 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi susu di Provinsi Jawa Barat. Empat diantaranya termasuk ke dalam lokus sentra produksi prioritas 1 yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, lima wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Selanjutnya, lokus sentra produksi sayur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 50 Lokus sentra produksi sayur

Sayur	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Bogor
Kab Cianjur	Kab Bandung
Kab Garut	Kab Majalengka
	Kab Purwakarta
	Kab Karawang
	Kab Bandung Barat

Terdapat 9 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi sayur di Provinsi Jawa Barat. Tiga diantaranya termasuk ke dalam lokus sentra produksi prioritas 1 yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Sementara itu, enam wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Berdasarkan data konsumsi, lima jenis sayur yang paling disukai penduduk Jawa Barat adalah daun singkong (9,31%), kangkung (7,73%), tomat sayur (5,94%), tauge (4,41%), dan kacang panjang (4,15%). Sehingga, kelima jenis sayur tersebut perlu diprioritaskan untuk menjadi komoditas sentra produksi di Jawa Barat.

Tabel 51 Lokus sentra produksi buah

Buah	
P1	P2
Kab Sukabumi	Kab Majalengka
Kab Cianjur	Kab Sumedang
Kab Garut	Kab Subang
	Kab Purwakarta
	Kota Banjar

Terdapat 8 wilayah yang menjadi lokus sentra produksi buah di Provinsi Jawa Barat. Tiga diantaranya termasuk ke dalam lokus sentra produksi prioritas 1 yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Sementara itu, lima wilayah lainnya termasuk ke dalam prioritas 2. Berdasarkan data konsumsi, lima jenis buah yang paling disukai penduduk Jawa Barat adalah pisang (38,45%), salak (25,38%), pepaya (15,74%), jeruk (11,46%), dan apel (4,53%). Dengan demikian, pengembangan produksi komoditas buah sebaiknya diprioritaskan pada lima jenis buah tersebut.

B. Lokus Perbaikan Konsumsi Pangan dan Gizi

Lokus perbaikan konsumsi pangan dan gizi adalah hasil *overlay* kualitas konsumsi pangan, skor PPH konsumsi, dan prevalensi *stunting*. Terdapat dua jenis prioritas dalam lokus ini, yakni prioritas 1 dan prioritas 2. Lokus ini menampilkan wilayah dengan skor PPH konsumsi rendah dan prevalensi *stunting* tinggi serta memiliki kualitas konsumsi yang rendah. Adapun arahan lokus perbaikan konsumsi pangan dan gizi di Jawa Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 52 Lokus perbaikan konsumsi pangan dan gizi

P1	P2
Kab Garut	Kab Bandung Barat
Kab Majalengka	Kab Purwakarta
Kab Sukabumi	
Kab Cianjur	
Kab Bandung Barat	
Kab Tasikmalaya	
Kota Tasikmalaya	

Terdapat 9 wilayah yang menjadi lokus perbaikan konsumsi pangan dan gizi di Provinsi Jawa Barat. Tujuh diantaranya termasuk ke dalam lokus prioritas 1 yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya. Sementara itu, dua wilayah lainnya yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Purwakarta termasuk ke dalam prioritas 2.

Berdasarkan uraian analisis situasi masalah pangan dan gizi pada Bab III, maka terkonfirmasi bahwa masalah gizi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi. Dengan demikian, penyelesaiannya memerlukan kerjasama multisektor melalui intervensi gizi terintegrasi antara intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi terintegrasi ditandai dengan program kebijakan antar OPD yang saling konvergen serta dilaksanakan pada wilayah lokus yang sama.

Lokus perbaikan konsumsi pangan dan gizi pada Tabel 56 merupakan lokus tingkat kabupaten, sehingga perlu dijabarkan kembali hingga tingkat kecamatan dan desa supaya intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Selanjutnya, program dan intervensi yang akan dilaksanakan di setiap desa harus memperhatikan kebutuhan dari masing-masing desa. Kebutuhan dan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang terdapat di desa dapat dilihat dari data status IDM (Indeks Desa Membangun). Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa. Melalui perhitungan IDM, diperoleh pembagian status desa yakni desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.

Rendahnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) suatu desa mengindikasikan adanya permasalahan pada akses ke pelayanan kesehatan dan masalah pemukiman (air bersih dan sanitasi). Oleh karena itu, pada desa-desa dengan indeks ketahanan sosial yang rendah, perlu peningkatan intervensi terkait pelayanan kesehatan dan lingkungan perumahan sehat.

Adapun jika yang bermasalah adalah Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) maka mengindikasikan adanya permasalahan pada tingkat kesejahteraan keluarga sehingga cenderung memiliki akses makanan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pada desa-desa dengan IKE yang rendah, perlu intervensi yang khusus pada penanganan masalah akses pangan seperti KRPL, PKH, BPNT dan pemberdayaan masyarakat lainnya yang spesifik untuk meningkatkan status ekonomi.

Salah satu indikator ketahanan lingkungan adalah status ketercemaran air, tanah dan udara serta status ketercemaran sungai oleh limbah. Rendahnya nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) mengindikasikan adanya potensi masalah keamanan pangan yang dapat mengakibatkan infeksi kesehatan yang dapat memicu *stunting*. Oleh karena itu, pada desa-desa dengan indeks ketahanan lingkungan yang rendah, intervensi yang ditekankan adalah perbaikan kualitas lingkungan melalui penjaminan akses air bersih, sanitasi layak dan penanganan air limbah dan persampahan. Penajaman penentuan intervensi dari masing-masing desa secara lebih lanjut dapat dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Selain Musrenbangdes, isu tersebut juga dapat dibahas dalam rembuk *stunting* di tingkat desa.

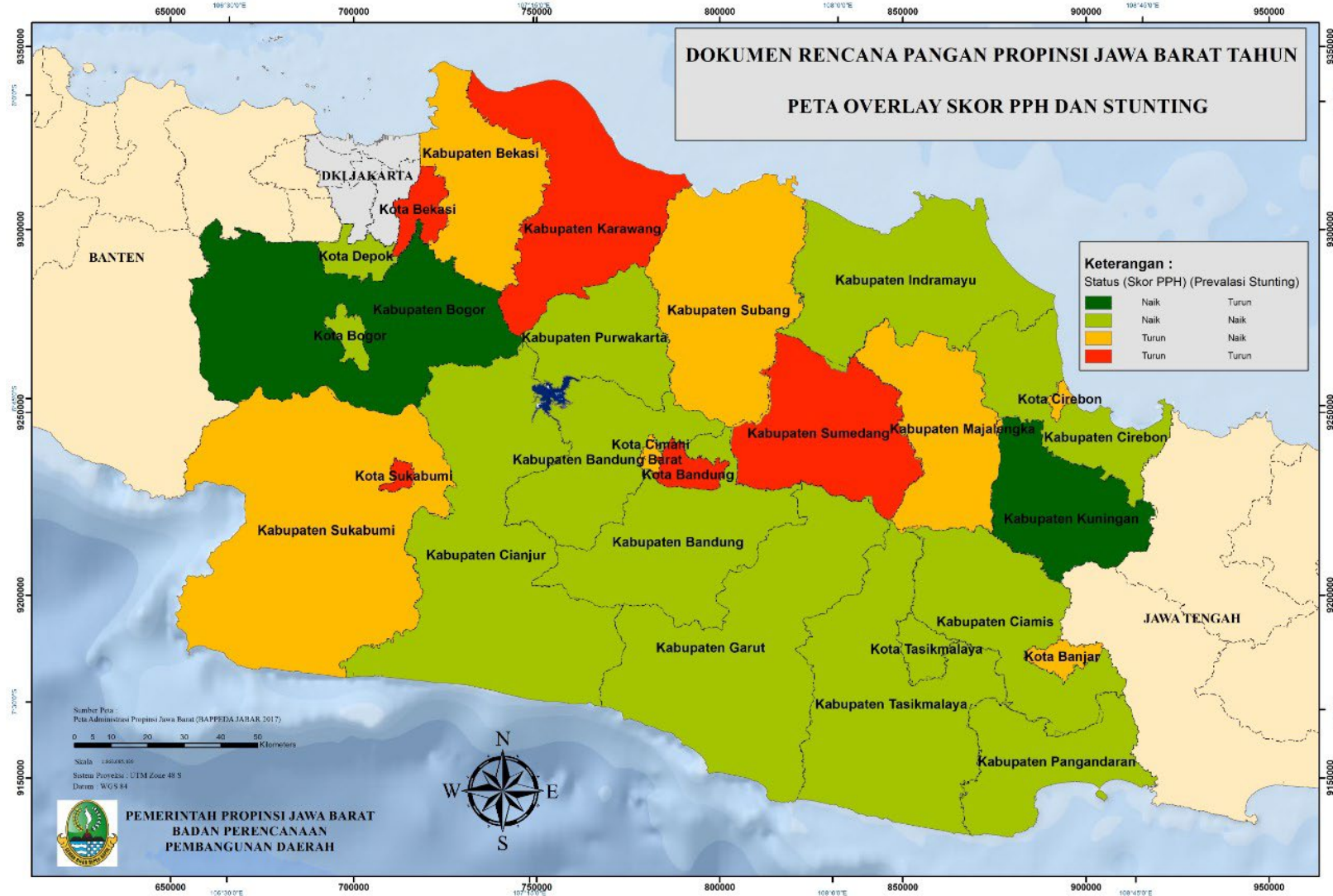
4.4 Arahan Rencana Aksi Multipihak - Implementasi Pekerjaan (RAM-IP)

Ketahanan pangan merupakan hasil dari interaksi subsistem ketersediaan, akses, maupun konsumsi pangan. Selanjutnya ketahanan pangan ini akan mempengaruhi status gizi penduduk. Penjaminan ketahanan pangan akan berdampak positif terhadap permasalahan gizi (Cholidah, 2018). Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk menyediakan pangan yang cukup hingga tingkat perseorangan. Selain itu, pangan yang disediakan juga perlu terjamin kualitas maupun keamanan pangannya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan urusan wajib pangan. Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**. Adapun misi yang terkait dengan pangan adalah misi keempat, yaitu **Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan**. Visi misi pembangunan pangan dan gizi tersebut kemudian dituangkan melalui penetapan skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023. Oleh karena itu, OPD sebagai perpanjangan tangan Gubernur memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan ketahanan pangan daerah.

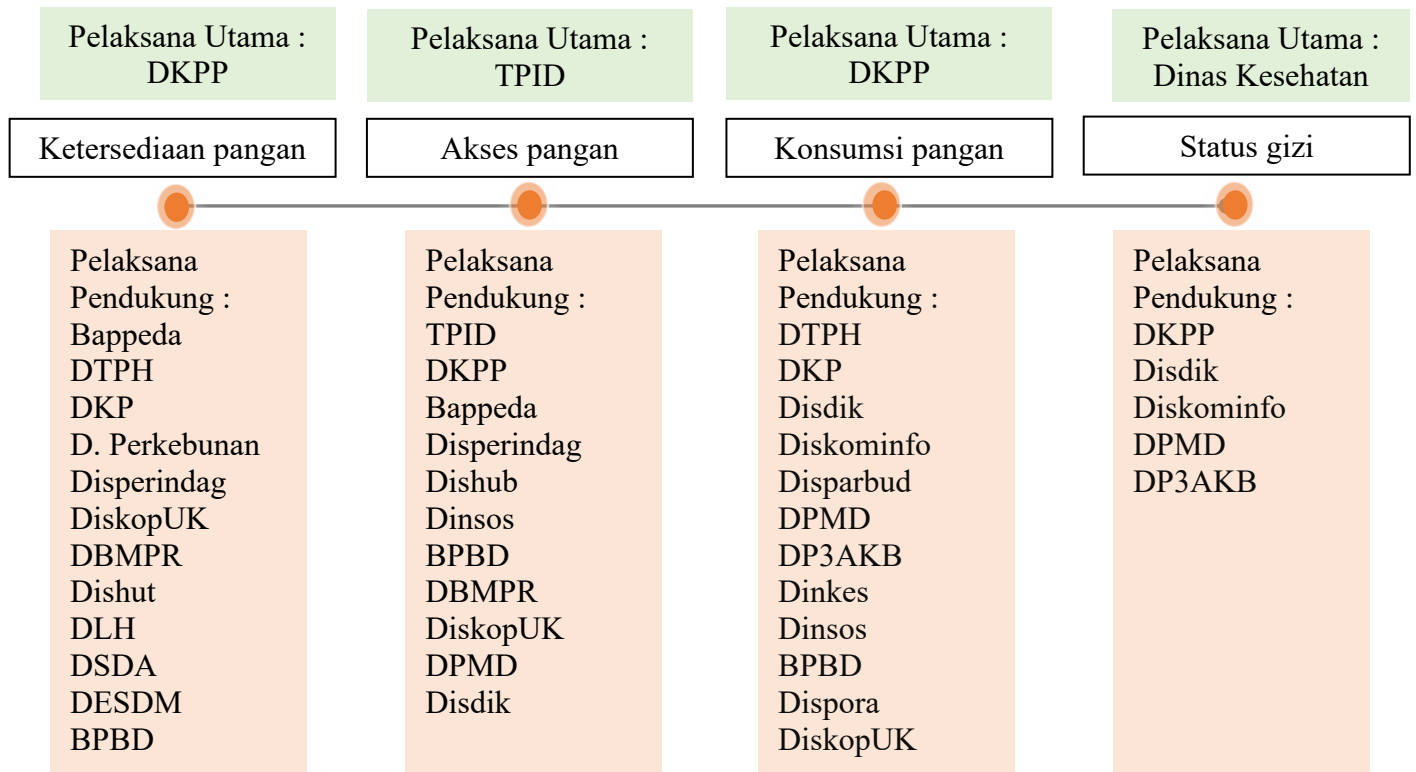
Pendekatan utama dalam penyusunan perencanaan pangan Jawa Barat adalah skor PPH konsumsi. Skor PPH merupakan acuan jumlah dan jenis kelompok bahan pangan yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Semakin baik penyediaan dan konsumsi pangan di wilayah tertentu, skor ideal akan semakin mendekati skor ideal, yaitu 100. Semakin ideal skor PPH suatu wilayah, maka akan semakin menurun prevalensi masalah gizinya. Oleh karena itu, untuk melihat keberhasilan skor PPH dalam menurunkan prevalensi *stunting*, dibuat *overlay* skor PPH seluruh Kabupaten/Kota dengan prevalensi *stunting* masing-masing wilayah yang disajikan dalam gambar 42.

Terdapat dua wilayah di Jawa Barat yang memiliki kondisi dimana skor PPH konsumsi meningkat dan prevalensi *stunting* menurun. Dua wilayah tersebut adalah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan. Selanjutnya, terdapat 7 wilayah yang mengalami penurunan skor PPH yang kemudian diikuti oleh peningkatan prevalensi *stunting*. Sementara itu, terdapat 18 wilayah yang memiliki kondisi skor PPH meningkat namun prevalensi *stunting* juga ikut meningkat, atau skor PPH turun namun prevalensi *stunting* juga menurun. Seharusnya meningkatnya skor PPH akan berdampak pada penurunan prevalensi *stunting*. Ketidaksesuaian kondisi ini dapat disebabkan tidak adanya perencanaan pangan dan gizi yang baik di wilayah tersebut, sehingga diperlukan penyusunan perencanaan agar intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi lebih terarah dan tepat sasaran.



Gambar 35 Sebaran perbandingan skor PPH dan prevalensi *stunting* Jawa Barat

Terwujudnya ketahanan pangan tidak lepas dari peran multisektor sehingga penjaminan ketahanan pangan bukan hanya diwujudkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, namun perlu dukungan dan sinergitas dari OPD terkait lainnya. Adapun arahan pembagian kinerja dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Jawa Barat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 36 Arahan RAM-IP

BAB V. RESUME

Perencanaan Pangan merupakan dokumen yang disusun dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Jawa Barat. Ketahanan pangan merupakan sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan pangan, akses pangan, dan konsumsi pangan. Dokumen ini menjabarkan strategi dan arahan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Gubernur terkait pangan, yaitu skor PPH konsumsi.

Penyelenggaraan pangan di Provinsi Jawa Barat masih belum tersinergi, baik dari sektor hulu/*supply* maupun hilir/*demand*. *Supply* pangan merupakan subsistem ketersediaan dan akses pangan. Terdapat beberapa masalah *supply* pangan di Jawa Barat diantaranya terjadi alih fungsi lahan pertanian. Hasil pengolahan peta digital Jawa Barat tahun 2017 menyatakan terjadi penurunan lahan pertanian sawah tahun 2013-2017 sebesar 0,74%. Pada kurun waktu tersebut, juga terjadi penurunan luas lahan pertanian bukan sawah sebesar 11,98%. Selain itu, masalah pada sektor hulu lainnya meningkatnya persentase *food losses and food waste* di Jawa Barat. Data tahun 2017 menunjukkan jumlah *food losses and food waste* di Jawa Barat mencapai 1.493.580 ton. Padahal jika dihitung berdasarkan konsumsi rata-rata penduduk Jawa Barat pada tahun 2017, jumlah beras yang hilang tersebut dapat memberi makan lebih dari 10 juta jiwa.

Selanjutnya, berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat 2018-2023, ketersediaan air untuk lima tahun mendatang secara umum di Provinsi Jawa Barat masih mencukupi kebutuhan. Akan tetapi, terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang akan mengalami kondisi defisit air, yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Menurunnya ketersediaan air di Jawa Barat akan berpengaruh pada jumlah produksi pangan mengingat air merupakan salah satu faktor produksi pertanian.

Berikutnya dari segi *supply* pada subsistem akses pangan, diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 8,15 tahun. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat baru menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8 (belum tamat). Capaian tersebut masih kurang karena belum berhasil mencapai target program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Padahal tingkat pendidikan umumnya akan sejalan dengan tingkat pengetahuan gizi. Tingkat pendidikan memiliki hubungan positif terhadap tingkat konsumsi makanan yang lebih beragam (Worsley *et al*, 2004).

Masalah lainnya di sektor akses pangan adalah masih tingginya tingkat pengeluaran penduduk Jawa Barat akan tembakau dibanding pangan segar. Data menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran makanan tertinggi penduduk Provinsi Jawa Barat dari 2014-2018 adalah makanan dan minuman, tembakau, kemudian padi-padian. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata rumah tangga di Jawa Barat lebih banyak mengalokasikan uangnya untuk membeli rokok dibandingkan kebutuhan pangan segar.

Berdasarkan sisi *demand* atau hilir, kebutuhan pangan penduduk Jawa Barat akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk. Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2017 tercatat sebanyak 48.037.827 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,39% per tahun. Disamping itu, permasalahan penyelenggaraan pangan yang terjadi di Jawa Barat adalah konsumsi masyarakat yang kurang beragam dan masih didominasi oleh kelompok padi-padian. Diversifikasi pangan beras memang sudah berhasil karena terdapat penurunan konsumsi sebesar 2,47% pada 2014-2015 dan 1,95% pada 2016-2017. Namun penurunan konsumsi beras ini juga diikuti oleh meningkatnya konsumsi terigu serta masih rendahnya konsumsi pangan ubi, kacang-kacangan, protein hewani, serta sayur dan buah. Skor PPH Jawa Barat juga belum mencapai ideal yakni masih berada pada angka 85,2.

Selanjutnya, masalah *demand* juga terjadi pada masalah gizi. Berdasarkan Kemenkes RI dalam Dokumen Penilaian Status Gizi Jawa Barat 2018, persentase *underweight*, *wasting*, *stunting*, dan obesitas di Jawa Barat berturut-turut adalah 15,1% (masalah tingkat sedang), 6,4% (masalah tingkat sedang), 29,2% (masalah tingkat sedang), dan 45,1%. *Stunting* merupakan

n masalah gizi utama di Jawa Barat yang memerlukan perhatian lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat. Prevalensi *stunting* Jawa Barat meningkat menjadi 31,1% pada tahun 2018 (masalah tingkat tinggi).

BAB VI. ARAH KEBIJAKAN

Berikut arah kebijakan provinsi Jawa Barat dalam upaya realisasi peningkatan ketahanan Pangan dan Gizi :

1. Menjadikan skor PPH sebagai Indikator Kerja Utama (IKU) Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung dan memperkuat capaian IKU Gubernur Jawa Barat.
2. Melakukan manajemen data menggunakan *digital platform* untuk monitoring dan evaluasi IKU kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pangan → Sistem Informasi Pangan Gizi secara terpadu.
3. Melakukan pembentukan *market intelligence* oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing-masing Kabupaten/Kota untuk mengontrol keluar masuknya pangan di wilayah, sehingga tersedia data ekspor dan impor pangan yang jelas dan akurat. Hal ini dapat direalisasikan melalui Sistem Informasi Pangan Gizi secara terpadu.
4. Melakukan prioritas dalam pemberian anggaran kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam pengembangan lokus implementasi perencanaan pangan dan gizi wilayah sentra produksi untuk jenis pangan beras, jagung, ubi, kacang tanah, kelapa, gula merah, daging ruminansia, daging unggas, ikan, susu, sayur, dan buah.

5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan pengembangan komoditas pada lokus sentra produksi. Jenis pangan yang diprioritaskan adalah jenis pangan dengan preferensi tertinggi penduduk Jawa Barat. Arahannya pengembangan kelompok protein hewani diprioritaskan pada daging unggas (ayam), susu, dan ikan (ikan mas, ikan teri, ikan mujair/nila, ikan kembung, dan ikan tongkol/tuna/cakalang). Arahannya pengembangan kelompok sayur dan buah diprioritaskan untuk komoditas daun singkong, kangkung, tomat sayur, tauge, kacang panjang, pisang, salak, pepaya, jeruk, dan apel.
6. Adanya sinergi antara dinas terkait pada wilayah sentra produksi beras untuk memenuhi kebutuhan beras regional Jawa Barat terlebih dahulu. Optimalisasi dan efisiensi alur distribusi beras dilakukan dengan mengacu pada arahan kawasan dan simpul pangan. Setelah kebutuhan beras regional Jawa Barat terpenuhi, kelebihan beras lainnya dapat digunakan untuk menyangga ketahanan pangan Nasional.
7. Perlunya penguatan kawasan dan simpul pangan yang diatur lebih lanjut melalui regulasi.
8. Program kegiatan OPD dari hulu ke hilir difokuskan pada wilayah lokus penanganan masalah pangan dan gizi yang telah diverifikasi dan dijabarkan hingga tingkat kecamatan dan desa.
9. Adanya usulan program dan kegiatan lintas dinas per subsistem ketahanan pangan dari OPD-OPD terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Jawa Barat.
10. Masing-masing daerah disarankan untuk memiliki dokumen perencanaan pangan detail terkait pangan dan gizi untuk mencapai target skor PPH. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 8 ayat 2 bahwa perencanaan pangan perlu disusun di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL